Radikalisme Berbasis Agama

Hamzah Harun Al Rasyid

RADIKALISME
BERBASIS AGAMA

Penulis:

Hamzah Harun Al Rasyid

***Penerbit*:**

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Hamzah Harun Al Rasyid

Radikalisme Berbasis Agama / Hamzah Harun Al Rasyid.
Makassar, Alauddin University Press, 2021

vi, 166 hlm. ; 15,5 x 23 cm
Cetakan : 2021

ISBN : 978-602-328-373-6

Cover design : NHZ
Setting/Lay out : Kilat Sudarto

Penerbit : Alauddin University Press
UTP Perpustakaan UIN Alauddin
Jl. H.M. Yasin Limpo No. 63
Gowa, Sulawesi Selatan

Dicetak Oleh : CV. Berkah Utami

PENGANTAR PENULIS

Buku ini merupakan refleksi dari beberapa hasil riset yang dilakukan oleh Penulis beserta tim peneliti tentang gerakan radikalisme yang berbasis agama dalam kawasan Timur Indonesia, dengan basis data sebagian besar diambil dari riset tentang *perspektif Publik terhadap radikalisme agama di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan pada tahun 2014.*

Fenomena radikalisme agama telah menjadi fenomena internasional. Ada banyak motif yang menjadi latar belakang munculnya gerakan radikalisme agama. Dan sebagai gerakan internasional, Indonesia menjadi salah satu tempat sasaran dan rekruitmen kader dalam jaringan gerakan radikalis internasional.

Penulis menyadari bahwa istilah radikalisme (juga terorisme dan istilah-istilah lain) merupakan istilah yang mengundang perdebatan. Beberapa elemen Islam menolak untuk disebut sebagai radikalis atau ekstrimis dilekatkan secara semena-mena kepada Islam. Mereka menganggap gerakan mereka sebagai misi keagamaan dan bernilai ibadah. Tentu saja dapat dimaklumi keberatan-keberatan yang terkait dengan istilah, karena impilikasi sosio-politiknya bisa menimpa semua elemen masyarakat Islam. Oleh karena itu, buku ini berupaya untuk memberikan pemahaman tentang peta gerakan keagamaan Islam kontemporer yang berkembang pasca reformasi. Ada gerakan politik, gerakan kultural, dan juga ada gerakan kekerasan. Kelompok-kelompok ini tidaklah terkait secara otomatis satu sama lain. Sehingga menguniversalisasi istilah radikal untuk semua kelompok yang secara tampilan dan basis epistemologi memiliki kemiripan.

Buku ini – meski tidak terlalu banyak – menjelaskan bahwa fenomena kekerasan berbasis agama adalah fenomena

universal. Beberapa kasus yang dibahas melibatkan kekerasan dari kelompok agama non muslim seperti kasus Tolikara. Kalaupun istilah ini lebih banyak dilekatkan kepada kelompok Islam, itu karena frekwensi kasus dan proses ideologisasi yang memang lebih banyak terjadi di kalangan gerakan Islam di Indonesia.

Bagaimanapun dan dari kelompok (agama) manapun, gerakan radikalisme tidak bisa dibenarkan dan ditolerir. Semua elemen bangsa ini harus bergerak bersama untuk Kekerasan atas Nama Agama menangkal dan melawan arus radikalisme yang semakin gencar di era media sosial. Di bagian akhir buku ini, penulis mengusul tiga cara sebagai model perlawanan terhadap gerakan radikalisme berbasis agama.

Makassar, Agustus 2021

Penulis,

Hamzah Harun Al Rasyid

DAFTAR ISI

BAB I

MUKADDIMAH

Akan tetapi kemunculan ISIS di Indonesia memaksa kita untuk berfikir ulang tentang itu. Bahwa ternyata benih-benih radikalisme masih hidup dan punya dukungan di Indonesia.

Perbincangan terhadap kekerasan agama di Indonesia memasuki babak baru ketika bendera ISIS (*Islamic State of Iraq and Shuria*) "tiba-tiba" berkibar di beberapa tempat di Indonesia seperti di Poso, Solo, Jambi, Pekanbaru dan Aceh. Disebut babak baru, karena perbincangan tentang radikalisme agama di Indonesia sebenarnya memasuki titik yang jenuh. Keberadaannya pun tidak lagi mendapatkan perhatian dari masyarakat. Pendekatan militer yang konsisten digunakan oleh negara (melalui Densus 88) tampaknya cukup efektif mengeliminir perkembangan kelompok ini.

Akan tetapi, kemunculan ISIS di Indonesia memaksa kita untuk berfikir ulang tentang itu. Bahwa ternyata benih-benih radikalisme masih hidup dan punya dukungan di Indonesia. Bahwa semangat kelompok Islamis radikal Indonesia tidak pernah mati meski sebagian tokohnya sudah dieksekusi dan dipenjarakan. Kelompok-kelompok lama ini bahkan seperti mendapatkan nafas kembali untuk membangun kekuatan baru. Meski sejauh ini dukungan terhadap ISIS masih bersifat simbolik tetapi mengutip pernyataan Jenderal TNI Moeldoko, "keberadaan ISIS semakin nyata" (Radar Sulteng, 12 september 2014).[1]

---

[1] Dikutip dari makalah KABINDA (Kepala BIN Daerah) Sulbar yang disampaikan pada seminar Deradikalisasi Agama di Polewali Mandar tanggal 04 September 2014.

Beberapa indikasi dukungan terhadap ISIS, antara lain:

11 Juli 2014, Abu Bakar Ba'asyir (JAT) dan sejumlah narapidana teroris LP Pasir Putih Nusakambangan, menyatakan berbai'at (mendukung) perjuangan menegakkan "Khilafah dan Daulah Islamiyah" (Kekhalifahan dan Negara Islam), meskipun tidak secara spresifik menyatakan berbai'at kepada Daulah Islamiyah versi ISIS.

20 Juli 2014, Ansharul Khilafah Jawa Timur deklarasikan dukungan terhadap ISIS di sebuah mesjid yang baru selesai dibangun, dalam kesempatan tersebut Muhamad Romly (Koordinator) menyatakan bahwa dukungan kekhalifahan Islam kepada Abu Bakar al-Baghdadi karena pihaknya yakin dapat membangun peradaban Islam yang lebih baik, meskipun hanya sebatas dukungan moral, bukan dana ataupun mengirimkan jihadis ke Irak dan Suriah.

15 Juli 2014, sekitar 400 simpatisan JAT, dipimpin Ustadz Afif Abdul Majid (simpatisan ISIS / veteran konflik Suriah) menyelenggarakan acara "Deklarasi Forum Pendukung Daulah Islamiyah", di Mesjid Baitul Makmur, Desa Madegondo, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Surakarta.

4 Agustus 2014, terinformasi pendukung ISIS dan Daulah Islamiyah Surakarta, sepakat mengganti singkatan nama ISIS menjadi "Suriah Indonesia Lan Iraq (SILIR)" dengan tujuan agar mudah mengingat oleh masyarakat Solo Raya, khususnya anggota Laskar Igaras dan generasi muda Islam, serta mengelabui penegak hukum.

Pada tanggal yang sama di Mesjid Muhajirin, Jl. Pulo Sirih, Kel. Pekayon Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jabar, berlangsung bai'at serta deklarasi dukungan terhadap ISIS dan Daulah Islamiyah JAT Kota Bekasi, dihadiri sekitar 50 orang, dipimpin Syamsudin Uba.

Penangkapan tujuh orang yang diduga anggota ISIS atau MIT (Mujahidin Indonesia Timur) jaringan Santoso di Parigi Moutong menjadi penguat "kehadiran yang nyata itu" (Radar Sulteng, 14 September 2014).

Kita harus waspada karena mereka meninggalkan memori yang buruk dalam ingat kita. Rentetan Bom yang terjadi selama satu dasawarsa[2], konflik Poso, Ambon, dan Mamasa adalah karya cipta mereka. Bukan hanya memoar tentang luka kemanusiaan yang ditinggalkan tetapi juga perspektif terhadap Islam. Mengapa? Karena mereka melakukannya atas nama ajaran agama Islam.

Dari sini, gerakan yang dianggap sebagai gerakan terorisme ini membuat preseden buruk bagi agama Islam di mata global. Islam dituding sebagai agama yang mudah membangkitkan semangat kekerasan dengan konsep jihad. Keterlibatan beberapa alumni Pesantren Ngruki (Imam Samudra, Mukhlas dan Ali Gufran Cs) dalam peristiwa kekerasan (Bom Bali) membuat lembaga pesantren dicitrakan sebagai "pabrik" terorisme. Dan Indonesia pun dianggap sebagai negara sarang terorisme. Tidak mengherankan, munculnya gerakan ISIS di Irak dan Suriah membuat mata dunia melirik Indonesia. Kedatangan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair ke Indonesia pada tanggal 11 September 2014 secara khusus untuk membahas ISIS dengan presiden SBY menandakan

---

[2] Mulai dari Kasus Bom Kedubes Filipina 2000, Bom Bursa Efek Jakarta 2000, Bom malam Natal 2000, Bom Plaza Atrium 2001, Bom Gereja Santa Anna dan HKBP 2001, Bom Tahun Baru 2002, Bom Bali 2002, Bom McDonald's Makassar 2002, Bom Kompleks Mabes Polri 2003, Bom Bandara Soekarno-Hatta 2003, Bom JW Marriott 2003, Bom Palopo 2004, Bom Kedubes Australia 2004, Bom Bali 2005, Bom Tentena 2005, Bom Palu 2005, Bom Jakarta 2009, dan Bom Cirebon 2011

bahwa Indonesia adalah negara yang harus dibicarakan dalam konteks terorisme global.

Dalam posisi ini, Islam di Indonesia, khususnya pesantren, harusnya dipandang sebagai korban. Korban dari pandangan universalitas yang meletakkan perspektifnya hanya kepada 'kelakuan' segelintir orang. Padahal, kita semua menyadari kalau Islam Indonesia adalah kekuatan utama bangsa Indonesia dengan pesantren sebagai penyanggahnya yang paling kuat. Pesantren tidak hanya membawa spirit perlawanan terhadap kolonialisme Belanda dan Jepang tetapi juga menjadi elemen penting dalam pembentukan negara bentuk NKRI, bukan negara agama (Islam).

Harus diakui bahwa gerakan radikalisme Islam di Indonesia memang massif pasca reformasi. Hal ini menyebabkan Islam di Indonesia mengalami simplifikasi istilah terorisme. Walau disadari dengan baik bahwa istilah radikalisme dan terorisme adalah fenomena global yang bisa terjadi di semua agama dan identitas tertentu. Seperti gerakan IRA di Irlandia, Ku Xu klan, macan Tamil, dan gerakan-gerakan radikal lainnya yang menggunakan tindakan kekerasan.

A. Mendiskusikan Istilah

Sejauh ini, istilah yang paling sering digunakan untuk mengkategorikan kelompok Islam seperti ISIS, MI, JI, dan Jihadis adalah Islam radikal atau teroris. Tindakan-tindakan destruktif yang mereka lakukan membuat mereka dicap seperti itu. Istilah ini sempat menjadi perdebatan hangat di awal tahun 2000an. Sebagian umat Islam tidak terima dengan istilah ini karena dianggap terlalu pejoratif terhadap Islam.

Pembacaan simplistis yang menyebabkan Islam tersangka secara normatif. Meski pada akhirnya, istilah ini menjadi istilah 'resmi' kepolisian, milter, dan media massa. Penangkapan tujuh orang di Kab. Parimo (Parigi Moutong) Sulawesi Tengah pada bulan September 2014 misalnya, pun langsung diberitakan media massa (baik cetak maupun elektronik) sebagai "kelompok teroris" meski diakui masih sedang diselidiki dan didalami oleh pihak kepolisian. Sedangkan bagi para 'tertuduh' teroris sebenarnya lebih senang menyebut diri mereka sebagai pejuang Islam, jihadis, atau penegak kebenaran Tuhan di bumi.

Istilah lain yang cukup populer adalah Islam fundamentalis. Istilah ini pada awalnya muncul dari sosiolog untuk menyebut kelompok fundamentalist Kristen, Jhon L Esposito (1994; 17-18) menyebutkan istilah ini digunakan setidaknya dalam tiga hal. *Pertama*, semua usaha untuk kembali pada kepercayaan dasar. Dalam konteks masyarakat Islam adalah usaha kembali kepada Alquran dan Hadis sebagai model hidup normatif. *Kedua*, pengertian yang sangat dipengaruhi oleh tradisi Protestanisme Amerika. Fundamentalisme adalah gerakan Protestanisme abad 20 yang menekankan penafsiran Injil secara literal sebagai hal yang fundamental bagi kehidupan dan ajaran Kristen. Bagi kebanyakan orang Kristen, cap ini bernada penghinaan yang berarti dekat dengan sesuatu yang statis, kemunduran dan kejumudan. *Ketiga*, istilah untuk menyebut sesuatu yang terkait dengan aktivitas politik, ekstrimisme, fanatisme, terorisme, dan anti-Amerikanisme.

Dalam konteks pemahaman ini, fundamentalisme dan radikalisme dianggap memiliki cara pandang yang sama tetapi dengan tipikal gerakan yang berbeda. Karenanya muncul istilah fundamentalisme puritan dan

fundamentalisme radikal. Yang pertama bergerak di level akademik, kultural, dan politis sedangkan yang kedua bergerak di level bawah tanah dengan aksi kekerasan sebagai ciri khasnya. Kelompok Wahda Islamiyah, HTI (Hidzbuttahrir Indonesia) dan kelompok salafi lainnya dikategorikan sebagai kelompok pertama, sedangkan kelompok yang selama ini disebut kelompok teroris dikategorikan sebagai kelompok kedua. FPI berada di posisi unik dalam konteks ini. Meski kerap melakukan tindakan kekerasan atau radikal tetapi FPI tidak pernah dikategorikan sebagai kelompok teroris.

Sejak semula, penggunaan istilah fundamentalisme sudah menimbulkan perdebatan, seperti Bernard Lewis (1993) berikut ini:

> Sekarang sudah merupakan hal umum untuk menggunakan istilah "fundamentalisme" kepada sejumlah kelompok-kelompok militan dan radikal Islam. Pemakaian istilah ini sudah mapan dan pasti diterima, tapi hal itu masih disayangkan karena dapat menyesatkan. Fundamentalis adalah istilah orang Nasrani. Tampaknya itu dimulai dipakai pada awal abad ini yang menunjuk pada gereja- gereja dan organisasi Protestan tertentu, lebih khusus lagi terutama menerjemahkan keilahian dan kebenaran Injil secara harfiah.

Dalam hal ini mereka (kaum muslim) menentang pendekatan kaum liberal dan modernis terhadap Qur'an, sikap semua kaum muslim terhadap teks-teks Al-Qur'an terhadap teks-teks Al-Qur'an, paling tidak, pada prinsipnya fundamentalis. Atau pendapat Fedrick M. Danny (1987: 117) berikut:

> Istilah fundamentalis muncul pada awal abad ini sebagai kerangka kerja kaum Protestan Konservatif di

Amerika. Istilah ini digunakan untuk menunjuk ciri suatu doktrin yang berdasarkan Kitab Injil, yang meliputi lima poin (kelahiran Yesus dari Sang Perawan, kebangkitan fisiknya, Kitab Injil yang tanpa salah, penebusan dosa subtitusional, dan kedatangan Kristus yang kedua). Poin yang sejalan dengan kaum muslimin hanyalah ketidaksalahan kitab Injil (dalam konteks Islam, Al-Qur'an). Pada tahun-tahun terakhir penggunaan istilah fundamentalisme tersebut menjadi populer, ditujukan kepada militan konservatif muslim. Sebutan itu pasti tidak akan benar-benar dipergunakan, jika kita mengacu pada pengertian orisinil.

Istilah fundamentalis dengan begitu adalah istilah yang bermasalah. Selain bersumber dari tradisi gerakan Kristen, ciri skriptualisme sebagai ciri utama dari kelompok (yang disebut fundamental) ternyata tidak cukup kuat untuk menggambarkan kenyataan seperti ini dalam Islam. Perdebatan dalam Islam di Indonesia tidaklah terkait dengan isu fundamental (mendasar) dalam ajaran Islam seperti tauhid, kenabian Muhammad, rukun iman dan Islam. Seluruh aliran dalam Islam (Sunni) sama sekali tidak memperdebatkan persoalan empat persoalan pokok itu. Seluruh aliran dalam Islam-Sunni sepakat untuk tidak memperdebatkan hal-hal yang dianggap pokok-pokok ajaran Islam sebagai wilayah *ushuly* dan membolehkan perdebatan pada persoalan yang dianggap cabang atau *furuiyah.*

NU, Muhammadiyah, Wahda Islamiyah, HTI dan Kaum Salafi tidak pernah berbeda pendapat soal ketauhidan Tuhan, Muhammad sebagai Nabi Terakhir, rukun Iman dan Islam. Ketika Ahmadiyah datang dengan promosi Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, tidak ada satu

pun kelompok Islam yang memberi pembelaan teologis (kecuali kelompok liberalis Islam). Perbedaannya hanyalah pada soal sikap. NU dan Muhammadiyah bersifat akomodatif dengan mempertimbangkan hak kewarganegaraan pengikut Ahmadiyah. Sedangkan LPPI, FPI, HTI, dan Wahda Islamiyah memberikan sikap yang lebih tegas menolak. Bahkan FPI melakukan penyerangan dan penyegelan terhadap markas Ahmadiyah di Jalan Anuang Makassar pada tahun 2011 (sebagai aksi lanjutan terhadap penyerangan dan intimidasi terhadap kaum Ahmadiyah di beberapa tempat di Indonesia).

Pun perbedaan tentang pengucapan selamat Natal kepada umat Kristiani yang sudah mulai menjadi wacana tahunan sejak tahun 2006 terletak pada cara meletakkan ekspresi itu. Satu kelompok seperti FPI, Wahda Islamiyah, HTI, dan MUI meletakkannya sebagai bagian *inheren* dalam sistem teologi Islam. Mengucapkan selamat natal berarti “membenarkan” sistem teologi Kristen tentang Ketuhanan Yesus yang sudah difalsifikasi oleh Alquran ribuan tahun yang lalu. Mengucapkan natal bagi satu kelompok dihukumi haram karena bisa “merusak” akidah umat Islam. Satu kelompok lain seperti NU dan Muhammadiyah memandangnya sebagai penghargaan sosial. Penghargaan atas perbedaan. Bukan masuk pada sendi akidah.

Artinya perbedaan antara NU-Muhammadiyah sebagai representasi Islam mainstream di Indonesia dan kelompok yang disebut fundamentalis hanya terletak pada cara pandang tentang negara Islam, tradisi, afiliasi politik, tata cara ibadah, penggunaan simbol-simbol Islam dalam kehidupan sehari-hari, jihad, dan pandangan terhadap kelompok yang dianggap menyimpang. Topik perdebatannya berada pada ranah *ijtihadi* (pilihan) atau *furuiyah* (cabang), bukan *dharury* (mutlak) atau *ushuly* (ajaran dasar). Bahkan yang disebut oleh Fedrick M. Danny

sebagai poin yang sejalan dengan fundamentalisme Kristen “hanyalah yang menyangkut ketidaksalahan kitab Injil (tentu saja dalam Islam, al-Qur’an) pun tidak bisa dijadikan sebagai landasan. Keyakinan bahwa Alquran, kitab yang tidak memuat kesalahan apapun adalah keyakinan seluruh kelompok Islam, apapun jenisnya. Kelompok liberal sekalipun tidak pernah berkeyakinan bahwa Alquran memiliki kemungkinan untuk salah. Yang ada hanyalah pada cara mendekati Alquran dengan menggunakan cara *hermeneutik*. Hasil dari cara tafsir inilah yang kemudian menjadi perdebatan panjang. Penolakan terhadap tafsir *hermeneutik* inilah yang menjadi tolak ukur untuk menyebut satu kelompok fundamental atau tidak. Sekali lagi, ini pun sangat absurd.

Persoalan lain adalah bahwa posisi “memegang” teks primer Islam (Alquran dan Sunnah) secara kuat bisa dilakukan oleh setiap kelompok Islam dalam situasi dan posisi yang berbeda-beda. NU misalnya, sebagai kelompok Islam tradisional yang dikenal dengan ideologi keislaman yang lentur tiba-tiba menjadi sangat tekstualis ketika berkaitan dengan “*ru’yah hilal*”. NU berpegangan kuat terhadap *ru’yah hilal* dan menolak *hisab*, karena teks Alquran dan Hadits Nabi memang secara harfiah menyebutkan. Dalam konteks ini, NU bisa dibaca sangat skriptualis, tekstualis yang menjadi ciri khas kaum fundamentalis. Padahal, NU tentu saja tidak berciri itu. Karenanya istilah fundamentalis tidak tepat digunakan dan tidak komprehensif, apabila ingin membaca secara tegas perbedaan antara kelompok Islam yang ada di Indonesia saat ini.

Istilah fundamentalisme mulai dilekatkan dengan masyarakat Islam ketika ilmuwan Barat kesulitan untuk memberikan padanan kata untuk gerakan Salafiyah Jamaluddin Al-Afgani. Satu-satunya kata yang dekat adalah

fundamentalisme. Khususnya dalam hal gerakan kaum Salafis yang cenderung radikal. (Syarkoun dan Ghorara: 443). Media-media asing kemudian mempopulerkan istilah ini untuk menyebut semua gejala gerakan keagamaan yang radikal, sebagaimana yang disebutkan oleh Patrik J Ryan (1984):

> Mengklaim sebagian orang sebagai fundamentalis telah menjadi *stock-in-trade* dalam diskursus politik dan jurnalis pada tahun-tahun akhir ini. Seperti beberapa tahun lalu, tepatnya pada tahun 1980, surat kabar utama Amerika memuat iklan yang menyesalkan tentang meningkatnya fundamentalisme religius ke dalam bidang politis di dalam dan luar negeri. Para sekularis mengaku menandatangani iklan ini, dan menyebutkan contoh spesifik dari apa yang mereka maksud dengan fundamentalisme religius. Beberapa figur disebutkan seperti Rev Jerry Falwell, Ayatullah Rohullah Khomeini dan Paus John Paulus 2. Istilah fundamentalis telah digunakan pers dalam bulan-bulan terakhir ini, untuk kategorisasi revolusioner separatis Sikh di India.

Istilah lain yang sepadan dan relatif komprehensif adalah Islamisme. Istilah ini merujuk pada cara pandang yang meletakkan Islam sebagai ideologi yang tidak hanya harus diterapkan dalam wilayah politik, tapi juga pada segala dimensi kehidupan masyarakat modern (Oliver Roy, 2004: 58).

Dalam pandangan kelompok ini, Islam harus menentukan segala bidang kehidupan dalam masyarakat tersebut, dari cara pemerintahan, pendidikan, sistem hukum, hingga kebudayaan dan ekonomi. Negara atau sistem Islam menjadi hal yang sangat fundamental bagi kelompok Ini.

Istilah ini menjadi lebih relevan digunakan ketimbang istilah fundamentalisme atau radikalisme. Istilah ini pun lebih luas dan bisa digunakan untuk menyebut berbagai kelompok Islam yang berbeda tetapi dengan cita-cita yang relatif sama, yaitu penerapan sistem Islam dan menolak hal lain di luar Islam. Setiap kelompok Islamis hampir pasti dapat dihubungkan dengan fanatisme, eksklusifisme, intoleran, dan militanisme (Martin E Marty, 1992). Mereka juga memiliki kesamaan pada titik mempromosikan Islam sebagai simbol, sistem, dan semangat untuk membangun masyarakat Islam yang diinginkan tetapi berbeda pada gerakannya. Ini memungkinkan kita untuk menyatukan HTI, WI, Salafi, MMI, JI, dan bahkan ISIS dalam satu barisan (atau memiliki *genre*) yang sama meski kita sadar betul mereka memiliki akar, model gerakan, dan tujuan yang berbeda-beda. Bahkan dalam banyak hal, mereka saling mengkritik. Misalnya kelompok Salafi yang terafilisi dalam Yayasan Ma'had An-Nasyat Al- Islami (Manis) Baji Rupa, Makassar menganggap Wahda Islamiyah sebagai "bukan" salafi dengan alasan tertentu. Termasuk pernyataan pimpinan HTI Sulawesi Selatan yang menolak keras diassosiasikan dengan ISIS meski sama-sama memiliki agenda khilafah Islamiyah.

Kita juga tetap harus memberi tekanan yang tegas bahwa kelompok Islamis seperti HTI, Wahda Islamiyah, Salafi adalah kelompok yang tidak menggunakan kekerasan sebagai cara menyampaikan gagasan dan mencapai tujuan. Mereka bergerak dalam level akademik dengan organisasi yang rapi dan tertata. Mereka bisa dikategorikan sebagai *soft Islamisme*. Sedangkan kelompok MMI, JI, ISIS, dan FPI adalah kelompok Islamis yang menggunakan kekerasan sebagai cara untuk mencapai tujuan atau Islamis-radikal. Pembedaan ini

penting agar simplikasi istilah Islamisme tidak menyeret kita kepada ruang simplikasi mutlak.

Perspektif ini juga memberi ruang kepada kita untuk menarik garis tegas antara NU, Al-Khaerat, DDI, As'adiyah, dan Muhammadiyah di satu sisi dengan HTI, Salafi, dan WI (serta kelompok teroris) di sisi lain. Kelompok pertama lebih terbuka terhadap sistem yang diproduksi dari luar Islam seperti demokrasi dan pluralisme sedangkan kelompok kedua menutup diri dari sistem yang diproduksi oleh selain Islam. Kelompok pertama tidak terlalu mementingkan simbol Islam seperti formalisasi Syariat Islam, negara Islam, berjanggut, cadar, bercelana cingkrang, sedangkan kelompok kedua mementingkan hal tersebut.

B. Gejala Fudamentalisme dan Radikalisme sebagai Fenomena Semua (Pemeluk) Agama.

Di Indonesia, gerakan radikalisme terasa sangat identik dengan kaum muslim garis keras. Asumsi simplistis ini memang terjadi selain karena dalam beberapa kasus kekerasan atas nama agama seringkali melibatkan kelompok Islam sebagai aktornya, juga karena permainan idiom global yang secara semena-mena menempatkan Islam (termasuk pesantren) sebagai agama teroris atau agama yang menganut kekerasan.

Namun, fenomena radikalisasi agama (jika mengikuti kategori diatas) pun terjadi di agama Kristen dan Hindu. Kasus pembakaran rumah ibadah umat Islam di Tolikara (2015) dan demonstrasi dan protes terhadap renovasi rumah ibadah umat Islam di Manado (2016), serta geliat larangan menggunakan kata “Bali Bershalawat” karena Bali identik dengan Hindu adalah bagian dari potret radikalisme agama di Indonesia (2016).

Fenomena radikalisme disetiap agama ini tampaknya sangat terkait dengan identitas yang dilekatkan pada wilayah tertentu. Manado dan Papua adalah wilayah yang identik dengan agama Kristen, sedangkan Bali identik dengan Hindu. Afinitas agama dan geografis melahirkan watak dominasi. Para kelompok agama mayoritas ini merasa “memiliki” wilayah ini lebih dari kelompok agama lainnya “Jumlah yang banyak” itu menjadi alat legitimasi untuk mengatur pola kehidupan beragama umat lain.

Relasi mayoritas minoritas menjadi faktor yang determinan terhadap munculnya sikap “ingin menguasai”. Kasus rumah ibadah menjadi kasus yang menarik dalam konteks ini. Siapa yang mayoritas dia yang menentukan orang lain. Kasus Gereja Yasmin di Bogor dan beberapa rumah ibadah umat Kristen yang sulit untuk berdiri karena mendapatkan perlawanan dari pihak muslim. Pun masjid di Papua Barat sulit untuk berdiri karena mendapatkan perlawanan dari pihak Kristen.

Bahkan Manado, wilayah yang selama ini dianggap sangat toleran dan rukun pun mengalami sindrom mayoritas. Masjid Al-Khairiyah yang akan direnovasi mendapatkan “penolakan” dari kelompok masyarakat Manado yang menamakan diri sebagai aliansi Makapetor. Antara tahun 2013 hingga tahun 2016 tercatat telah terjadi 4 kali demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat yang mengatasnamakan dirinya Masyarakat Adat Kawanua Pencinta Toleransi (MAKAPETOR) terhadap pembangunan Mesjid Al-Khairiyah.

Gerakan formalisme agama juga sempat mengemuka di Manokwari. Kota ini diproklamirkan sebagai kota Injili. Ini berarti bahwa Manokwari diidentikkan dengan agama Kristen. Implikasi yang terasa adalah “penolakan” warga terhadap pembangunan masjid raya di Kota Manokwari.

Kehadiran "masjid raya" dianggap tidak relevan dengan simbol Manokwari Kota Injil.

Kasus Tolikara merupakan kasus radikalisme agama yang dilakukan oleh umat Kristiani yang paling menyedot perhatian. Kasus yang terjadi pada Juli 2014 menjadi perbincangan semua kalangan muslim. Kasus ini dianggap mengejutkan dan sekaligus menjadi pembenaran bahwa tindakan radikal dan kekerasan sangat mungkin dilakukan oleh kelompok manapun.

Berbagai kasus diatas menunjukkan bahwa fenomena kekerasan berbasis agama bukanlah spesifik ke agama tertentu. Potensi radikalisme agama adalah fenomena umum sebagai refleksi dari "fanatisme" keberagamaan yang diselimuti perasaaan sebagai "pemilik tanah". Sinrom mayoritas menyebabkan agama dengan mudah mengalami transformasi dari kedamaian menjadi kekerasan beragama. Mengalamatkan radikalisme agama hanya kepada agama Islam saja tentu tidak adil, tetapi dalam konteks Indonesia, gerakan kekerasan atas nama agama lebih massif dilakukan oleh umat beragama Islam, apalagi dengan terbentuknya organisasi yang menggunakan nama Islam.

Fenomena gerakan fundamentalisme Kristen muncul pada abad 19 M di Amerika Serikat. Munculnya kaum fundamentalis (yang biasa juga diassosiasikan dengan evangelis radikal) tidak terlepas dari instabilitas politik yang tengah melanda Amerika. Pertentangan kelas dan kekacauan sosial (*social rush*) terjadi dimana-mana. Sementara perilaku sosial kalangan elit di Amerika cenderung semakin sekuler. Bagi sebagian orang Kristen fenomena seperti itu jelas sangat bertentangan dengan ajaran Kitab Suci. Di sekitar tahun 1830-an dan 1840-an, kaum fundamentalis Kristen Amerika menggelar Konferensi Niagara, mengusung beberapa pandangan konservatif.

Puncak perkembangan gerakan Fundamentalist Kristen terjadi pasca Perang Dunia I, terutama pada tahun 1920. Saat itu, media massa mengekspos gerakan ini. Para penganutnya begitu bersemangat membasmi pengaruh modernisme termasuk teori Darwin dan Teologi Liberal dari kehidupan gereja dan masyarakat karena mereka juga didorong oleh pemahaman eskatologis dan minelaris: Perang dunia I (1914-1918) dilihat sebagai isyarat atau penanda, bahwa akhir zaman dan Kerajaan Seribu Tahun segera akan tiba. Salah satu langkah strategis untuk memenangkan ’perang rohani’ ini adalah memperkuat posisi dan peranan di bidang politik (dan hukum), agar segala keputusan politis dan produk perundang-undangan mendukung tujuan gerakan ini. Dalam waktu singkat sejumlah gereja utama mendapat pengaruh dari gerakan fundamentalisme ini (Jan. S. Aritonang, 2000: 237).

Namun pada tahun tahun 1930-an, gerakan ini menga- lami kemerosotan yang cukup drastis. Setidaknya ada dua kasus yang menjadi penyebabnya, yaitu kasus Fosdick dan kasus Scopes. Kasus Fosdick diawali dari perang polemik antara Harry Emerson Fosdick dari Gereja Baptis dan J.G. Machen dari kelompok fundamentalis tentang toleransi, dan kebebasan berekspresi. Meski pada awalnya mendukung.

Machen, namun pada akhirnya lebih dari 1200 pengerja Gereja Presbyterian menandatangani pernyataan menentang fundamentalisme. Pada tahun 1925, Sidang Raya Gereja Presbyterian mengeluarkan pernyataan resmi menolak fundamentalisme. Menyusul penolakan tersebut, Machen dan rekan-rekannya mengundurkan diri dari seminari Princetone dan membentuk kelompok seminari sendiri.

Kasus Scope merupakan kasus dimana seorang guru sekolah John. T. Scopes diadukan ke pengadilan atas

tuduhan mengajarkan Teori Darwin. Sebelumnya (tahun 1923) kaum Fundamentalisme berhasil memperjuangkan diterbitkannya undang-undang yang melarang pengajaran teori Evolusi Darwin di sekolah. Namun ketika pengacara Scopes mengajukan sejumlah pertanyaan yang tajam terhadap keabsahan tuduhan ataupun kebenaran pandangannya. Kaum fundamentalisme ternyata tidak mampu mempertahankan diri, argumentasinya dangkal, anti-intelektual dan terkesan kampungan. Keadaan semakin buruk ketika ternyata pers lebih memihak kepada Scopes dan menjadi pengadilan ekstra bagi kaum fundamentalisme. Sejak saat itu, pergerakan kaum fundamentalis Kristen meredup, dan lambat laun hilang.

Pada tahun 1950-an sampai 1960-an kecenderungan paham fundamentalisme berkembang kembali di kalangan Kristen Protestan, terutama di kalangan gereja Evangelis (Injili) yang dianggap sebagai pewaris semangat fundamentalisme, berbarengan dengan menguatnya komunisme. Isu bahaya komunisme dijadikan alat kampanye mencari dukungan publik Amerika. Evangelis Amerika yang termasyur, Billy Graham mendapat banyak simpati dari orang-orang yang benci komunis.

Pasca runtuhnya komunisme di Amerika, gerakan fundamentalisme Kristen mengarahkan sasarannya ke komunitas Islam di Amerika. Gerakan Islam yang mulai berkembang di Amerika, ditambah dengan semakin menguatnya perlawanan terhadap Amerika oleh negara-negara Timur Tengah seperti Iran dan Irak, sejak tahun 1970-an hingga mencapai puncaknya pasca peristiwa runtuhnya gedung WTC pada tanggal 9 September 2001. Semangat anti Islam merebak di mana-mana dalam berbagai bentuk.

Fundamentalisme Hindu lahir di Kashmir dan India. Kelompok fundamental seringkali melakukan tindakan-

tindakan destruktif kepada agama lain atas nama kepentingan agama mereka. Pun, kasus pengusiran etnis Rohingya di Myanmar menjadi refleksi dari tindakan radikal berbasis agama yang dilakukan oleh umat Buddha.

Dalam konteks gerakan, Syafiq Hasyim (2016) (Laman Bimas Islam, Penanggulangan Radikalisme dan Ekstrimisme Berbasis Agama) menyebutkan ada 20 indikator, yaitu:

1. Gerakan ini memiliki kecenderungan untuk menempatkan diri mereka di luar arus utama atau menolak tatanan dunia, politik, dan social.
2. Berusaha menggulingkan tatanan politik dalam rangka membangun kembali apa yang mereka pertimbangka sebagai tatanan alamiyah di dalam masyarakat-apakah ini berbasis pada ras, kelas, keyakinan, atau superioritas etnik.
3. Memiliki program ideologi dan perencanaan aksi yang ditujukan untuk meraih kekuasaan politik atau komunal.
4. Menolak atau mengacaukan konsepsi tatanan hukum masyarakat demokratis, menggunakan ruang politik yang disediakan oleh sistem demokratis untuk memajukan tujuan mereka dalam mengambil kekuasaan politik.
5. Menolak deklarasi internasional hak asasi manusia dan menunjukkan ketidakempatian mereka serta tidak mengakui hak orang lain.
6. Menolak prinsip-prinsip demokrasi yang didasarkan pada kedaulatan rakyat.
7. Menolak kesetaraan secara umum terutama untuk kaum perempuan dan minoritas.
8. Menolak diversitas dan pluralism, bahkan mengajukan sistem budaya yang monolitik (*mono cultur society*).

9. Menggunakan filsafat segala cara dalam mencapai tujuan dan kepentingan mereka.
10. Secara aktif mendorong dan mengutamakan penggunaan kekerasan untuk memerangi apa yang mereka pandang sebagai kejahatan dan meraih tujuan politik mereka.
11. Menunjukkan kecenderungan untuk terlibat dalam kekerasan massa terhadap musuh-musuh mereka ketika dalam kekuasaan.
12. Mereka biasanya menggunakan satu sudut pandang, hitam atau putih, ingin memurnikan dunia, mengumbar kebencian kepada musuh-musuh mereka.
13. Mengenyampingkan kebebasan individu untuk kepentingan kolektif.
14. Menolak kompromi dan ingin mengeliminasi musuh mereka.
15. Menunjukkan intoleransi untuk seluruh pandangan di luar pandangan mereka dan menampakkan penolakan mereka dengan cara kemarahan, agresif, kebencian baik dalam perilaku maupun ucapan.
16. Menampilkan fanatisme dan memposisikan diri sebagai pihak yang terancam serta menggunakan teori konspirasi tanpa mengaku bahwa tindakan mereka irasional.
17. Menampilkan sikap dictator, otoriter dan totaliter
18. Tidak mau dikritik dan mengintimidasi dan mengancam mereka yang berbeda, mereka yang heretic dan mereka yang kritik dengan kematian
19. Mereka meminta agar tuntutan mereka dipatuhi
20. Mereka memiliki ide yang tidak bisa diubah dan tertutup atas kebenaran yang mereka yakini, bahkan mereka bersedia mati.

Ekstrimisme berbasis identitas adalah fenomena global yang sudah terjadi sepanjang sejarah kemanusiaan. Gejala ekstrimisme atau terorisme adalah gejala sosial yang sudah terjadi selama berabad-abad lamanya. Dalam komunitas Yahudi dikenal kelompok Zealot yang melakukan gerakan *sicarii* untuk meneror kaum Romawi. Di Katolik dikenal gerakan Opus Dei yang melakukan gerakan terror. Novel Dan Brown, *davinci code* dan *inferno* berhasil memberi gambaran tentang gerakan-gerakan radikal di tubuh gereja Katolik.

Tentu saja, gejala fundamentalisme dan radikalisme di semua agama adalah bagian yang tidak *inheren* dengan agama itu sendiri. Pola penindasan berbasis agama sangat dipengaruhi oleh relasi politik dan relasi ekonomi. Kasus Kashmir adalah pergolakan politik panjang antara umat Hindu dan Islam yang sudah terjadi puluhan tahun. Pun kasus Rohingya tidaklah murni berbasis agama tetapi lebih tepatnya pengaturan internal Negara Myanmar terhadap kaum pendatang yang "kebetulan" beragama Islam.

Lester Kurtz (2007: 168) mengajukan empat tesis munculnya respon terhadap perubahan sosial. *pertama,* gerakan modernisme agama. *Kedua*, gerakan anti-modernist (tradisionalis). *Ketiga,* teologi pembebasan. *Keempat,* munculnya agama-agama sipil (agama baru) dan spritual individualis terbatas (kelompok sufi).

Sedangkan Petr L. Berger (1994) menyatakan, modernitas melahirkan *powerfull movements of counter-secularization.* Counter sekularisasi dilakukan dengan dua jalur, *pertama,* revolusi agama. Seperti yang dilakukan oleh revolusi Iran. *Kedua,* menciptakan subkultur agama, seperti komunitas amish di Peninsylavina, Amerika Serikat.

Dalam perspektif Kurtz, gerakan kaum fundamentalist muncul sebagai respon terhadap gejala modernitas yang

dianggap berseberangan dengan "spirit suci" keagamaan. Modernitas menggerus nilai-nilai adiluhung dalam agama karenanya mereka melakukan gerakan perlawanan untuk mengembalikan spirit agama kepada bentuk semula atau kedalam bentuk dasar sebisa mungkin. Modernitas juga dianggap sebagai biang dari munculnya segala macam problematika sosial ekonomi, yang harus diselesaikan dengan cara perlawanan yang kuat terhadap hal itu.

BAB II

MEMAHAMI KONTEKS KEMUNCULAN KELOMPOK ISLAMIS DI INDONESIA

Pendekatan ekonomi Nazih Ayyub ini tidak cukup untuk menjelaskan fenomena Islamisme. Islamis yang lahir karena ketidakpuasan ekonomi barangkali berlaku untuk para aktivis Islamis yang berlatarbelakang ekonomi lemah.

Kekerasan berbasis keagamaan adalah persoalan sosial yang tidak dapat diuraikan secara sederhana. Ada banyak faktor yang menyebabkan gerakan ini muncul ke permukaan. Faktor ekonomi, politik, globalisasi, modernisme, merupakan beberapa faktor yang menjadi penyebab munculnya gerakan Islamis-radikal.

Oleh karena itu, untuk mendekati fenomena ini tidak cukup dengan hanya menggunakan satu pendekatan saja. Nazih Ayyub misalnya, mencoba mendekati fenomena munculnya kelompok fundamentalis Islam dengan perspektif ekonomi. Menurutnya: ”Kaum Islamis itu tidaklah marah karena pesawat udara telah menggantikan unta; mereka justeru marah karena tidak bisa naik pesawat tersebut. (Syarkun dan Ghorara, 2003: 495). Pendekatan ekonomi Nazih Ayyub ini tidak cukup untuk menjelaskan fenomena Islamisme. Islamis yang lahir karena ketidakpuasan ekonomi barangkali berlaku untuk para aktivis Islamis yang berlatarbelakang ekonomi lemah. Namun kenyataan menunjukkan bahwa banyak di antara aktivis Islamis ini berasal dari kelas menengah dan memiliki pendidikan yang tinggi misalnya Dr. Azahari yang

merupakan dosen ilmu Kimia di salah satu universitas di Malaysia.

Pendekatan lain yang biasa digunakan untuk memotret fenomena ini adalah teori krisis psikologi atau alienasi psikososial yang diakibatkan oleh modernisasi. Penelitian Hoffman (Syarkun dan Ghorara, 2003: 460) menunjukkan bahwa kebanyakan aktivis Islamis berasal dari desa dan keluarga yang taat beragama. Kehidupan kota yang individualistis dan kompetitif serta identitas kewargaan yang heterogen menyebabkan orang-orang ini kemudian mengalami krisis psikologi berupa keterasingan dengan lingkungan sekitarnya. Gerakan Islamisme sebagai sebuah gerakan membangun kebersamaan menawarkan obat untuk krisis psikologi dan yang tak kalah pentingnya adalah menawarkan identitas yang kuat sebagai muslim sejati. Teori ini relevan dengan fenomena munculnya organisasi Islamis dari kampus-kampus umum seperti Unhas (Universitas Hasanuddin) Makassar dan UNM (Universitas Negeri Makassar), sedangkan kelompok Islam moderat justeru berasal dari IAIN (Institute Agama Islam Negeri) yang kini berubah menjadi UIN (Universitas Islam Negeri).

Pendekatan politik juga merupakan pendekatan yang tepat untuk digunakan untuk melihat fenomena fundamentalisme. Bassam Tibi (1998: X) menganggap bahwa gerakan fundamentalisme mempunyai agenda politisasi agama yang agresif dan dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Lahirnya ISIS misalnya adalah respon dari Abu Bakar Al-Baghdady (pimpinan ISIS) terhadap situasi politik di Timur Tengah (khususnya di Irak) yang berkecamuk dan semakin buruk. Tujuan ISIS pun sangat politis; mendirikan negara Khilafah Islam. Azyumardi Azra (2014) menyebutkan bahwa ISIS lahir dari instabilitas politik dunia Arab atau Timur Tengah.

Dunia Arab merupakan salah satu wilayah paling tidak stabil sejak usai perang dunia II. Faktor utamanya adalah konflik Palestina-Israel dan kontestasi politik antara negara Arab sendiri. Puncaknya adalah ketika Amerika dan sekutunya menyerbu Iraq untuk menjatuhkan Saddam Husein pada Maret 2003. Sejak saat itu, Iraq berubah dari salah satu negara terkuat di Timur Tengah menjadi wilayah yang paling tidak stabil yang membara dengan munculnya konflik sektarianisme religio-politik.

Fenomena gerakan Islamisme di Indonesia juga tidak terlepas dari situasi politik domestik. Pertautan antara politik dan kelompok Islamis begitu kental sejak lama. Perbedaan tafsir tentang Pancasila terutama tujuh kalimat yang dihapus dalam piagam Jakarta sampai hari ini masih terus diperdebatkan. Perdebatan tentang perlunya negara Islam berbarengan dengan situasi politik yang tidak stabil pada tahun 1949 pasca kedatangan kembali Belanda dan sekutunya membuat S.M Kartoswiryo membentuk gerakan perlawanan yang dikenal dengan sebutan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia). Gerakan ini kemudian disambut oleh Daud Beureuh di Aceh dan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan. Gerakan ini merupakan gerakan politik kaum Islamis yang sangat melegenda dalam sejarah umat Islam di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan.

Kehadiran kelompok Islamis kontemporer di Indonesia bersamaan dengan situasi transisi politik yang tidak berjalan dengan baik pasca reformasi, tentu saja cikal bakalnya sudah terbentuk di awal 90an ketika kekuasaan Orde Baru masih kuat. Reformasi tidak hanya membawa perubahan sistem politik nasional tetapi juga membawa ‘ruang’ kebebasan penuh terhadap kepentingan apa-pun. Dalam konteks agama, situasi reformasi membuka pintu bagi masuknya ideologi “baru” seperti ideologi Islamisme

(baik yang *soft* Islamisme maupun yang radikal) dan juga liberalisme.

Ketidakadilan ekonomi dan moralitas publik yang mengalami degradasi menjadi alasan kehadiran mereka. Kelompok Islamis ini mengkhawatirkan situasi Indonesia yang semakin runyam dan akan membawa masyarakat Islam menjadi sangat terpuruk. Model politik dan ekonomi orde baru yang melahirkan budaya korupsi serta membiarkan negara asing (khususnya Amerika) menguasai sumber daya alam dianggap sebagai biang keladi dari terpuruknya umat Islam di Indonesia. Mereka pun kemudian mempromosikan Islam sebagai solusi. Promosi Islam sekaligus menjadi kritik terhadap model pengelolaan agama di Indonesia yang berada di belakang negara. Model ini tidak tepat dalam pikiran mereka. Islam harus tampil utuh baik sebagai nilai maupun sebagai label.

Kehadiran kelompok Islam liberal dengan wacana kemerdekaan individu semakin menguatkan kehadiran kaum Islamis di Indonesia. Kelompok liberal yang mengkampanyekan isu-isu kebebasan oleh kelompok Islamis dianggap sebagai bentuk penyerangan terhadap moralitas Islam yang luhur. Misalnya, gugatan empat orang mahasiswa Fakultas Hukum UI tentang UU Pernikahan ke MK. Gugatan ini mendapatkan sambutan positif dari kelompok yang selama ini dikenal sebagai pengusung liberalisme dalam Islam dan para penggiat HAM. Isu ini disambut negatif oleh HTI. Di salah satu buletin dakwah “Al-Islam” yang diedarkan secara rutin setiap Hari Jumat di Masjid Raya Darussalam Kota Palu, HTI menerbitkan tulisan yang berjudul *Nikah Beda Agama; Menyerang Islam, Membuka Pintu Pemurtadan* yang bertujuan untuk melawan wacana nikah beda agama tersebut. Berikut petikan tulisan itu:

Semua itu (*dukungan nikah beda agama, pen*) menjadi isyarat yang jelas bahwa orang-orang sekuler dan liberal terus menyasar Islam dan syariahnya. Tentu kita masih ingat kasus *counter legal draft* Kompilasi Hukum Islam, yang salah satunya adalah tuntutan pelegalan nikah beda agama ini. Apa yang terjadi ini makin menegaskan bahwa sekulerisme dan HAM adalah alat untuk menyerang Islam.

Jika pernikahan beda agama ini dilegalkan MK, maka dengan alasan HAM dan sebagainya akan banyak lagi pihak yang menuntut agar ragam pernikahan yang dilarang Islam itu dilegalkan. Pernikahan sedarah, pernikahan sejenis dan praktik perzinahan lain akan minta dilegalkan.

Jika nikah beda agama itu disahkan maka akibatnya: *pertama,* pengesahan ini akan menjadi pintu untuk meruntuhkan banyak ketentuan Islam, terutama yang berkaitan dengan akibat dari pernikahan seperti hukum waris, perwalian, nafkah, hubungan pria-wanita di dalam pernikahan dan sebagainya. *Kedua,* pengesahan ini juga akan membuka pintu lebar dan legal bagi upaya pemurtadan. Selama ini, meski nikah beda agama tidak dilegalkan, motif cinta dan pernikahan seperti itu banyak digunakan untuk pemurtadan. Apalagi nanti jika dilegalkan, upaya pemurtadan itu justeru akan semakin gencar dan meluas karena telah dilegalkan oleh negara. Tentu semua ini amat berbahaya bagi umat. (Al-Islam edisi 721, 12 September 2014)

Sekulerisasi baik dalam bentuk kemunduran beragama maupun dalam bentuk privatisasi (Jose Cassanova, 2004) memang melahirkan gerakan deprivatisasi agama sejak awal tahun 1990-an di banyak negara termasuk negara muslim (Benyamin Flaming Intan, 2006: 14). Dalam konteks Indonesia, melahirkan kaum Islamis. Liberalisme dan sekulerisme dalam pandangan kaum Islamis adalah biang keladi merosotnya moralitas

umat Islam di Indonesia sekaligus menggerogoti fondasi ajaran Islam. Kaum liberal dianggap mengacaukan differensiasi halal-haram misalnya soal kebolehan nikah beda agama yang sedang berlangsung kasusnya di MK (Mahkamah Konstitusi). Kaum liberalis juga dianggap menjadi aktor kuat dari gerakan yang memisahkan agama dan negara dalam tarikan garis demarkasi yang tegas. Tak mengherankan apabila Ulil Absar Abdallah yang menjadi ikon Islam liberal di Indonesia pernah mendapatkan ancaman mati dan sempat mendapatkan kiriman bom buku dari kelompok Islamis. Artikel Ulil Absar Abdallah yang berjudul "Menyegarkan Kembali Ajaran Islam", *counter legal drafting* Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Lintas Agama yang membolehkan nikah agama serta sikap pembelaan terhadap Ahmadiyah membuat geram kelompok Islamis. Puncaknya adalah ketika kelompok Islamis menyerang sekelompok aktivis (sebagian berasal dari kelompok Islam liberal) yang sedang berdemonstrasi di lapangan Pancasila. Reaksi HTI dengan menurunkan artikel yang mengkritik sikap mahasiswa UI yang mendapatkan sokongan dari kelompok Islam liberal dan penggiat HAM di Indonesia (pada bagian awal tulisan itu mengutip pembelaan Andreas Harsono dan Zuhairi Misrawi yang dianggap sebagai aktivis HAM dan Islam liberal nan sekuler) adalah bagian rivalitas yang tampaknya akan terus menerus terjadi.

Persoalannya kemudian adalah kedua rival ini mempertarungkan teks Alquran dengan memilih dan memilah ayat yang sesuai dengan cara berfikirnya. Teks Alquran lalu kemudian dipegangi secara berbeda oleh dua kutub. Kelompok berhaluan Islamis sering kali mereduksi ayat-ayat Alquran yang bernuansa jihad untuk melegitimasi perilaku mereka tetapi abai terhadap teks Alquran yang menghendaki perdamaian di sisi lain kelompok liberalis

memilah-milih ayat Alquran yang mendukung misalnya soal pluralisme dan mengabaikan ayat-ayat yang (secara teks) bertolak dengan semangat pluralisme. Perang teks ini – pada gilirannya – meletakkan ayat Alquran sebagai alat legitimasi ketimbang sebagai instrumen solusi. Alquran mengalami proses derivasi makna yang mengarah kepada pengukuhan kelompok.

Selain kelompok liberalis, kaum Islamis semakin kuat eksistensinya dengan kehadiran kelompok Islam yang "dianggap" sempalan dan sesat. Pendekatan kaum Islamis terhadap kelompok ini sangat tegas. Tidak ada tempat bagi 'orang sesat' di Indonesia. Dalam kasus ini, kelompok Islamis mendapatkan sokongan dari MUI. Munculnya fatwa MUI tentang Ahmadiyah dan haram terhadap pluralisme tahun 2006 menjadi 'jalan' bagi kaum Islamis untuk melakukan intimidasi terhadap Ahmadiyah, termasuk di Makassar dan Bulukumba (Sulawesi Selatan). Dengan mereproduksi semangat "pemurnian akidah", mereka melakukan perlawanan terbuka kepada kelompok Syiah dimanapun orang Syiah melakukan kegiatan.

Kelompok sesat dalam paradigma kelompok Islamis adalah kelompok *inhiraf,* kelompok yang melakukan penyimpangan teologis. Mereka tidak boleh dibiarkan berkembang kecuali mereka menyadari penyimpangannya dan kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu, kehadiran kelompok sesat ini menjadi "pembenaran" atas tindakan kekerasan yang dilakukan, baik secara simbolik maupun fisik karena dianggap sebagai "pembelaan" terhadap akidah yang benar.

BAB III

MENGENALI AGENDA KAUM ISLAMIS INDONESIA

Kaum Islamis politis dan kultural akan menghindari menggunakan cara kekerasan sebagai alat perjuangan. Sebaliknya kelompok Islamis radikal, lebih mengedepankan cara kekerasan sebagai alat perjuangan.

Kelompok Islamis meski memiliki ideologi keagamaan dan tampilan fisik yang relatif mirip tetapi memiliki agenda yang berbeda-beda. Mereka pun sulit dianggap sebagai kelompok yang sama. Karenanya – untuk memudahkan pengamatan dan pemahaman – kelompok Islamis bisa dibagi setidaknya dalam tiga kategori, Islamis – politis, Islamis-kultural, dan Islamis – radikal. Perbedaan yang paling mencolok adalah gerakannya. Kaum Islamis politis dan kultural akan menghindari menggunakan cara kekerasan sebagai alat perjuangan. Sebaliknya kelompok Islamis radikal, lebih mengedepankan cara kekerasan sebagai alat perjuangan.

Shireen T. Hunter (dalam Syarkun dan Ghorara, 2004: 492-493) mengemukakan enam ciri khas ideologi kaum Islamis, yaitu: 1) konsep *din wa daulah*. Integrasi agama dan negara. Ini merupakan ciri khas Islamis-politis di Indonesia; 2) kembali kepada Alquran dan Sunnah, dengan optik skriptualis dan totalistik. Ini kemudian yang membedakan kaum Islamis dan kelompok Islam nusantara, dimana kelompok kedua menerjemahkan 'kembali ke teks primer' dengan perspektif yang lentur; 3) puritanisme dan keadilan sosial; 4) berpegang teguh kepada kedaulatan syariat Islam. Islam harus menjadi basis konstitusi dalam bernegara; 5) menempatkan jihad sebagai instrumen gerakan. Jihad yang dipahami dalam konteks pertarungan dan perang

terbuka. Bom bunuh diri, melakukan tindakan kekerasan adalah ekspresi mereka tentang jihad; 6) perlawanan terhadap Barat. Pengertian Barat biasanya lebih dekat kepada Amerika dan kelompok sekutunya di daratan Eropa.

Upaya rekonstruksi ideologi yang disederhanakan oleh Shiren T Hunter dalam enam basis ideologis juga ternyata sulit untuk dijelaskan secara komprehensif, khususnya di Indonesia. Doktrin ‘kembali ke Alquran dan Sunnah’ yang selama ini diletakkan kepada kelompok tertentu saja sebenarnya sangat politis, mengingat seluruh aliran dalam Islam meletakkan Alquran dan Sunnah sebagai landasan utama atau sumber utama pengambilan keputusan. Memang, doktrin kembali ke Alquran dan Sunnah sangat populer di kalangan kaum puritanis Islam era Wahabian sebagai refleksi dari keinginan untuk memurnikan ajaran Islam dari bentuk-bentuk tradisional yang disebut khurafat. Jargon ini digunakan oleh Muhammad Abdul Wahab bekerja sama dengan Ibnu Saud untuk menghancurkan artefak sejarah yang dianggap sebagai sumber penyimpangan dalam ajaran Islam. Di Indonesia, Muhammadiyah dengan semangat modernisme menggunakan jargon ini untuk mengkritik beberapa model keberagamaan yang berkembang dalam masyarakat Islam yang sarat dengan nuansa tradisional.

Dalam kamus sosiologi Islam Indonesia, kita mengenal term TBC (*Tahayul, Bid’ah* dan *Churafat*). Istilah ini dimunculkan oleh Muhammadiyah untuk mendefenisikan tradisi keislaman masyarakat nusantara yang bercampur-baur dengan kebudayaan lokal. Akan tetapi, kelompok Islam tradisional pun memiliki semangat yang sama dengan optik yang berbeda. Misalnya dalam kasus ru’yah hilal tadi. NU mengajak umat untuk sedekat mungkin dengan teks primer, dengan mendahulukan metode “melihat” ketimbang “menghitung”. Dalam konteks hilal

menjelang Ramadhan dan Lebaran, “melihat” merupakan perintah teks primer, sedangkan “menghitung” adalah kreatifitas umat. NU dalam konteks ini sedang mengajak untuk kembali ke Alquran dan hadits, sedekat mungkin. Muhammadiyah yang lebih dekat dengan jargon “kembali ke Alquran dan hadits” dalam pengertian puritan justeru mengabaikan teks “melihat” dan lebih memilih menggunakan cara “menghitung” yang didalamnya sudah mengandung teks “melihat” itu. Artinya, jika dilepaskan dari makna politisnya, jargon kembali ke Alquran dan Hadits adalah jargon seluruh kelompok Islam, tentu dengan cara kembali yang berbeda-beda.

Atau ideologi jihad. Jihad sebenarnya adalah bagian yang penting dalam ajaran Islam. Jihad adalah ruh gerakan yang membuat seorang muslim tidak takut apapun dalam melakukan perjuangan. Janji surga, kemuliaan sebagai manusia, dan pahala yang berlipat ganda menyebabkan jihad menjadi elemen penggerak yang sangat penting. Jihad dikenal di semua kelompok Islam dengan pengertian yang berbeda-beda. Kelompok Islam moderat seperti Nu – Muhammadiyah lebih memaknai jihad sebagai upaya yang sungguh-sungguh untuk meraih tujuan yang mulia. Jadi, meletakkan jihad sebagai latar ideologi radikal sebenarnya adalah sebuah kekeliruan. Ini berarti para peneliti Barat menggiring pemahaman yang sempit tentang jihad, terutama yang bersumber dari kelompok Islamis-radikal semata. Dan itu sama sekali buruk!

A. Islamis Politis

Agenda utama kelompok Islamis-politis di Indonesia adalah penegakan atau formalisasi Syariat Islam pada konstitusi daerah. Pada awal tahun 2000an, kita masih mengingat munculnya kelompok yang melakukan gerakan

politik yang cukup massif di Sulawesi Selatan yang mendesak formalisasi Syariat Islam. Kelompok ini dikenal dengan nama KPPSI (Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam) yang kemudian berubah menjadi KPSI (Komite Penegakan Syariat Islam).

Momentum gerakan ini beriringan dengan model negara Indonesia yang berbentuk otonomi daerah yang memungkinkan setiap daerah membentuk karakter dan ciri khas yang berbeda-beda. Nangroe Aceh Darussalam menjadi patron "negara Islam" yang paling sering dijadikan contoh.

KPSI pada awalnya relatif sukses. Mereka berhasil menginisiasi dan menginspirasi beberapa kepala daerah untuk menerbitkan perda yang bernuansa syariat Islam seperti perda baca tulis Alquran, perda Miras, perda Zakat dan sebagainya. Isu ini bahkan oleh sebagian calon kepala daerah dimanfaatkan sebagai bagian dari kampanye. Bupati Bulukumba (Patabai Pabokori) dan Pangkep (Alm. Syafruddin) berhasil mengelola isu Syariat Islam menjadi kekuatan politik mereka. Bulukumba bahkan "berhasil" membangun desa-desa percontohan Syariat Islam. Bulukumba pun pernah menjadi tuan rumah Kongres Umat Islam pada tahun 2004.

Ada delapan poin yang menjadi *crash program* dari perda Syariat Islam di Bulukumba. *Pertama,* pembinaan dan pengembangan Pemuda Remaja Masjid. *Kedua*, pembinaan dan pengembangan TKA/TPA. *Ketiga*, pembinaan dan pengembangan majelis taklim. *Keempat,* pembinaan dan pengembangan Hifdzil Qur'an. *Kelima,* pembinaan dan pengembangan perpustakaan masjid. *Keenam,* pembinaan dan pengembangan seni bernuansa Islami. *Ketujuh,* pemberdayaan zakat, infaq, dan sedekah. *Kedelapan,* pelestarian keluarga sakinah, bahagia, dan sejahtera (Abd. Kadir Ahmad, 2009: 65).

Kedelapan *crash* program ini kemudian diberi payung hukum melalui proses legilasi bersama dengan DPRD Kab. Bulukumba. Peraturan daerah ini kemudian dikenal sebagai perda Syariat Islam yang menyebabkan nama Bupati Patabai Pabokori menjadi populer sebagai bupati yang menginisiasi dan melegislasi perda syariat Islam.

Tidak hanya pada level kabupaten, Bupati Patabai juga memilih dan menetapkan dua belas desa dari sepuluh kecamatan sebagai proyek percontohan. Desa-desa tersebut adalah Desa Padang dan Desa Barombong (Kecamatan Gantarang), Kelurahan Bintarore dan Kelurahan Ela-Ela (Kecamatan Ujung Bulu), Desa Lembanna (Kecamatan Kajang), Desa Singa (Kecamatan Herlang), Desa Ballasaraja (Kecamatan Bulukumpa), Desa Balong (Kecamatan Ujung Loe), Desa Palampang (Kecamatan Rilau Ale), Desa Tritiro (Kecamatan Bonto Tiro), Desa Garuntungan (Kecamatan Kindang), Desa Darubiah (Kecamatan Bonto Bahari) (Abd. Kadir Ahmad, 2009: 92-93).

Kedua belas desa ini menjadi wilayah percontohan dari delapan *crash program* diatas. Desa-desa ini kemudian dikenal sebagai "desa muslim" dengan indikator, sebagai berikut:

1. Bersih dari minuman beralkohol
2. Tersedianya perpustakaan masjid dan Alquran di rumah- rumah
3. Adanya majelis taklim di masjid-masjid
4. Berbusana muslim
5. Patuh zakat
6. Penyuluhan agama terprogram
7. Memakmurkan masjid
8. Tertib buku nikah
9. Santuni anak yatim
10. Jumat bersih

Pelaksanaan indikator yang dituangkan dalam peraturan desa pada awal pelaksanannya berjalan cukup ketat. Untuk memperlancar pelaksanaan perda dan perdes ini, dibentuk tim pengawas yang dikenal dengan sebutan BUSERDA, *Buru Sergap Daerah.* Tim ini bertugas sebagai "polisi syariah" yang bertugas untuk mengawasi jalannya perda syariat Islam yang dicanangkan oleh Bupati.

Proses ini pun terjadi dalam sistem pelayanan publik di tingkat desa. Di Desa Padang misalnya pihak pemerintah desa tidak akan memberikan pelayanan kepada warga (khususnya perempuan) yang tidak menggunakan busana muslimah. Di pintu masuk rumah kepala desa (sekaligus kantor desa), tertulis dengan jelas, *Tidak menerima wanita yang tidak berbusana muslim, kecuali non-muslim.*

Setiap desa diberikan keleluasan untuk membuat program untuk mendukung pelaksanaan Perda atau Perdes bernuansa syariat Islam. Di Desa Padang misalnya dibuat beberapa langkah strategis, yaitu:

1) Membentuk satgas desa muslim yang bertujuan untuk menjaga dan mengantisipasi lebih awal berbagai pelanggaran, baik menyangkut masalah hukum syariat maupun masalah hukum Negara.
2) Membentuk dewan syariah untuk memberikan dan memutuskan perkara dalam setiap pelanggaran hukum syariah dan hukum Negara untuk dilanjutkan ke tingkat atas yang berwenang
3) Membentuk tim dakwah yang bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi Islam dan pesantren yang ada di Bulukumba
4) Mebentuk majelis taklim di setiap masjid dan mushalla di tingkat desa, RT, RW, dan majelis taklim PKK
5) Memberikan kartu keaktifan salat berjamaah bagi santri TPA di setiap masjid/mushala. Dan memberikan

hadiah setiap mendapatkan tanda tangan salat berjamaah sebanyak 100 tanda tangan.

Namun, seiring dengan peralihan kekuasan, identitas Syariat Islam yang dilekatkan kepada Bulukumba misalnya pelan-pelan memudar.[1] Perda-perda bernuansa Syariat Islam pun saat ini tidak lagi terdengar gaungnya. Watak politik Indonesia yang liberal dan tidak berideologi menyebabkan ide keagamaan tidak bisa menjadi latar yang permanen. Peralihan kekuasaan berkorelasi langsung dengan perubahan kebijakan. Setiap kepala daerah memiliki cara pandang yang berbeda. Konteks ini menyebabkan satu kebijakan tidak bisa berjalan secara konstan. Hal ini pula menyebabkan perda syariat kehilangan fungsi dan gaungnya ketika terjadi peralihan kepemimpinan.

Eksperimen politik kaum Islamis di Sulawesi Selatan pun gagal ketika Azis Kahar (ikon kelompok Islamis politis) dua kali gagal menjadi pemimpin pemerintahan provinsi. Tahun 2008, Azis Kahar berpasangan dengan pengusaha Mubyl Handaling sebagai calon gubernur, hanya mendapatkan sekitar 20% suara dan tahun 2013 berpasangan dengan politisi Demokrat, Ilham Arif Sirajuddin sebagai wakil gubernur pun tidak mendapatkan suara yang cukup untuk mengalahkan pasangan petahana Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang. Kedua eksperimen politik ini gagal dan sekaligus memudarkan pesona dan gaung penegakan Syariat Islam di Sulawesi Selatan.

---

[1] Selain alasan bersifat structural, tampaknya alasan kultural pun ikut memengaruhi "keberhasilan" program ini. Di tingkat desa, agama di jalankan secara kultural, secara alamiah. Kebijakan yang bersifat structural akan tergantung pada sejauhmana pihak pemerintah mampu mempertahankan program tersebut.

Di tingkat nasional, PKS yang merupakan partai yang dibentuk oleh aktivis-aktivis Islam yang dekat dengan Ikhawanul Muslimin (IM) di Mesir merupakan salah satu harapan besar bagi kaum Islamis untuk mewujudkan ide formalisasi Syariat Islam secara nasional. Di era awal, PKS menunjukkan konsistensi yang kuat dalam mewacanakan idiom Islam dan juga tampilan Islami sebagai politisi bersih. Namun, harapan terhadap PKS menjadi hilang ketika PKS terjebak dalam permainan politik praktis, bagi-bagi kursi menteri misalnya. Kita tidak pernah mendengar PKS benar-benar memperjuangkan simbol Islam di parlemen. PKS sepertinya mengalami proses nasionalisasi. Ia lebih menyerupai parpol nasionalis yang bekerja untuk kepentingan politik kelompok. Hal ini semakin diperparah ketika Presiden PKS Lutfhi Hasan Ishaq terkait dengan kasus korupsi sapi impor dan harus mendekam di penjara.

Kekhawatiran terhadap PKS diawal kemunculannya sebenarnya sangat berlebihan, mengingat watak politik kita tidak berbasis ideologi. Agama tidak pernah benar-benar menjadi ideologi, sebagaimana IM di Mesir. Karenanya, di Sulawesi Tengah, PKS cukup mendapat sambutan karena yang membawa atau menjadi 'jualan' PKS adalah tokoh-tokoh Al-Khaerat terutama yang kuliah di Timur Tengah. Publik Sulawesi Tengah tidak menandai PKS dalam konteks ideologi tetapi dalam konteks partai politik. Karenanya, kehadiran orang Al-Khaerat di PKS tidak akan diributkan sebagaimana kehadiran orang Al-Khaerat di PAN yang merupakan assosiasi Muhammadiyah. Artinya, di tingkat lokal, PKS diperlakukan sebagai parpol biasa yang bercorak agama, bukan parpol yang akan membawa perubahan struktur ideologi keagamaan yang nantinya akan merusak ideologi Al-Khaerat.

Agenda politik yang lebih besar digaungkan oleh HTI dengan wacana khilafah Islamiyah. Hingga hari ini mereka

masih setia menggemakan wacana ini di seluruh Indonesia. Salah satu agenda besar HTI pada tahun 2014 adalah kongres Mahasiswa Islam Indonesia yang akan digelar di 73 Kota di Indonesia dari bulan Oktober – November 2014 dengan tema *We Need Khilafah Not Democracy*. Salah satu kekuatan utama HTI memang berasal dari kalangan mahasiswa.

HTI menawarkan gagasan perubahan sistem dengan berbasis Islam. Khilafah Islamiyah menjadi sendi gagasannya. Mereka berambisi untuk menggantikan sistem demokrasi dan sistem ekonomi kapital dengan sistem politik dan ekonomi ala Islam. Misalnya soal mata uang. HTI sangat aktif mengkampanyekan penggunakan mata uang emas dan perak (dinar dan dirham). Jenis mata uang ini disempurnakan dengan sistem ekonomi Islam akan membuat kekayaan masyarakat terjaga dan perekonomian akan memberikan kesejahteraan dan keadilan. Mata uang ini – menurut HTI – lebih kuat menahan fluktuasi moneter ketimbang mata uang kertas.

Namun eksistensi gagasan khilafah ini masih meragukan. Pasalnya, hingga saat ini gagasan khilafah terlihat hanya sekedar jargon. HTI sepertinya kesulitan untuk mengimplementasikan gagasannya secara riil. Selama puluhan tahun kehadiran HTI di Indonesia, kita tidak pernah menemukan gerakan politik yang mengarah pada implementasi gagasan khilafah. Gerakan HTI hanya mengumpul massa di kalangan mahasiswa dan membangun diskusi-diskusi ilmiah. Sesekali ikut menyuarakan gagasan ‘perbaikan’ di jalanan dengan tetap setia dengan jargon khilafah Islamiyah. HTI sebagai gerakan sosial dan moral memang banyak menarik perhatian kaum muda Islam tetapi sebagai bagian dari gerakan politik menuju sistem khilafah, tampaknya masih menempuh jalan yang sangat panjang.

Kesulitan lain kemungkinan adalah karena gagasan khilafah Islamiyah sendiri sebenarnya sangat utopis. Azyumardi Azra (2014) misalnya menyebutkan:

> Konsep khilafah itu sendiri sangat problematis dan utopian. Terdapat banyak perbedaan konsep dan praksis khilafah di antara pemikir Muslim penggagasnya sejak dari Jamaluddin al-Afgani, Abdulrahman Al-Kawakibi, Abu al A'la al-Mawdudi sampai Taqiuddin a—Nabahani.
>
> Utopianisme khilafah juga terletak pada kenyataan bahwa kaum Muslim di berbagai kawasan telah mengadopsi negara bangsa berdasarkan realitas bangsa dengan tradisi sosial, budaya, dan agama distingtif; wilayah geografis; dan pengalaman historis berbeda. Karena itu 'unifikasi' seluruh wilayah Dunia Muslim di bawah kekuasaan politik tunggal adalah angan-angan belaka.

Khilafah dalam perspektif Azyumardi Azra adalah gagasan yang tidak lagi relevan dengan situasi global yang cenderung sudah terikat secara permanen dengan sistem negara-bangsa. Tantangan HTI menjadi sangat besar apabila dia ingin memulainya dari Indonesia. HTI harus melakukan revolusi besar-besaran. Dan itu sama sekali tidak mudah kalau tidak ingin menyebutnya mustahil. Selain karena Indonesia sudah terbentuk dalam model negara bangsa, juga karena masyarakat Indonesia sudah memiliki pengalaman panjang soal dialektika Islam dan negara.

Pilihan NKRI adalah pilihan yang juga dilandasi dengan semangat keagamaan. Perdebatan kaum nasionalis dan kelompok Islam berakhir dengan konsensus NKRI sebagai bentuk negara dan Pancasila sebagai landasan ideologinya. Artinya, jika HTI datang dengan konsep

khilafah sebagai tawaran dari ajaran Islam, maka itu sudah terlambat karena Pancasila bagaimana pun juga dibangun dari spirit Islam, bukan dari spirit nasionalisme atau sekulerisme. KH. Wahid Hasyim, KH. Abdul Kahar Muzakkir, dan KH. Masjkur adalah tokoh Islam dari NU-Muhammadiyah yang menjadi aktor dari lahirnya Pancasila bersama dengan tokoh nasionalis lainnya. Jadi, pendekatan Islam yang menjadi andalan HTI dalam menawarkan khilafah tidak relevan memengaruhi wacana politik Islamis di Indonesia.

Pilihan yang tersedia bagi HTI adalah mengubah konsep khilafahnya dari sistem politik menjadi sistem moral. Artinya, HTI tetap menerima sistem negara bangsa tetapi melandasinya dengan nilai ke-khalifa-an. Kalau tidak, teriakan khilafah Islamiyah hanya menjadi 'angan-angan belaka' yang tersimpan di ruang kosong di langit sana dan suatu saat akan kelelahan sendiri. Walau begitu, para aktivis HTI sangat meyakini kalau khilafah adalah *gift* dari Tuhan yang akan diberikan kepada hambanya yang berjuang secara ikhlas. QS. An-Nur; 55 dan *bisyarah* hadits Nabi Muhammad tentang kemunculan *khilafah ala minhaj nubuwwah* menjadi landasan mereka dalam memperjuangkan keyakinan. Soal ini, waktu akan menentukan benar atau tidaknya keyakinan kelompok HTI ini.

Berbeda dengan model gerakan KPPSI dan PKS, gerakan HTI lebih berisfat kultural. HTI tidak bermain di wilayah politik praktis. HTI menolak bermain politik konvensional karena menganggap demokrasi (rumah politik domestik) adalah produk non muslim yang tidak sesuai dengan spirit Islam. Bahkan secara tegas, HTI menyebutnya demokrasi adalah sistem kafir dan haram menjalankannya.

Fokus kajian mereka saat ini adalah politik Islam. Dimana-mana, aktivis HTI pasti bicara tentang Islam *kaffah.* Islam yang tidak hanya mengurusi soal ibadah tetapi juga ekonomi, sosial, politik, dan seluruh sendi kehidupan manusia. Penegakan Islam *kaffah* hanya bisa dilakukan ketika sistem pemerintahan yang berkuasa adalah sistem Islam atau sistem khilafah. Dimana umat Islam berada di bawah satu kekuasaan.

Doktrin Islam *kaffah* dengan penegakan khilafah sebagai solusi membuat para aktivis HTI "memandang sebelah mata" gerakan kelompok revivalis ekonomi Islam dalam bentuk "ekonomi syariah". Dalam sebuah seminar bertajuk "Konfrensi Indonesia Milik Allah" yang dilakukan di Kampus IAIN Kendari (sabtu, 6 Juni 2015), seorang pembicara dari aktivis HTI menyindir gerakan ekonomi syariah, bank syariah, dan apapun yang berbau syariah sebagai upaya yang gagal.

Bentuk gerakan *parsial* seperti itu tidak akan mungkin berhasil karena pemerintah masih berbentuk negara demokrasi. Oleh karena itu, aktivis HTI pun cenderung tidak setuju dengan model penerapan Syariat Islam di Aceh. Bukan pada bentuk penegakannya tetapi pada modelnya yang parsial. Bagi aktivis HTI, penegakan syariat dalam bentuknya yang parsial tidak bisa membawa perubahan apa-apa. Islam tidak diturunkan secara *parsial* tetapi kepada seluruh umat.

Penegakan khilafah adalah bentuk solusi yang tepat bagi umat Islam di seluruh dunia. Sistem khilafah akan mewujudkan masyarakat Islam yang kuat baik secara politik maupun secara ekonomi.

Kritik terbesar aktivis HTI terhadap Indonesia adalah ketika Indonesia - sebagai mayoritas Islam meninggalkan sistem politik Islam dan lebih memilih sistem demokrasi. Bagi mereka, demokrasi yang menekankan pada kedaulatan

rakyat bertentangan (para aktivis HTI di Kendari menggunakan istilah bertabrakan langsung) dengan akidah Islam. Kedaulatan tidak boleh ditangan manusia tetapi ditangan Tuhan (melalui syariatnya). Manusia tidak memiliki hak untuk membuat hukum apalagi bertentangan dengan hukum Allah (wawancara dengan Sf dan Al).

Kegagalan pancasila di Indonesia – bagi para aktivis HTI – adalah karena sistem pelaksanaannya yang menggunakan demokrasi. Demokrasi bukan perahu yang tepat dalam menjalankan nilai Pancasila. Kebebasan dan kesamaan hak semua orang dalam demokrasi pada gilirannya tidak bisa merefleksi dengan baik nilai-nilai Pancasila. Nilai Pancasila bagi mereka sudah baik tetapi gagal dalam implementasi. Salah satu contoh misalnya sila pertama *ketuhanan yang maha esa.* Sila ini adalah refleksi dari nilai Islam tentang ketauhidan. Nilai dari sila ini tidak dapat diwujudkan karena demokrasi memberi kebebasan kepada siapa saja untuk memilih agama dan beragama sesuai dengan "selera-nya". Penerimaan negara terhadap Ahmadiyah (yang dalam perspektif HTI melanggar akidah Islam) adalah bentuk kegagalan Pancasila (wawancara Sf). Bagi HTI, tidak ada tempat bagi orang sesat seperti Ahmadiyah. Mereka sudah "merusak" akidah umat Islam. Dalam sistem khilafah, orang Ahmadiyah terlebih dahulu akan diberikan dakwah Islam yang benar. Apabila tidak mau berubah, mereka harus diperangi (wawancara Al).

Demokrasi adalah produk non-muslim. Sudah seharusnya ditinggalkan dan digantikan dengan sistem khilafah. Khilafah adalah mandat Islam, kewajiban bagi setiap muslim untuk menegakkannya. Sikap anti-demokrasi ditunjukkan tidak hanya dalam bentuk "perlawanan wacana", tetapi juga dalam tindakan. Seluruh aktivis HTI yang ditemui mengaku tidak ikut memilih pada pemilu legislatif dan pilpres tahun 2014 lalu. Mereka juga sangat

aktif membuat spanduk-spanduk provokatif yang secara tegas menolak demokrasi.

Sistem pengkaderan yang intensif membuat para aktivis mahasiswa HTI memiliki pengetahuan yang baik tentang gagasan khilafah (versi HTI). Mereka dibekali dengan pengetahuan tentang alasan dibalik runtuhnya dinasti Usmaniyah di Turki pada tahun 1924. Tudingan mereka terutama pada munculnya Kemal At-Turk yang dianggap sebagai penghianat Islam. Dia yang meruntuhkan sistem khilafah dan menggantinya dengan sistem liberal seperti saat ini. Mereka dibekali juga dengan sebab-sebab kegagalan khilafah Islamiyah. Untuk melawan arus perlawanan terhadap sistem khilafah, mereka mengajukan satu konsep yang disebut *khilafah ala minhaj Nubuwwah.* Sebuah konsep khilafah yang sudah diproyeksi oleh Nabi Muhammad. Konsep khilafah yang disepakati oleh semua ulama.

Meski para aktivis HTI yang ditemui tidak menjelaskan secara eksplisit apa yang dimaksud dengan *khilafah ala minhaj nubuwwah* tetapi konsep ini cukup memberi keyakinan kepada mereka kalau sistem khilafah yang diperjuangkan oleh HTI adalah benar *khilafah ala minhaj nubuwwah.* Mereka dengan sangat percaya diri meyakini kalau *khilafah dinasti* yang runtuh di era Usmaniyah berbeda dengan khilafah yang ditawarkan oleh HTI. *Khilafah ala minhaj nubuwwah* adalah sistem pemerintahan Islam yang sesuai dengan Alquran sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad (melalui Hadist Riwayat Ahmad). Oleh karenanya, para aktivis HTI sangat menolak keras ketika mereka dianggap akan melanjutkan *khilafah dinasti.* Mereka membayangkan diri sebagai pelanjut cita-cita *khilafah* yang dasar-dasarnya diletakkan oleh empat khalifah pertama (Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abu Thalib).

Para aktivis HTI menyadari dengan baik bahwa teks tentang negara, daulah dan khilafah tidak terdapat dalam Alquran dan hadits (kecuali HR. Ahmad yang berbicara tentang *khilafah ala minhaj nubuwwah).* Ketiadaan teks yang eksplisit tentang daulah dan khilafah disadari oleh mereka akan menjadi dasar bagi kelompok luar yang tidak setuju dengan *khilafah.* Aktivis HTI menggunakan kaidah ushul

fiqhi untuk menguatkan pendapat mereka, *ma laa yatimmu wajibu illa bihi fahuwa waajibun* (Sesuatu yang menyebabkan kewajiban menjadi tidak sempurna kecuali karena dia, dia ikut menjadi wajib). Kaidah ini digunakan untuk membaca teks-teks hukum dalam Alquran misalnya kewajiban menegakkan hukum Allah, hukum potong tangan bagi pencuri, rajam bagi pezina dan qishas. Bagi aktivis HTI, penegakan hukum Allah adalah kewajiban karena diperintahkan oleh Allah melalui Alquran. Kewajiban ini hanya bisa dilakukan melalui sistem kekuasaan yang disebut khilafah. Karena itulah *khilafah* menjadi wajib bersamaan dengan kewajiban menegakkan hukum Allah.

Untuk sampai pada cita-cita penegakan khilafah, HTI menyiapkan tiga langkah besar. *Pertama tasqif* (pembinaan atau pembasisan). Pada langkah ini, produk pemikiran politik Syekh Taqiuddin Nabahani tampaknya menjadi rujukan wajib bagi setiap kader HTI. 16 jilid buku politik Syekh Taqiuddin Nabahani harus dipahami oleh setiap anggota atau kader HTI. Proses indoktrinasi dalam tradisi HTI dimulai dengan mengajarkan buku *nidzamul Islam* (peraturan hidup dalam Islam). Buku ini adalah buku pertama yang wajib ditelaah oleh seorang calon kader HTI. Lalu dilanjutkan pada buku kedua (pembentukan partai politik), buku ketiga (daulah Islamiyah) dan seterusnya. Sistem *halaqah* terbatas yang dilakukan di kampus adalah bentuk pembasisan dan tempat HTI mendapatkan kader.

Organisasi Gema (Gerakan Mahasiswa) Pembebasan tidak cukup kuat mendukung suplai kader ke organisasi HTI.

Kedua, tafaul maa ummah (bersosialisasi bersama umat). Salah seorang aktivis HTI mengakui kalau sekarang di Kendari sudah masuk pada tahap kedua ini. Mereka aktif mengkampanyekan gagasannya di kampus melalui buletin, pamflet, dan seminar-seminar. Tujuannya adalah agar semua umat Islam di Indonesia pada umumnya bisa menerima dengan baik gagasan HTI tentang perlunya penegakan khilafah.

Ketiga, penyerahan kekuasaan kepada pihak yang memiliki kekuatan. Tahapan ini adalah tahapan nasional (bahkan universal). Praktik ini tidak ditemukan dalam kasus Kendari. Tahapan ini mengandaikan, kekuatan publik terhadap dukungan ide khilafah telah besar.

B. Islamis Kultural

Agenda Islamis-kultural[2] lebih berorientasi pada pemben- tukan komunitas Islam yang bercirikan Islam, tentu saja yang sesuai dengan imajinasi mereka tentang Islam yang benar.

Karena berorientasi salaf, maka cita-cita masyarakat yang mereka inginkan adalah masyarakat Islam modern yang salaf. Meski WI sempat menjadi salah satu penyokong utama KPSI di Sulawesi Selatan tetapi mereka tidak menjadikan gerakan politik (formalism) sebagai tujuan utama.

---

[2] Istilah Islamis-kultural digunakan untuk menyebutkan kelompok Islamis yang tidak berorientasi politik baik dalam tindakan maupun cita-cita. Atau kelompok yang melakukan sistem kerja yang berorientasi pada pengembangan masyarakat

Bagi kaum Islamis Kultural, meng-Islam-kan masyarakat Indonesia adalah agenda utama. Jika semua umat Islam Indonesia sudah sesuai dengan visi mereka, maka dengan sendirinya "Negara Islam" akan mudah diwujudkan. Atas dasar pemikiran, beberapa kelompok salafi tidak ikut memilih pada saat pemilu karena merasa sia-sia. Selain karena pemimpin yang akan dipilih tidak mewakili kepentingan mereka juga karena masyarakat Islam Indonesia secara umum belum seirama dengan pemikiran mereka. Mereka akan ikut memilih apabila diyakini ada calon pemimpin yang sesuai dengan yang mereka inginkan (diolah dari hasil wawancara dengan AR, aktivis Salafi di Kota Kendari).

Wahda Islamiyah (WI) menjadi ikon Islamis yang cukup menarik perhatian di Kawasan Timur Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Orientasi WI jelas mengarah kepada pembentukan sistem sosial yang berbasis Islam. Perkembangan organisasi WI cukup pesat. Mereka memiliki cabang dihampir semua daerah di kawasan Timur Indonesia, termasuk di Sulawesi Tengah (meski perkembangannya tidak sebaik di Sulawesi Selatan). Wahda Islamiyah merepresentasi diri sebagai organisasi salafi modern. Gerakannya pun cenderung terorganisir dengan baik. WI menginisiasi munculnya sekolah Islam dari TK sampai Perguruan Tinggi (STIBA) yang menarik banyak minat masyarakat muslim kelas menengah. WI menginisiasi pengobatan penyakit jiwa melalui klinik rukyah serta mendirikan rumah sakit, klinik bersalin, dan apotek pendukung.

Wahda Islamiyah berdiri pada tanggal 19 Pebruari tahun 1998 dipelopori oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah yang tergabung dalam sebuah yayasan yang disebut Yayasan Fathul Muin. Ide utama dari Wahda Islamiyah adalah kampanye akidah Islam yang sahih atau yang benar.

Melanjutkan ide furifikasi keagamaan ala Muhammadiyah di era tahun 1960an.

Kehadiran Wahda Islamiyah membawa semangat puritanisme baru di Makassar. Isu perbaikan tauhid dan “pemurnian dari aliran sempalan” menjadi salah satu yang sering didakwahkan di media TV lokal. Beberapa pentolan WI yang membentuk LPPI (Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam) secara konsisten menolak kehadiran Syiah dan Ahmadiyah di Makassar. Gerakan yang dilakukan salah satunya dengan mengumpulkan tanda-tangan dukungan dari tokoh-tokoh agama di Makassar untuk memberi persetujuan terhadap pemurnian akidah umat dari pengaruh syiah. Mereka pun seringkali ‘memblokade’ kegiatan IJABI (Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia) dan seringkali melakukan kegiatan dakwah yang bertemakan ‘penyelamatan akidah dari aliran sesat’.

Kelompok Islamis kultural lainnya adalah kelompok Salafi Yaman yang bermarkas di Baji Rupa dan tergabung dalam sebuah yayasan Ma’had An-Nasyat Al-Islami. Kelompok ini mengklaim diri sebagai kelompok yang paling salafi. Mereka menuding WI bukanlah gerakan salafi dengan alasan tertentu. Sebagaimana WI, kaum salafi lebih sering mengampanyekan pemurnian akidah Islam dari pengaruh duniawi. Mereka hidup untuk melestarikan tradisi keagamaan kamum salafi. Karena itu mereka menolak seluruh hal yang dianggap bid’ah. Mereka mengklaim diri sebagai salafi murni. Menariknya, mereka anti formalisasi syariah. Syariah harus dijalankan dan didakwahkan secara kultural. Setelah akidah dan akhlak umat bagus baru gagasan tentang negara itu difikirkan.

Bentuk utama dari gerakan salafi ini adalah pendidikan. Mereka mendirikan pesantren salafi yang bermarkas di Jalan Baji Rupa Makassar sejak tahun 2001 dengan nama Ma’had Assunah di bawah naungan Yayasan

Ma'had An-Nasyat Al-Islami. Mereka menerima santri dari berbagai daerah di kawasan Timur Indonesia. Ma'had Assunnah menerapkan dua sistem pengajaran; pengajian umum dan takhassus. Pengajian umum diikuti oleh semua santri sedang pengajian takhassus menyediakan kesempatan bagi para santri untuk mendalami satu materi pelajaran tertentu.

Di Sulawesi Tenggara, muncul gerakan salafisme melalui dunia pendidikan yang cukup mendapat sambutan dari masyarakat. Mereka dikenal dengan nama ICM (Islamic Centre Muadz bin Jabal). Gerakan ICM terlihat lebih menonjol karena infrastrukturnya lebih kuat. Lewat lembaga pendidikan (dari TK-SMA dan tingkat lanjutan), pengajian rutin di Masjid Muadz bin Jabal, dan radio Muadz bin Jabal, eksistensi ICM di Kendari semakin kuat. Animo warga terhadap lembaga pendidikan yang dikelola ICM setiap tahun semakin meningkat, antusiasme jamaah mengikuti pengajian rutin selama beberapa tahun belakangan juga cukup tinggi, dan radio Muadz bin Jabal menjadi satu-satunya radio yang secara konsisten berdakwah.

ICM adalah jenis kelompok salafi yang adaptif. Mereka menjalin kerjasama dengan pihak pemerintah dalam hal penanggulangan terorisme, mereka menyediakan dai di Kepolisian dan beberapa lembaga swasta. Mereka juga menyebarkan metode dakwah yang relatif adaptif. Mereka tidak alergi untuk memasang simbol Negara (Bendera Merah Putih di kantor dan halaman kampus). Mereka menerima Pancasila. Mereka juga tidak memiliki agenda politik yang memudahkan masuk kotak perbedaan. Para dai ICM mengakui tidak segan ikut *qunut* di belakang imam yang *qunut* karena hanya bersifat khilafiah Dai dari ICM dikenali memiliki kemampuan menjelaskan narasi keagamaan dengan basis teks yang baik. Tradisi masyarakat

yang dianggap bid'ah tidak dijatuhkan begitu saja tetapi diletakkan dalam fondasi "teks keagamaan " primer.

ICM akan memiliki pengaruh yang cukup besar di Kendari dalam beberapa waktu ke depan. Ustad Zezen yang berusia relatif masih muda memiliki masih cukup banyak waktu untuk menjadi "kyai besar" di Kota Kendari. Ini juga karena pola kaderisasi tokoh agama di organisasi lain tidak terlihat. Tidaklah mengherankan kalau ICM mendapatkan kepercayaan yang cukup besar dalam konteks keagamaan. Misalnya membina Napi Teroris enam bulan sebelum pelepasan.

Selain ICM, ada pula kelompok salafi yang menamakan diri sebagai kelompok pengajian *ahlusunnah wal jamaah.* Kelompok salafi ini semula tergabung dalam kelompok *minhajussunnah.* Mereka memisahkan diri setelah terjadi perbedaan pendapat (tidak diceritakan perbedaan pendapat tersebut) lalu membentuk kelompok pengajian dan menamakan diri sebagai jamaah *ahlussunnah wal jamaah.*

Cikal bakal kelompok ini sebetulnya dimulai pada tahun 1994. Seorang tokoh salafi bernama Abu Izzi datang membuka pengajian di salah satu masjid dekat kampus lama UHO. Pengajian Abu Izzi sempat menimbulkan polemik karena menawarkan paradigma keagamaan yang berbeda. Jamaah perempuannya bercadar. Hal ini menginisiasi sekelompok pemuda masjid untuk mendatangi pengajian Abu Izzi dengan tujuan berdebat. Namun rupanya diskusi itu justeru menjadi ruang pembenaran. Sekelompok pemuda tadi malah menjadi jamaah pengajian Abu Izzi. Setelah Abu Izzi kembali, beberapa anggota jamaah memutuskan untuk ke Jawa untuk menempuh pendidikan di pesantren pimpinan Jafar Umar Thalib. AR (salah satu pentolan jamaah Ahlussunnah wal jamaah) mengakui pernah ikut ke Ambon ketika terjadi perang disana. Dia bertugas di bagian kesekretariatan. Setelah

perang, memutuskan kembali ke Kendari, bersama dengan teman-temannya mendirikan yayasan "minhajussunnah" yang bergerak di bidang pendidikan.

Kelompok Ahlussunnah wal jamaah adalah sebuah komunitas atau perkumpulan pengajian, bukan organisasi yang terstruktur. Mereka tidak mengenal istilah pimpinan atau ketua kelompok. Yang ada hanya ustad yang secara rutin memberi pengajian. Oleh karena itu, jumlah anggota perkumpulan tidak dicatat. Jamaah yang ikut dalam pengajian biasanya berasal dari warga sekitar masjid tempat pengajian itu dilaksanakan. Kelompok ini merupakan afiliasi dari kelompok salafi dari Ma'had Nasyad Al-Islami (MANIS) di (jalan Baji Rupa) Makassar. Meski demikian, mereka sudah membentuk yayasan yang bernama Markas Da'wah Arrisalah yang bermarkas di Jalan Prof. Rauf Tarimana (Kambu).

Kelompok ini secara jelas menyebut diri mereka sebagai salafi. Salafi dalam perspektif mereka berarti mengikuti cara keagamaan Rasulullah, sahabat-sahabat, dan tabi'in. Salah seorang informan menolak istilah Wahabi. Istilah Wahabi adalah istilah eksternal yang sangat simplistis. Muhammad bin Abdul Wahhab memang rujukan utama salafi, tetapi bukan satu-satunya. Mereka lebih senang disebut sebagai salafi (wawancara AR). Bagi salafi, agama Islam telah sempurna. Segala sesuatu yang ada dalam Alquran dan Sunnah adalah prototipe yang paripurna. Umat Islam tinggal mengikutinya saja tanpa perlu mengurangi, menambah, dan mengotak-atik lagi. Apabila ada umat Islam yang menambah konsep Islam ini berarti Islam itu tidak sempurna. Jadi, tujuan kehadiran mereka adalah mengajak umat manusia untuk hidup berdasarkan cara hidup Nabi Muhammad dan sahabatnya. Apa yang diperintahkan oleh Aquran dan hadits itulah yang diikuti dan apa yang dilarang harus dijauhi. Sebagai

contoh kecil, salah satu hadits menyebutkan larangan menggambar manusia. Mereka mengikuti itu dengan tidak mau difoto kecuali hal mendesak seperti untuk pengurusan kartu tanda penduduk (wawancara Y dan A).

Tradisi masyarakat yang berkaitan dengan keagamaan seperti maulid, barzanji, dan peringatan-peringatan keagamaan lainnya adalah bentuk penambahan agama yang harus dihindari. Meski diakui bahwa dalam kegiatan maulid banyak hal yang bermanfaat seperti pembacaan shalawat nabi tetapi perayaan yang disematkan pada hari kelahiran Nabi Muhammad tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad, para sahabat, dan para tabiin. Jadi, kegiatan ini tidak memiliki akar dalam teks dan kebiasaan kaum salaf. Yang dibolehkan adalah hal-hal yang mendukung kenyamanan agama. Misalnya membuat lantai masjid dari tegel, memakai pengeras suara dalam shalat – meski tidak ada contohnya di zaman Rasulullah – tetapi hal ini dimaksud untuk mendukung agama, bukan menambah atau mengurangi dasar agama. Termasuk pakaian, asal sesuai dengan tata cara yang dianjurkan Islam maka jenis kain dan model pakaian tidaklah masalah (wawancara AR). Tampilan fisik kelompok ahlussunnah wal jamaah seperti kelompok salafi pada umumnya, bercelana kain cingkrang, berjanggut, dan berbaju gamis bagi laki-laki. Ketika imam, tidak mengeraskan basmalah.

Kajian keagamaan kelompok Ahlussunnah wal Jamaah di Kota Kendari sangat intensif. Setiap hari mereka melakukan kajian, bahkan kadang-kadang bersamaan waktunya. 11 Masjid di Kendari tempat mereka melakukan kajian rutin, 1 masjid lainnya di Konawe Selatan (Konda). Tema kajian meliputi akidah, fiqih, hadits, dan pelajaran bahasa Arab sebagai imu alat. Kitab-kitab yang mereka kaji adalah kitab utama rujukan kaum salafi dari Syekh Abdul

Wahab, Syekh Ibnu Taimiyah, Syekh Abdullah bin Baz, Syekh Ustaimin, dan Dr. Fauzan Shalihin.

Yang menarik adalah gerakan Islamis kultural mampu menarik perhatian kaum muda, khususnya di kalangan mahasiswa. Sebagian dari kelompok Islamis ini mampu menguasai LDK (Lembaga Dakwah Kampus) dan membuat program yang menarik perhatian mahasiswa muslim yang ingin mempelajari agama.

Sebagai contoh kasus yang terjadi di kampus Universitas Halu Oleo, Kota Kendari. Tahun 2000 adalah tahun monumental dari perkembangan organisasi mahasiswa Islam (baru) di UHO. Di tahun ini, organisasi mahasiswa Islam baru mulai membangun kekuatan. Isu Islam (formal) yang mereka tawarkan ke kampus mendapatkan perhatian yang baik. KAMMI dengan isu Islam akhlaki dan gerakan moral, LDK-BKLDM (HT) dengan isu khilafah dan gerakan politik Islam, dan LDK Ulul Al-Bab (WI) dengan isu Alquran. Ketiga kelompok organisasi ini mulai menguasai masjid dan mushala kampus.

Tahun 2000-an memang merupakan tahun ekspansi organisasi baru di Kota Kendari. Organisasi Islam (baru) seperti HTI, dan WI mulai mengembangkan sayap mereka. Bersamaan dengan itu berkembang pula pesantren salafi. Kelompok pengajian Muadz bin Jabal yang dibina oleh lulusan dari haramain pun mulai berkembang di Kota Kendari beberapa tahun belakangan ini. Organisasi-organisasi kemudian melebarkan sayap mereka hingga ke kabupaten-kabupaten. Bahkan kelompok keagamaan lama seperti JT (Jamaah Tabligh) dan LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) dan kelompok aliran seperti Ahmadiyah pun ikut berkembang di tahun 2000an (Saprillah, 2008). Ini berbanding terbalik dengan organisasi keagamaan

yang lama seperti NU dan Muhammadiyah. Perkembangan keduanya relatif stagnan.

Kehadiran organisasi mahasiswa Islam baru (khususnya HT dan WI) menggeser peran organisasi mahasiswa Islam lama (HMI, PMII, dan IMM) di kampus dalam hal pengelolaan isu agama. Kajian-kajian keislaman saat ini lebih banyak dikelola oleh kelompok baru ini. Sedangkan aktivis mahasiswa dari HMI, PMII dan IMM lebih berorientasi politis dan reaktif terhadap isu-isu tertentu (yang tidak terkait dengan isu agama). Akibatnya, kehadiran aktivis organisasi lama di kampus tidak terlalu terasa.

Setiap hari, sangat mudah ditemukan mahasiswi atau mahasiswa yang melakukan kajian-kajian di sudut koridor masjd Laode Maalim, di dekat pintu masuk kampus UHO. Kelompok mahasiswi yang melakukan aktivitas di bawah tangga masjid hingga ke teras bagian Selatan adalah aktivis LDK-Ulul Al-Bab. Kelompok mahasiswi yang melakukan pengajian di koridor masjid berasal dari MHTI. Kelompok mahasiswa yang biasanya melakukan kegiatan di teras dan dalam masjid dengan kelompok terbatas berasal dari LDK-BKLDM dan GEMA Pembebasan. Sedangkan kelompok mahasiswa/mahasiswi yang melakukan kajian di mushala adalah aktivis UKKI.

Ini menunjukkan bahwa ketiga kelompok organisasi mahasiswa Islam baru sangat aktif dalam melakukan aktivitas pengajian keagamaan setiap hari. Masjid dan mushala menjadi pusat kegiatan mereka. Diresmikannya masjid Ld Maalim pada tahun 2005 menjadi berkah bagi kelompok-kelompok ini. Areal masjid yang luas dimanfaatkan oleh mereka untuk melakukan aktivitas pengajian Alquran dan kitab. Posisi masjid Ld Maalim yang dekat dengan jalan akses keluar-masuk kampus menyebabkan aktivitas mereka mudah terlihat. Ini juga

menjadi poin penting bagi mereka untuk memperlihatkan diri ke publik.

Aktivitas pengajian keagamaan di masjid Ld Maalim memang cukup intensif, terutama kelompok aktivis HT dan WI. Sedangkan, aktivis UKKI (KAMMI) lebih banyak melakukan aktivitas di mushala fakultas. Mereka tidak terlihat melakukan aktivitas di sekitar masjid Ld Maalim meskipun sekretariatnya ada di lantai dasar masjid. Kelompok HT setiap hari melakukan kajian-kajian terbatas dengan jumlah maksimal 5 orang. Kelompok MHTI biasanya melakukan kajian di koridor masjid. Setiap hari (selama penelitian ini dilakukan) minimal ada dua atau tiga kelompok yang melakukan pengajian kitab (khususnya karya Taqiuddin An- Nabahani). Sedangkan kelompok aktivis muslim dari HT biasanya melakukan kajian di teras atau dalam masjid selepas salat asar.

Aktivis mahasiswi dari WI pun melakukan aktif melakukan kegiatan. Mereka setiap hari berkumpul di bawah tangga masjid untuk melakukan kegiatan pengajian Alquran. Berbeda dengan MHTI, kegiatan mahasiswi WI dilakukan secara massif. Sedangkan aktivis mahasiswanya dilakukan di dalam sekertariat di lantai 2 atau dalam ruangan masjid.

Selain itu, ada kegiatan rutin pengajian dan tafsir Alquran setiap hari rabu dan sabtu di masjid Ld. Maalim setelah salat asar.

Perkembangan organisasi Islam (khususnya HT dan WI) baru ini cukup massif terutama sejak tiga tahun terakhir. Jumlah mahasiswa yang tergabung dalam HTI melalui chapter LDK-BKLDM, Gema Pembebasan, dan MHTI sudah mencapai ratusan orang. Sebagian besar berasal dari kalangan mahasiswi. Ada dua kategori besar mahasiswa yang menjadi pengikut HTI. Kelompok pertama dikategorikan sebagai aktivis HTI. Jumlahnya

tidak terlalu banyak. Kelompok kedua dikategorikan sebagai simpatisan HTI. Ini yang paling banyak jumlahnya. Sayangnya, pihak aktivis HTI di kampus tidak bisa menghitung secara pasti jumlah anggota dan simpatisannya. Namun, jika melihat jumlah kelompok kajian terbatas HTI (terutama muslimah) yang jumlah mencapai 30 kelompok dengan jumlah anggota pengajian antara 3-5 maka jumlah anggota dan simpatisan HTI di kampus UHO bisa mencapai ratusan orang. Ini karena kelompok kecil yang melakukan halaqah di sekitar masjid Ld Maalim adalah rekrutan baru. Kelompok yang lebih senior biasanya melakukan pengajian di masjid lain (selain di masjid kampus) di Kota Kendari (diolah dari hasil wawancara dengan Sf, sekretaris Gema Pembebasan UHO).

Di tingkat fakultas ada forum studi yang disebut dengan Fosil (Forum Studi Islam). Fosil tersebar di sembilan fakultas, yaitu Teknik, Hukum, Fisip, Pertanian, Peternakan, Ekonomi,

Mipa, dan FKIP. Jumlah anggota Fosil bisa mencapai 10-20 orang. Dengan demikian, jumlah rekrutan HTI melalui jalur Fosil bisa mencapai minimal 90 orang dari sembilan fakultas tersebut (wawancara dengan Im, Sekretaris LDK-BKLDM).

Perkembangan WI (melalui LDK Ulul Al-Bab) tampak lebih massif. Jumlah anggota aktif mereka sebanyak 500 orang lebih. Jumlah mentor saja dari kalangan mahasiswa (ikhwan) sebanyak 45 orang dan mentor dari kalangan mahasiswi (akhwat) sebanyak 90 orang. Sedangkan jumlah simpatisan bisa mencapai ribuan mahasiswa. Setidaknya setiap tahun ajaran baru, mereka berhasil mengajak dosen untuk melibatkan mahasiswanya untuk ikut dalam program bimbingan baca Qur’an atau lebih populer dengan istilah BBQ (Wawancara dengan LD, Ketua LDK Ulul Al-Bab).

Bagaimana organisasi mahasiswa lama? Harus diakui perkembangan HMI, PMII, dan IMM tidak seagresif dengan organisasi mahasiswa Islam baru ini. Pola rekruitmen kader yang bersifat struktural-formal dan tidak diikuti dengan kajian-kajian yang intensif membuat perkembangan mereka menjadi lamban. Hingga saat ini, HMI Korkom UHO hanya aktif di tiga fakultas. Begitu pula, PMII Komisariat UHO pun hanya aktif di tiga fakultas. IMM lebih parah lagi karena posisi struktural organisasi ini hanya sebatas komisariat UHO di bawah koordinasi UMK.

Keberadaan aktivis organisasi mahasiswa Islam lama di kampus UHO tidak terasa. Mereka tidak punya tempat khusus untuk melakukan kajian dan diskusi keagamaan. Mereka tidak ada di masjid dan mushala kampus. Para aktivis dari kelompok ini biasanya "eksis" menjelang pemilma (pemilihan mahasiswa) atau melakukan demonstrasi di kota. Para aktivis dari kelompok ini tampaknya terjebak pada isu yang sangat pragmatis (Barlian, 2014). Tahun 2000 an, setelah gelombang reformasi selesai, gerakan aktivis mahasiswa cenderung pragmatis dan merespon isu-isu yang tidak ideal. Misalnya, aliansi organisasi mahasiswa (PMII dan BEM UHO) yang melakukan demonstrasi di depan Bank Danamon (pada hari Rabu, 3 Juni 2015). Mereka menuntut Bank Danamon untuk segera menyelesaikan kasusnya dengan nasabah. Demonstrasi menunjukkan betapa para aktivis mahasiswa ini terjebak pada isu yang ecek. Hubungan nasabah-bank bisa diselesaikan melalui jalur hukum. Begitu pula, beberapa kali aktivis PMII terlibat dalam demonstrasi di Kanwil Kementerian Agama memprotes pergantian pejabat di kalangan kemenag (wawancara P).

Perkembangan organisasi/lembaga mahasiswa Islam baru di kampus UHO dipengaruhi oleh beberapa faktor. *Pertama*, melemahnya perhatian organisasi

mahasiswa Islam lama dalam mengelola isu agama di kampus. Hal ini menyisakan ruang kosong yang bisa diisi organisasi/lembaga mahasiswa Islam baru ini. Organisasi mahasiswa Islam lama tidak memiliki agenda penguatan spritualitas normatif. Kajian keagamaan mereka lebih banyak diorientasikan kepada gerakan Islam sosial dan Islam subtantif. Diskusi keagamaan juga sangat jarang dilakukan. Kegiatan mereka lebih banyak dilakukan dalam bentuk demonstrasi. Berbeda dengan organisasi mahasiswa Islam baru. Pendekatan mereka lebih bersifat Islamis normatif.

Kedua, dukungan struktural. Ada beberapa orang dosen yang memback-up kegiatan dan pengembangan organisasi. Misalnya pada tahun 2013-2014, program Bidik Misi (program beasiswa untuk mahasiswa baru) dipegang oleh salah seorang dosen dari HT. Dosen ini kemudian merekrut pembimbing dari HTI untuk mendampingi para mahasiswa baru yang lolos dalam program Bidik Misi. Melalui cara ini, mahasiswa baru yang lolos program Bidik Misi didoktrin untuk menjadi bagian dari HT. Dukungan struktural lainnya adalah pihak kampus memberi ruang karena kegiatan lembaga mahasiswa baru ini dinilai sangat positif dalam membentuk moralitas. Program BBQ dari LDK dan SAINS mendapat respon positif dari para dosen. Mereka menganjurkan mahasiswanya untuk ikut dalam program ini. Hal ini ditambah dengan sifat organisasi mahasiswa Islam baru (khususnya HT dan WI) tidak punya agenda kritik terhadap kebijakan kampus. Aktivis HTI meski sering melakukan demonstrasi tetapi tidak pernah melakukan demonstrasi atas kebijakan kampus. Apalagi aktivis WI. Mereka bahkan mengharamkan demonstrasi.

Ketiga, karakteristik mahasiswa UHO adalah mahasiswa umum dengan pengetahuan agama yang relatif

minim. Hal ini menyebabkan para mahasiswa mudah untuk masuk menjadi bagian dari organisasi ini. Program organisasi mahasiswa Islam baru ini bisa memberi pengayaan akan pengetahuan agama bagi mereka. Program LDK Ulul Al-Bab meningkatkan kemampuan mereka dalam hal membaca Alquran. Program dari LDK BKLDM memperkaya pengetahuan keagamaan mereka secara komprehensif. Mahasiswa yang berlatar belakang pengetahuan agama yang minim tidak memiliki modal untuk menegosiasikan "doktrin" dari organisasi ini. Mereka menganggap itulah sebenarnya Islam. Mereka menerima saja semua "doktrin" keagamaan yang ditawarkan oleh organisasi tersebut sebagai kebenaran sesungguhnya dari agama Islam.

C. Islamis Radikal

Agenda kelompok Islamis-radikal adalah "perlawanan" terbuka terhadap musuh Islam, dengan refferen utama Amerika dan Barat. Agenda Islamis radikal terkait dengan konstalasi pertarungan global. Sebagian besar kelompok Islamis radikal berjejaring dengan kelompok Islamis radikal dunia, khususnya Al-Qaeda.

Mereka melakukan berbagai bentuk kekerasan dengan sasaran utama kepentingan asing seperti Bom Bali, Bom Kuningan di Kedubes Australia, dan Bom di McDonald Makassar. Terakhir bom di plaza Sarinah Jakarta. Beberapa percobaan bom pun dilakukan di beberapa tempat meski berhasil diantisipasi dengan baik oleh pihak kepolisian.

Eksistensi kaum Islamis-radikal semakin menemui konteksnya ketika retakan sosial di beberapa tempat di Indonesia (khususnya di kawasan Timur Indonesia) meledak menjadi konflik sosial. Retakan sosial yang

semula bersumber dari distribusi ekonomi dan politik yang timpang antara dua kelompok sosial yang berbeda identitas bertemu dengan situasi reformasi yang sangat liar akhirnya meledak menjadi konflik sosial. Kelompok Islamis khususnya dari lasykar Jihad datang mengambil peran dengan mengibarkan api konflik lebih lama dan lebih luas. Konflik ini kemudian kita kenal dengan istilah konflik Ambon, Poso, dan Mamasa. Konflik yang kemudian dikenal sebagai konflik agama karena para aktor dari dua pihak yang bertikai mengibarkan simbol-simbol agama sebagai penyemangat.

Kehadiran kelompok Islamis – radikal sangat tergantung dengan situasi global. Dalam banyak hal mereka tidak terkait dengan situasi lokal. Kehadiran mereka di Indonesia tidak untuk berperang dengan negara tetapi melawan Amerika (sebagai representasi musuh utama) dengan menghancurkan fasilitas-fasilitas yang dianggap mewakili Amerika dan sekutunya di Indonesia seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya. Para aktor Islamis-radikal sebagian besar merupakan alumni perang Afganistan dan Palestina. Sebagian juga terlibat dalam kaum militan di Moro, Filipina Selatan.

Gerakan ini menemukan tempat bersemai ketika pasca reformasi muncul konflik Ambon, Poso, dan Mamasa. Mereka ikut masuk ke dalamnya, menjadi aktor, dan memunculkan bibit terorisme sampai sekarang.

Gerakan ini di Indonesia telah mengalami titik nadir. Intensitas Densus 88 dalam memburu orang yang diduga terkait dengan terorisme di Indonesia terus menerus ditingkatkan. Ini mengakibatkan ruang gerak kelompok ini terus menerus menyempit. Namun, kehadiran ISIS di

Timur Tengah sepertinya mengobarkan kembali semangat juang para jaringan teroris di Indonesia. Ini terlihat dari aktivitas yang menggeliat dari beberapa kelompok Islamis di Indonesia yang memberi dukungan kepada ISIS, termasuk kehadiran WNA berpaspor Turki di Sulawesi Tengah dan penembakan enam orang terduga teroris di NTB (Nusa Tenggara Barat) yang diduga punya keterkaitan dengan ISIS. Bendera ISIS yang ditemukan di rumah salah seorang terduga teroris sebagai buktinya.

Hal lain yang patut diwaspadai adalah para WNI yang sekarang ini sedang bergabung bersama ISIS di Timur Tengah. Secara teori, keberadaan ISIS tidak akan bertahan lama. Selain karena bermusuhan dengan sesama umat Islam (khususnya Syiah dan Sunni moderat) juga karena tentara internasional dari berbagai negara ikut menyerang ISIS. Gerakan-gerakan radikal dunia hampir pasti tidak pernah dapat bertahan lama, kecuali mendapatkan sokongan yang kuat secara politik dan keuangan dari negara-negara besar. Nah, para anggota ISIS asal Indonesia kelak akan kembali pulang. Mereka dapat saja membangun semangat perlawanan baru. Apalagi, beberapa orang yang teridentifikasi bergabung dengan ISIS adalah jaringan teroris di Indonesia (lihat Ibnu Burdah, Kompas 10 September 2014). Imam Besar Istiqlal, Prof. Nasaruddin Umar menyebutkan bahwa ada sekitar 700 eks ISIS di Syuriah sudah kembali ke tanah air (disampaikan dalam pidato peresmian Wisma PMII, tanggal 25 Desember 2016) Apalagi, sejarah teroris di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar jihadis adalah eksodus dari perang di Afganistan, Palestina, dan Moro, Filipina Selatan. Semangat

jihad yang mereka dapatkan di perang itu mereka replikasi di Indonesia.

Dalam konteks nasional, agenda utama Islamis radikal adalah penegakan amar makruf nahi munkar dengan cara kekerasan. Mereka menganggap bahwa sistem pemerintah saat ini tidak memberi keadilan karena itu harus dilawan dengan cara para-militer. Gerakan MIT (Mujahidin Indonesia Timur) yang dipimpin oleh Santoso adalah bentuk nyata dari perlawanan kelompok Islamis radikal.

BAB IV

REALITAS GERAKAN KEKERASAN BERNUANSA AGAMA (MEMBACA BEBERAPA KASUS DI KAWASAN TIMUR INDONESIA)

A. Apakah Jaringan ISIS Benar Ada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah?

Isu ISIS yang tiba-tiba mengalir deras dalam dunia informasi kita, memaksa kita untuk berfikir ulang, apa yang sesungguhnya sedang terjadi? Benarkah ISIS ada secara organisasi di Indonesia (khususnya di Sulsel dan Sulteng), bukan imajiner? Atau ini permainan isu untuk 'memelihara' wacana terorisme agar tetap ada di Indonesia? Lalu siapa yang diuntungkan dari permainan diskursif ini?

Yang pasti hingga kini (atau setidaknya hingga tulisan ini dibuat) kehadiran ISIS (sebagai jaringan organisasi secara resmi) khususnya di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan masih sumir. Semua masih dalam bentuk dugaan yang didasarkan pada analisis terutama dari pihak kepolisian. Kata yang digunakan pihak kepolisian dan media massa untuk menyebut ISIS didahului dengan kata "terduga". Kata yang lazim digunakan sebagai implikasi dari sistem hukum yang menganut *praduga tak bersalah*. Namun, kata ini – dalam konteks sosial – berarti masih meragukan, bisa benar bisa juga tidak. Semuanya bersifat dugaan karena deklarasi dukungan terhadap ISIS tidak pernah secara tegas ditemukan dilakukan di dua wilayah ini dan laporan resmi yang menyebutkan keterlibatan jaringan sipil bersenjata di Poso dengan ISIS belum ada.

Lalu apa yang membuat wacana ISIS sangat dekat dengan Sulawesi Tengah? Tentu saja, sepak terjang

kelompok teroris yang ada di sana. Keberadaan MIT (Mujahidin Indonesia Timur) pimpinan Santoso di Poso memang menjadi diskursus yang memudahkan pihak kepolisian untuk menyederhanakan analisis tentang keberadaan ISIS di Sulawesi Tengah. Ini terlihat dari analisis Kapolda Sulawasi Tengah Brigjen Ari Dono Sukamto yang menyamakan model gerakan ISIS dengan gerakan Santoso. "Dengan membunuh, melakukan bom bunuh diri, menembak, merampok senjata, dan kegiatan *fa'i*, itu menjadi kesamaan kelompok tersebut," Kata Kapolda Sulteng (Tempo.co 07/8/2014). Bendera ISIS menurut Kapolda pernah dikibarkan oleh kelompok Santoso ketika pawai idul fitri pada bulan Agustus 2014 lalu. Ini mengindikasikan bahwa Santoso telah menjadi bagian dari ISIS di Indonesia. Pendekatan yang sama disampaikan oleh Utoro Saputro, bahwa ada simbol yang menggambarkan ISIS di Kota Palu yang digunakan beberapa orang, namun ini harus diteliti lebih lanjut, apakah mereka hanya iseng atau sekadar memanfaatkan maraknya pemberitaan soal ISIS (Antaranews.com 09/8/14). Analisis pihak kepolisian ini tampaknya yang menjadi landasan pikir media nasional untuk secepat mungkin mengaitkan para WNI yang tertangkap sebagai jaringan ISIS di Indonesia, terutama fakta-fakta yang menunjukkan keterkaitan mereka dengan Santoso. Artinya, karena para jaringan teroris terkait dengan Santoso berarti mereka adalah ISIS.

Faktor lain yang cukup kuat untuk mengindikasikan keterkaitan MIT dan ISIS adalah munculnya seorang Indonesia melalui video You Tube yang mengajak seluruh warga muslim untuk mendukung gerakan jihad ala ISIS. Orang Indonesia yang bernama Abu Muhammad Al-Indonesi itu – berdasarkan pernyataan Kapori Jend. Sutarman – adalah anggota kelompok MIT. Begitu pula,

empat orang terduga anggota ISIS yang tertembak di Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah juga mantan anggota MIT bahkan salah satu diantaranya yang berinisial SHL adalah seorang DPO (Daftar Pencarian Orang) yang ikut melakukan penembakan di pos Polisi di Poso.

Analisis yang mengaitkan MIT dan ISIS memang cukup rasional dengan beberapa indikasi yang cukup kuat. Bukan hanya pola kerja yang relatif sama – seperti yang menjadi basis analisis kepolisian – tetapi kelompok radikal Indonesia membutuhkan semangat baru untuk membangkitkan perlawanan setelah sekian tahun kehilangan taji. ISIS menjadi idiom baru untuk mengonsolidasi semangat jihad yang baru. Artinya, analisa kepolisian yang mengaitkan MIT dan ISIS bisa dibenarkan. Tetapi, analisis sederhana ini bisa beresiko pada 'ketakutan' yang berlebihan terhadap gerakan teroris Indonesia. Bagaimana pun juga, ISIS adalah gerakan yang sifatnya lokal (Irak dan Suriah). Medan pertempuran mereka adalah Irak dan Suriah. Sangat sulit membayangkan ide ini bisa diterima secara utuh oleh kelompok radikalis Indonesia kecuali untuk sekedar membangkitkan semangat juang baru. Artinya, kehadiran ISIS menjadi pemantik untuk membangkitkan gerakan untuk melakukan hal yang sama. Jaringannya bisa saja sangat imajiner, bukan bagian ISIS sebagai organisasi *ansich* tetapi kesamaan visi dan model gerakan belaka.

Lalu bagaimana dengan Sulawesi Selatan? Isu ISIS merebak di Makassar ketika seorang ustad diklaim mendeklarasikan dukungan terhadap ISIS. Ustad Basri yang memang dikenal sebagai mantan pejuang Afganistan tahun 1980an. Pada medio Agustus 2014, Ustad Basri mendeklarasikan dukungan untuk khilafah Islamiyah, tetapi bukan bagian dari gerakan ISIS di Syuriah. Media lokal maupun nasional ramai-ramai 'menuding' sang ustad

sebagai bagian dari ISIS bahkan dengan julukan "deklarator ISIS". Saat ini, sang ustad telah mendekam di penjara Makassar.

Ada dua hal yang patut menjadi perhatian tentang kemunculan wacana ISIS di tengah publik Indonesia khususnya di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan; *Pertama simplifikasi* gerakan. Kesamaan model gerakan antara kelompok Islam radikal Indonesia dan ISIS menjadi indikator utama yang digunakan untuk menganalisis keterkaitan gerakan ini dengan kelompok teroris yang sudah lama di Indonesia. Simplifikasi gerakan ini diperkuat dengan "bukti" keberadaan orang Indonesia yang memproklamirkan diri mereka sebagai bagian dari gerakan ISIS dan orang itu ternyata punya keterkaitan dengan MIT. Ada pula deklarasi dukungan dari berbagai tempat yang dilakukan oleh kelompok Islam radikal. Alternatif analisis lain adalah ISIS telah menjadi fenomena global. Gerakan ini mendapat sambutan hangat dari kelompok muda Islam di Eropa. Situasi ketertindasan dan fenomena anomali situasi sosial di Timur Tengah dengan kehadiran Amerika dan sekutunya membangkitkan semangat perlawanan, baik secara simbolik dengan menjadi bagian dari ISIS maupun dengan hadir sebagai sukarelawan jihadis di Timur Tengah. Keberhasilan ISIS membuat diri mereka menjadi wacana global digunakan oleh kelompok jihadis Indonesia untuk mengkampanyekan diri mereka, meski secara simbolis. Deklarasi, dukungan, maupun pemasangan bendera di tempat publik adalah bentuk penghadiran diri secara simbolis di hadapan dunia. Kelompok teroris di Indonesia menggunakan cara ini untuk membangun sindrom lama dengan idiom baru. Itu berhasil, gerakan terorisme yang terjadi belakangan (setelah ISIS menjadi

wacana global) segera dengan cepat dikaitkan dengan gerakan ISIS, meski dengan menggunakan kata “terduga”.

Kedua, simplifikasi wacana. ISIS hadir tidak hanya dengan semangat perlawanan berbasis ideologi Sunni atau sekedar melawan kepentingan Amerika di Timur Tengah tetapi juga membangun cita-cita purba masyarakat Islam yaitu Islamic State, khilafah Islamiyah. Khilafah merupakan model negara yang dimajukan oleh banyak kelompok Islamis di dunia, baik sebagai gerakan global maupun nasional. Wacana negara Islam hampir menjadi pergulatan politik di semua negara berbasis Islam. Pergulatan itu menghasilkan tiga bentuk, integrasi, akomodasi, dan *vis a vis.* Arab Saudi, Iran Malaysia, dan Brunei Darussalam adalah contoh negara yang mengambil bentuk integrasi dengan mengambil Islam sebagai dasar konstitusi mereka. Indonesia adalah bentuk negara yang mengakomodasi nilai Islam tetapi tidak menjadikannya sebagai landasan konstitusi secara khas. Turki adalah contoh negara yang menjadi nilai Islam dijauhkan dari kehidupan bernegara. Negara Islam atau khilafah Islamiyah pasca runtuhnya ke-khalifaan daulah Utsmaniyah di Turki telah menjadi idiom politik yang ditawarkan oleh kelompok Islam yang merasa jenuh dengan sistem demokrasi atau sekuler yang membawa manusia ke jurang perang kemanusiaan. Tidaklah mengherankan kalau ide khilafah Islam tidak lahir dari negara Islam yang mapan tetapi dari negara yang sedang berkecamuk. Syekh Taqiuddin Nabahani, inisiator khilafah Islamiyah melalui organisasi ‘politik’ yang disebutnya sebagai partai pembebas atau Hizbuttahrir, adalah orang Palestina. Dia tumbuh dan melihat konflik Palestina-Israel. Dia menyaksikan bagaimana negara Islam tidak bersatu membela Palestina karena melindungi kepentingan

masing-masing negara. Dia lalu mengajukan ide khilafah Islamiyah sebagai solusi.

Begitu pula, Abu Bakr Al-Baghdady yang mengkampanyekan negara Islam atau khilafah dari carut marut politik di Suriah. Sayangnya, gagasan pendirian negara Islam oleh ISIS dilakukan dengan cara-cara anarkis. Alih-alih mengambil banyak kawan, ISIS justeru semakin banyak mendapatkan musuh. Tidak hanya dari negara non muslim tetapi juga negara Islam integratif seperti Malaysia ataupun negara Islam akomodatif seperti Indonesia. Para ulama di dua negara ini misalnya mengatakan bahwa ISIS itu haram dan tidak merefleksikan Islam sama sekali.

Gagasan negara Islam yang menjadi cita-cita ISIS menjadi alat ukur untuk melihat "jaringan"-nya di Indonesia. HTI pun sempat mendapatkan perhatian penting di Indonesia karena kesamaan gagasan Khilafah Islamiyah. Isu ini kemudian dibantah oleh para petinggi HTI di Indonesia termasuk di Sulawesi Selatan. Tentu saja, pengaitan HTI dengan ISIS adalah absurd jika semata melihat kesamaan gagasan khilafah yang diusungnya. Ide khilafah Islamiyah yang ditawarkan oleh HTI di Indonesia khususnya sangat sistemik dengan pendekatan keilmuan yang relatif baik. Mereka tidak pernah menggunakan kekerasan. Bahkan mereka dikenal sebagai demonstran yang rapi dan baik. Mereka tidak pernah terlibat bentrok dengan aparat keamanan. Tentu semua ini berbeda dengan pola gerakan ISIS yang sangat destruktif dan sangat kejam.

Ini pula yang menjadi alat ukur yang menyebabkan ustad Basri diberitakan menjadi deklarator ISIS di Sulawesi Selatan. Padahal, yang dilakukan oleh Ustad Basri hanyalah deklarasi khilafah Islamiyah. Hal yang sama yang menyebabkan HTI pun sempat dikaitkan dengan ISIS karena kesamaan cita- cita perjuangan untuk menegakkan

khilafah Islamiyah. Belakangan, Ustad Basri tertangkap polisi atas dugaan itu.

Dalam konteks Islam, dukungan terhadap pembentukan khilafah Islamiyah, negara Islam, atau pun formalisasi Islam adalah bagian dari diskursus yang menyejarah. Sebaiknya hal ini tidak dianggap sebagai kekeliruan semata atau simplifikasi terhadap ISIS. Perdebatan tentang ini akan selalu ada karena memang ada sebagian kelompok dalam Islam menginginkan integrasi Islam ke dalam negara, bukan sekedar akomodasi. Aceh bisa menjadi contoh menarik. Otonomi istimewa yang dimiliki Aceh, memungkinkan mereka mengatur bentuk daerahnya. Dan mereka memilih Islam! *Islamic State* ala Aceh tentu saja tidak bisa dibaca pejoratif sebagaimana memandang *Islamic State* ala ISIS. *Islamic State* di Aceh adalah bentuk permainan politik identitas yang berbasis pada keagamaan. Basisnya ketidakadilan ekonomi dan politik yang dirasakan Aceh setelah sekian lama. Pun, diskursus ini muncul dalam konteks sejarah yang panjang. Yang lebih penting lagi, bentuk 'negara Islam" tidak lantas mengubah wajah Aceh menjadi radikal seperti yang ditampilkan oleh ISIS di Timur Tengah.

Munculnya wacana ISIS ke publik Indonesia bisa dibaca dalam beberapa perspektif. *Pertama*, ada kepanikan massif yang mulai merasuki nalar kita, khususnya pemerintah, terhadap gerakan terorisme. Kampanye ISIS oleh Abu Muhammad Al-Indonesi ditambah dengan munculnya dukungan publik di beberapa tempat menyebabkan kepanikan. Seolah-olah Indonesia sedang berada dalam titik nadir dalam soal terorisme. Jargon *selamatkan Indonesia dari ISIS* misalnya yang didengungkan oleh BNPT adalah refleksi dari kepanikan itu. Kepanikan yang terlalu berlebihan mengingat Densus 88 telah bekerja sedemikian aktif

dalam hal memerangi jaringan terorisme. Program *selamatkan Indonesia dari Terorisme* sudah dengan sangat gencar dilakukan sejak munculnya Bom Bali, terutama dengan munculnya Detasemen khusus 88 yang memang bertugas untuk 'menghabisi' para terorisme. Jaringan ISIS di Indonesia – kalaupun ada – adalah jaringan lama. Tidak jauh dari kelompok lama yang memang sudah menjadi incaran pihak keamanan sejak lama. *Kedua*, bisa bermakna positif karena kesadaran publik dan negara terhadap gerakan ISIS menjadi lebih cepat. Ini penting mengingat bibit terorisme sangat mudah berkecambah di negeri yang labil secara politik. Dan Indonesia adalah salah satu negara yang politiknya masih sangat labil. Deklarasi penolakan yang terjadi dimana-mana menunjukkan berhasilnya upaya negara menghadirkan wacana ISIS sebagai sesuatu yang berbahaya di tengah masyarakat. Publik berhasil diajak untuk waspada dan sekaligus menolak segala bentuk terorisme baru seperti ISIS. *Ketiga,* ada akibat negatif dari maraknya kabar tentang ISIS, khususnya bagi Poso. Poso kembali menjadi perbincangan hangat ketika wacana ISIS mengemuka ke publik. Jaringan Santoso dan Daeng Koro yang masih bergerilya di hutan Poso menyebabkan perhatian publik ke Poso semakin meningkat ke Poso. Menariknya, perhatian ini sepertinya "dimanfaatkan" oleh jaringan Santoso untuk membuat gerakan. Penangkapan WNA yang diduga sebagai jaringan ISIS tidak bisa dipahami sebagai 'keteledoran'. Boleh jadi itu adalah bagian dari strategi Santoso untuk menguji kesigapan keamanan. Membawa orang Asing menuju Poso adalah tindakan bunuh diri, dan yang mengherankan mengapa harus melalui Palu padahal mereka ini datang dari Makassar via jalur darat, dimana ada jalur yang memungkin masuk ke Poso tanpa melalui Palu. Beberapa hari setelah penangkapan terduga teroris itu, jaringan

Santoso melakukan aksi dengan memenggal kepala seorang petani di Poso (22 September 2014) dan melakukan penembakan kepada Polisi yang sedang berpatroli (04 Oktober 2014).

Dengan begitu, diskursus tentang ISIS masih sangat buram. Deklarasi dukungan terhadap ISIS yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia, bisa jadi sekedar dukungan terhadap gagasan negara Islam atau bisa jadi sebagai bagian dari 'merk' baru bagi gerakan Islamis radikal untuk menyatukan faksi-faksi kelompok radikal di Indonesia.

B. Konflik Poso di Sulawesi Tengah; dari Konflik Komunal ke Lahirnya Militan Muslim

Kekerasan atas nama agama di Sulawesi Tengah sangat identik dengan konflik Poso. Semua pembacaan radikalisme agama mengarah ke Poso sebagai titik sentralnya dan rangkaian kekerasan yang terjadi berkaitan dengan Poso. Masih bertahannya Santoso dan MIT (Mujahidin Indonesia Timur) - nya membuat seluruh kekerasan dari milisi sipil dikaitkan dengan gerakan Santoso. Di luar itu, kita tidak menemukan kekerasan atas nama agama. FPI memang ada tetapi mereka tidak segarang dengan FPI di kota lain. FPI di Palu merekrut pemuda-pemuda Al-Khaerat dan karenanya diyakini tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang brutal.

Konflik Poso merupakan peristiwa mengerikan yang pernah terjadi di Sulawesi Tengah. Tidak pernah ada yang membayangkan peristiwa seperti itu akan terjadi. Sulawesi Tengah sendiri tidak punya sejarah kekerasan komunal. Ikatan nilai *sintuwu maroso* benar-benar menjadi jembatan nilai yang menghubungkan seluruh elemen sosial dalam bingkai yang harmonis. Sebelum konflik, Poso dianggap sebagai wilayah yang menyenangkan, damai,

dengan panorama alam yang sangat menawan. Citra itu tiba-tiba berubah ketika terjadi konflik komunal di tahun 1998. Konflik yang bermula dari pertikaian dua orang berbeda identitas keagamaan tiba-tiba meledak menjadi rusuh sosial. Eskalasinya berubah menjadi konflik agama, Islam dan Kristen.

Puncak konflik Poso terjadi pada tahun 2000. Ada ribuan orang meninggal dunia dari kedua belah pihak. Konflik ini menjadi semakin massif karena melibatkan milisi dari dua kelompok agama. Milisi Islam seperti kelompok lasykar jihad dan milisi Kristen yang dipimpin oleh Tibo cs menjadi aktor yang mengobarkan semangat perjuangan antar kelompok. Kehadiran 'orang luar' dari dua entitas agama inilah yang menyebabkan konflik Poso menjadi berlarut-larut. Kedatangan lasykar Jihad ke Poso dilandasi oleh semangat solidaritas sesama muslim. Mereka memandang bahwa konflik Poso adalah konflik agama, sebagaimana petikan tulisan di bawah ini:

> Dari berbagai bukti dan kesaksian sudah saatnya untuk tidak lagi menutupi kasus di Poso sebagai kasus yang kental beraroma agama. Sejujurnya nurani kita akan mengatakan, bahwa prahara di Poso telah menyeret masyarakat ke dalam dua kutub: Islam vs Kristen. Tak hanya masyarakat sipil, kalangan aparat pun terseret pula dalam konflik ini. Kecurigaan terhadap keterlibatan oknum aparat Kodim Poso dalam pembantaian di Kilo Sembilan dan rumor delapan anggota Kostrad beragama Kristen yang desersi dengan membawa senjata organiknya, mengindikasikan betapa kasus ini merupakan pertentangan dua kelompok umat beragama.
>
> Menutupi kasus ini sebagai bukan konflik agama, berarti berupaya membodohi masyarakat dan coba mengelabui masyarakat yang secara langsung

tertimpa konflik tersebut. Selain itu, tidak terbukanya beberapa kalangan untuk mengatakan bahwa konflik di Poso adalah konflik agama, menunjukkan betapa paradigma lama masih kental menggayuti benak pihak-pihak tertentu. Ini tentu akan lebih menyulitkan untuk mencari akar masalah sebenarnya dan mencari solusi yang tepat bagi penyelesaian konflik itu sendiri. Tepat apa yang dikatakan Wakil Ketua DPRD Tk. I Sulteng dari Fraksi TNI/Polri, Kolonel (inf) Muchlis Agung, Msi., bahwa konflik Poso adalah konflik agama. Pernyataan yang disampaikan pada saat dengar pendapat antara pihak pemerintah daerah dengan anggota dewan, Senin (16/7/2001), merupakan pernyataan jujur yang selaras tarikan nafas masyarakat. Bisa saja sebagian orang berpendapat bahwa peristiwa Poso lantaran dipicu oleh berbagai sebab. Entah diawali oleh pertentangan dua anak muda. Gara-gara obeng kemudian terjadi peristiwa yang tak diinginkan. Boleh juga dikatakan awal konflik ini disebabkan kecemburuan pihak tertentu karena tak mendapat jatah kursi jabatan di tingkat pemerintah daerah.

Sekali lagi, itu hanya percikan atau pemicu awal. Adapun sebab laten yang selama ini mengintai masyarakat Kabupaten Poso, bahkan masyarakat di kabupaten lainnya di Indonesia ini, tak pernah dicermati. Penyebab laten itu adalah sikap ambisi dari kalangan misionaris untuk melakukan pemurtadan terhadap umat Islam. Di beberapa wilayah proses kristenisasi itu masih dalam taraf pendekatan sosio-kultural, tanpa kekerasan fisik (termasuk dalam proses ini, adalah menguasai potensi-potensi birokrasi di daerah). Tapi dalam batas tertentu di daerah yang telah dianggap kuat, proses kristenisasi itu berlangsung

secara fisik. (Ayip Syafruddin, 2001; *Mengapa Lasykar Jihad datang ke Poso?*).

Lasykar Jihad melalui petikan tulisan Ayip Syafruddin (Wakil Panglima Lasykar Jihad) di atas, dengan jelas membangun konstruksi perang agama dan kristenisasi sebagai pembenaran kehadiran mereka di Poso. Fakta yang terjadi memang menunjukkan adanya pola yang sangat jelas, bahwa yang sedang bermusuhan adalah dua entitas kelompok agama yang berbeda, Islam dan Kristen. Pola ini digunakan oleh Lasykar Jihad untuk "membenarkan" kehadiran mereka di Poso. Lasykar Jihad mengabaikan analisis non-religius dalam melihat konflik Poso.[1] Bahkan mereka mengkritik wacana yang menghindarkan konflik Poso dari pembacaan konflik agama. Mengapa? Tentu saja karena Lasykar Jihad memiliki agenda keislaman yang lebih ketat dibandingkan agenda nasional. Mereka membutuhkan legitimasi wacana untuk membenarkan kehadiran mereka.

Padahal, membaca kasus Poso tidak sesederhana yang dibayangkan oleh lasykar Jihad. Konflik Poso muncul dari percampuran antara pengaturan ekonomi, politik, dan agama yang gagal. Disparitas ekonomi dan politik menjadi latar utama dan identitas agama adalah panggungnya. Tentu saja konflik agama tidak bisa diabaikan begitu saja.

---

[1] Lasykar Jihad bukan satu-satunya milisi sipil muslim yang bergerak di Poso. Ada beberapa group milisi sipil muslim lain seperti Lasykar Mujahidin, yang juga terlibat dalam konflik Ambon. Mereka membentuk beberapa faksi seperti Lasykar Jundullah, Lasykar Hizbullah, dan Front Perjuangan Umat Islam Poso. Mereka berhasil merekrut anak muda Poso sebagai jihadis. Sisa-sisa kelompok ini sekarang menjadi bagian dari MIT-nya Santoso. Sedangkan dari pihak Kristen, selain Barigade Manguni ada pula milisi sipil yang dikenal dengan nama Lasykar Kristus yang terbagi dalam pasukan macan dn pasukan kelelawar. Ada juga Ansimar (Anak Muda Sintuwu Maroso).

Bagaimana pun juga, *setting* konflik ini terdesaian dalam pola agama dan juga demografis, lokal dan pendatang. Tetapi kehadiran para milisi sipil baik dari Islam maupun Kristen membuat konflik Poso terlihat sebagai perang agama belaka.

Bisa dikatakan, kehadiran para milisi sipil ini yang membuat eskalasi konflik semakin meluas. Tentu bukan hanya dari sisi umat Islam, milisi sipil yang muncul dari Kristen seperti Barigade Manguni jelas berangkat dari perspektif yang sama. Mereka orang luar yang memahami dan mereduksi konflik komunal ke dalam satu perspektif saja, agama! Mereka datang untuk membela sesamanya dan membunuh orang yang dianggap berbeda. Pesantren, masjid, kyai, gereja, pendeta menjadi sasaran simbolik untuk 'memelihara' dan membenarkan perspektif mereka tentang perang agama ini.

Efek buruk dari konflik Poso hingga saat ini adalah tetap lestarinya milisi sipil khususnya dari kalangan Islam dengan munculnya MIT (Mujahidin Indonesia Timur) pimpinan Santoso. Siapa Santoso? Ada dua versi yang ditemukan. Salah satu sumber menyebutkan kalau Santoso adalah orang Poso. Dulu bekerja sebagai penjual buku-buku agama di Poso. Ia adalah salah seorang rekrutan milisi sipil yang ada di Poso yang dikenal dengan istilah 'anak bebek'. Ketika Poso masih membara ada ratusan remaja muslim Poso yang menjadi 'anak bebek'. Mereka bergabung dengan milisi sipil dengan berbagai motif. Motif yang terbesar adalah balas dendam karena kerabat mereka terbunuh dalam tragedi Poso. Ada juga karena terdesak oleh keadaan dan tidak bisa menghindar dari konflik.[2] Santoso menghilang beberapa tahun kemudian

---

[2] Salah seorang mantan pelaku konflik Poso, Rafiq Syamsuddin mengakui kalau dia menjadi milisi sipil karena terdesak oleh kondisi.

muncul dan menjadikan penembakan polisi di depan Kantor BCA tahun 2011 di Palu sebagai percobaan pertama. Sejak itulah, Santoso menjadi buron pihak kepolisian (wawancara dengan RS, seorang wartawan media nasional).

Sumber lain menyebutkan kalau Santoso adalah orang Jawa yang merupakan generasi pertama dari jaringan kelompok lama dari sel Abu Umar dan Noordin M. Top. Peranannya dalam jaring kelompok teroris adalah sebagai pemimpin dan instruktur dalam pelatihan paramiliter di beberapa daerah, termasuk pelatihan kelompok Farhan di jalur pendakian Gunung Merbabu Jawa Tengah. Saat ini MIT merupakan sentral dari gerakan jaringan kelompok teroris di Indonesia. Hampir semua gerakan teroris merupakan jaringan pendukung MIT. Selain di Poso jaringan MIT tersebar di Jawa, Sumatera dan NTB, sehingga menjadikan MIT sebagai pengganti pemegang kendali perjuangan yang sebelumnya didominasi jaringan Solo (Fajar Purwadidada, 2014).

MIT adalah anak kandung dari konflik Poso. Spirit konflik Poso menyebabkan wilayah ini dijadikan sebagai sentral perjuangan kaum jihadis pasca konflik komunal. Santoso yang sebelumnya bukan siapa-siapa berhasil mengkonsolidasi perjuangan kaum jihadis untuk tetap melakukan perlawanan khususnya kepada Densus 88. Setelah beberapa gembong konflik dari dua pihak sudah ditangkap dan diadili, konflik Poso mulai mereda. Konflik komunal pelan-pelan menurun. Tetapi, hal itu tidak menyurutkan semangat jihadis dari MIT untuk tetap eksis.

Dia tidak punya pilihan lain selain ikut berjuang bersama lasykar yang ada. Saat itu, dia menjadi perakit bom. Setelah keluar dari penjara tahun 2006, dia menginisiasi pembentukan Radio perdamaian yang dikenal dengan nama Radio Matahari (dikutip dari jppn.com).

Hutan Poso yang lebat menjadi tempat yang sangat tepat untuk melakukan taktik gerilya. Sesekali keluar melakukan teror lalu berlari ke hutan untuk berlindung. Seperti yang ditulis oleh Fajar Purwadidada (2014):

> Sejarah konflik komunal menjadikan Poso sebagai tempat strategis bagi para teroris untuk mengembangkan jaringannya. Perkembangan teroris di kota Poso sangat besar karena didukung oleh berbagai macam komponen sehingga jaringan teroris di Poso ini semakin lama semakin kuat. Poso di jadikan pusat gerakan karena memiliki medan yang sangat mendukung untuk dijadikan tempat pelatihan. Banyak wilayah pegunungan, lembah dan hutan yang strategis untuk latihan dan persembunyian. Poso dijadikan sebagai "tanah suci" atau "tanah jihad" bagi kelompok teroris. Anggota teroris belum dikatakan berjihad kalau belum menginjakkan kakinya di tanah Poso. Keberadaan mereka di Poso dapat bertahan lama sejak dari konflik hingga kini. Pada masa konflik umat Muslim banyak dibantu oleh pejuang Muslim (Mujahidin) yang berasal dari luar untuk memerangi musuh mereka (Nasrani). Kemudian pejuang Muslim yang berasal dari wilayah luar Poso tersebut dianggap sebagai pahlawan oleh para kelompok Muslim di Poso. Hal itu yang dimanfaatkan oleh para teroris untuk menjadikan Poso sebagai "tanah suci" atau tanah idaman mereka dalam melakukan doktrin jihad. Selain itu di Poso masih banyak senior-senior jihadis yang dianggap memiliki pengalaman-pengalaman, seperti merakit bom dan membuat senjata.

MIT menjadikan pihak kepolisian – khususnya Densus 88 - sebagai musuh utama. Biasanya teror yang mereka lakukan berkaitan dengan penangkapan atau pembunuhan anggota kelompok mereka oleh Densus 88.

Pembunuhan Fadli misalnya sebagai bentuk balas dendam terhadap kematian dua orang rekan mereka sebelumnya. Fadli dianggap sebagai orang yang mensuplai informasi kepada Densus 88 sehingga dua orang anggota MIT itu tertembak.

Genderang perang terhadap Densus 88 sudah mulai dikumandangkan oleh Santoso sejak tahun 2013. Diawali dari kematian seorang anggota MIT yang bernama Nrudin di Poso pada bulan Juli 2013. Melalui video yang diunggah di You Tube, Santoso dengan terang benderang menantang Densus 88 dan mengobarkan semangat perlawanan terhadap Densus. Pesan itu berbunyi:

> *Antum (kalian) tidak perlu ragu ketika menghadapi Densus 88. Antum harus semangat ... Antum telah merasakan bagaimana jahatnya Densus 88 kepada umatnya. Antum tahu Densus 88 membantai saudara-saudara kita di Sulawesi".*

Memang, ada sisi baik dari konflik antara MIT-Densus 88. Masyarakat umum tidak lagi mudah terjebak dalam konflik komunal. Seluruh gerakan teror yang dilakukan oleh MIT tidak berhasil memancing reaksi publik karena publik sadar kalau MIT sedang membidik Densus 88. Artinya, sudah terjadi pergeseran wacana konflik. Masyarakat umum Poso baik Islam maupun Kristen tidak mudah lagi terjebak dalam upaya 'memancing konflik' yang dilakukan oleh kelompok MIT.

Akan tetapi kehadiran Santoso dan MIT-nya akan membuat suasana terus menerus dalam situasi yang tidak kondusif, dan pada titik tertentu mudah memancing konflik baru. Gerakan bawah tanah terorisme pimpinan Santoso atau MIT (Mujahidin Indonesia Timur) yang sewaktu-waktu muncul dan 'menggoda' ketahanan kultural masyarakat Sulawesi Tengah. Kampanye Santoso

yang memberi efek kejut dengan menyerang pos polisi secara gradual terjadi sejak tahun 2011 sampai Oktober 2014. Para pelaku kekerasan bersenjata di Poso masih muncul. Misalnya pembunuhan seorang petani bernama Fadli di Poso di halaman rumahnya dilakukan oleh sekelompok orang bersenjata api laras panjang dan berbaju loreng dengan cara yang sadis, dengan kepala yang hampir putus karena digorok. Kelompok MIT mengakui aksi pembunuhan terhadap Fadli adalah bagian dari "kerja" mereka. Fadli dibunuh sebagai aksi balasan atas terbunuhnya rekan mereka Akhi Fani dan Akhi Handzollah Abu Ayman oleh Densus 88. Fadli menjadi sasaran mereka karena Fadli adalah informan Densus 88.[3] Dalam rilis sebuah situs internet, pihak MIT menyatakan:

> *Bersama pernyataan ini, kami menyampaikan bahwa kami telah menyembelih seorang warga desa Padang Lembara, yaitu Fadli dengan izin Allah. Dikarenakan*

---

[3] Sekelumit fakta penting publik perlu tahu; Fadli, Handzalah (Hendro) dan Fani plus Evan (Ipar dari Fadli) adalah satu grup. Pada awalnya mereka dalam lingkaran MIT, dan Fani seorang tukang kayu yang tinggalnya di lorong jati tewas bersama Hendro (Handzalah) saat kontak penggrebekan yang dilakukan oleh Densus 88 di Taunca Poso beberapa bulan lalu. Peran Fani adalah kurir, berbeda dengan Handzalah yang berperan ganda sebagai kurir dan menangangi urusan propaganda (IT). Berbeda nasibnya dengan Fadli, Evan sampai kini lenyap tanpa jejak disinyalir ada yang mengamankan. Tapi tidak untuk Fadli, ia sempat ditangkap oleh Densus-88 kemudian dilepas dan disinyalir dijadikan sebagai "panah" pihak Densus-88 dengan sejumlah kompensasi (uang). Dari hasil penggalangan terhadap Fadli inilah pihak Densus-88 bisa menjejak posisi Hendro dan Fani saat di Taucan Poso. Inilah alasan utama kenapa Fadli jadi target kelompok MIT dibawah komandan Santoso dan supervisernya Daeng Koro (disertir Kostrad). Fadli dicap sebagai pengkhianat dan bekerja untuk aparat Densus-88. – dikutip dari makalah Harits Abu Ulya, IS-ISIS dan Terorisme menyandera Poso (Arrahmah. Com, diakses tanggal 06 Oktober 2014).

perbuatan kafirnya yaitu memberikan informasi yang mengarahkan Densus 88 laknatullah 'alaihim pada penyerangan terhadap Ikhwah kami. Yang menyebabkan terbunuhnya dua Ikhwah diantara Mujahid terbaik yang dimiliki ummat ini, Akhi Fani dan Akhi Handzolah Abu Ayman, taqabbalahumaallah.

Agar menjadi peringatan pada setiap penduduk dan masyarakat yang mengaku sipil. Agar menjadi peringatan pada setiap agen-agen penjahat yang mengaku muslim. Agar menjadi peringatan pada setiap orang yang memilih bergabung bersama barisan Densus 88 laknatullah 'alaihim. Bahwa darah saudara kami tidak akan mengalir sia-sia.

Kepada masyarakat yang selama ini telah terlibat aktif membantu Densus 88 laknatullah'alaihim dalam memerangi kami, baik dengan memberikan informasi, menjadi penunjuk jalan mereka, menyebarkan issu, dan segala bentuk kerjasama lainnya, kami himbau dan peringatkan dengan tegas agar bertaubat dan berhenti dari kemurtadan tersebut.

Sesungguhnya mereka (Densus 88) pasti menawarkan kepada kalian imbalan harta dunia, sekeping harta dunia, maka fikirkanlah baik-baik sebelum menerimanya. Fikirkanlah anak-anak kalian yang akan terlantar menjadi yatim, fikirkanlah istri-istri kalian yang akan menjanda, fikirkanlah kebun kalian yang akan terbengkalai dan yang terpenting fikirkanlah ancaman Allah di Neraka Jahannam selamanya. Karena kami akan datang untuk menyembelih kalian, menyembelih kalian!!!!!

Peperangan ini masih antara kami dengan ujung tombak Pemerintah Murtad Densus 88 laknatullah 'alaihim. Maka menjauhlah dan hendaknya setiap orang yang tidak terlibat tidak perlu melibatkan diri.

Semoga peringatan ini dapat dimengerti oleh setiap orang dan sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang mau berfikir.
Wassalamu'alaikum Wa Rahmatullah Wa Barakatuh

Camp Handzalah AsSyahid

Padang Lembara, 19 sepetember 2014
(Dikutip dari Arrahmah.com, Jumat 19 September 2014).

Kehadiran MIT yang secara terang benderang melakukan 'perang' terbuka dengan Densus 88 menjadikan Poso dan Sulawesi Tengah secara umum selalu berpotensi konflik. Masa depan perdamaian yang diimpikan sebagian besar masyarakat Poso akan selalu terganggu dengan konflik 'permanen' antara MIT dan Densus 88. Artinya, dengan masih adanya kelompok MIT, Poso akan selalu masuk dalam ancaman konflik. Ketidakmampuan pihak kepolisian dalam hal ini Densus 88 membekuk Santoso dan melumpuhkan gerakan MIT menjadi faktor penting bagi masa depan gerakan terorisme di sana.

Kematian Santoso menjadi titik baru gerakan radikalisme agama di Sulawesi Tengah. Keberhasilan Pasukan gabungan TNI-POLRI dalam melumpuhkan gerakan gerilya Santoso dengan pasukan MIT (Majelis Indonesia Timur) menjadi harapan atas mengikisnya gerakan terorisme di Sulawesi Tengah. Memang, harus diakui bahwa tidak semua anggota pasukan Santoso tertangkap atau menyerah. Artinya, bibit gerakan MIT belum sepenuhnya bisa dikatakan habis. Namun, melihat lemahnya kekuatan pasukan MIT pasca kematian Santoso bisa dikatakan kekuatan gerakan ini sudah tidak lagi mengkhawatirkan.

C. Peledakan Bom di Makassar

Peledakan bom yang terjadi di Mall Ratu Indah, tepatnya di restoran cepat saja MC Donald tahun 2000 menjadi titik awal munculnya kelompok yang disebut teroris di Makassar. Muchtar Dg Lau dan Agung Hamid disebut sebagai jaringan terorisme di Indonesia yang secara gradual melakukan kegiatan teror di seluruh wilayah di Indonesia.

Peristiwa bom lain terjadi pada tahun 2004 di bukit Sampoddo, Kota Palopo. Sampoddo adalah daerah wisata lokal tempat para pemuda Palopo menghabiskan malam minggu sambil bakar jagung. Pelaku bom Sampoddo pun dianggap sebagai bagian dari gerakan terorisme yang ada kaitannya dengan peristiwa bom MC Donald beberapa tahun sebelumnya.

Kasus bom yang terkait dengan gerakan terorisme di Sulawesi Selatan secara umum tidak pernah lagi terjadi pasca bom Sampoddo. Jaringan teroris di Kota Makassar tampaknya tidak tumbuh lagi setelah Muchtar Dg Lau dan Agung Hamid tertangkap tahun 2001. Meski demikian, perburuan terhadap jaringan teroris di Sulawesi Selatan tetap dilakukan. Penembakan tiga orang terduga teroris yang selama ini bersembunyi di hutan Enrekang di Biringkanayya (tepatnya di rumah sakit Daya) pada awal tahun 2013 menjadi peristiwa terakhir yang berkaitan dengan gerakan terorisme.

D. Bom Gereja Pasca Pilkada Sulsel Tahun 2013

Kasus peledakan bom molotov lima gereja di Kota Makassar pada tanggal 10 dan 14 Pebruari 2013 menimbulkan polemik di kalangan masyarakat. Ada

banyak asumsi atau lebih tepatnya gosip yang berkembang, baik di media massa maupun obrolan di warung-warung kopi. Kasus peledakan ini dikaitkan dengan situasi perpolitikan di Makassar pasca pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang memenangkan pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang untuk kedua kalinya. Karena yang dibom adalah gereja, sebagian publik mengaitkan dengan kelompok terorisme yang dipercaya masih memiliki akar yang cukup kuat di tanah air termasuk di Sulawesi Selatan.

Asumsi Prof. Qasim Matthar (Guru Besar UIN Alauddin Makassar) di salah satu media lokal cukup menarik untuk dijadikan sebagai alas pijak (Tribun Timur, 15/2/2013). Ia mengasumsikan ada empat kemungkinan motif dibalik kasus bom gereja tersebut. *Pertama*, akibat dari pilkada. *Kedua*, bagian dari terorisme. *Ketiga*, kelompok ketiga yang ingin mengacaukan situasi. *Keempat*, kelompok yang tidak suka dengan agama.

Bagian ketiga dan keempat dari analisis tersebut sangat lemah. Jika ada kelompok yang ingin mengacaukan situasi, maka sasarannya salah. Gereja bukan pemicu konflik karena dimiliki oleh kelompok yang minoritas. Secara statistik jumlah umat Kristiani "hanya" 8,5% dari total penduduk kota Makassar. Dengan jumlah yang sedikit, dibutuhkan keberanian lebih untuk melakukan reaksi yang destruktif. Mungkin eskalasinya sedikit berbeda kalau kasus ini terjadi di Toraja, basis Umat Kristiani di Sulawesi Selatan.

Pdt. Untung SK Wijaya (Ketua PGI Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat) secara samar merefleksikan hal tersebut. Beliau berupaya sedemikian keras meredam "amarah" kelompok Kristiani. Misalnya, dengan tidak menghiraukan keinginan beberapa pendeta yang ingin melakukan konsolidasi. Alasannya jelas. Konsolidasi

internal dapat dibaca oleh (terutama) media massa sebagai bagian dari perlawanan.

Posisi sebagai kelompok minoritas “mendorong” para pendeta untuk tidak melakukan “gesture” perlawanan yang berlebihan. Maka, upaya paling rasional yang dilakukan adalah meminta pihak kepolisian untuk secara tegas dan cepat mengusut pelaku.

Analisis yang mengaitkan gerakan ini sebagai bagian dari gerakan terorisme cukup menarik. Pada Bulan Januari 2013, pihak kepolisian berhasil menangkap beberapa orang yang diduga sebagai kelompok teroris di Enrekang, dan dua orang lagi ditembak mati di masjid Rumah Sakit Umum Daya, Kota Makassar. Ini menunjukkan bahwa kelompok teroris masih ada di wilayah Sulawesi Selatan. Bukan tidak mungkin, kelompok penyerang gereja ini adalah upaya untuk menyatakan kepada publik bahwa mereka “masih ada” atau setidaknya sebagai upaya “balasan” terhadap penembakan salah seorang rekan mereka.

Akan tetapi, seluruh informan yang kami temui meragukan keterkaitan peristiwa ini dengan gerakan terorisme, termasuk seorang intelejen kepolisian. Ada empat alasannya; *Pertama*. Bom yang digunakan hanya bom molotov, bukan bom rakitan sebagaimana yang selama ini sering digunakan oleh jaringan teroris. *Kedua*, waktu. Para teroris biasanya menyerang sasarannya pada saat ramai. Siang hari dan malam di bawah pukul 22.00. Sedangkan lima kali penyerangan bom ini dilakukan antara jam 02.00-04.00 dini hari waktu setempat. *Ketiga*, Densus 88 sebagai satuan anti teror tidak diturunkan secara intensif. *Keempat*, reaksi penangan yang cenderung lambat. Sejak tanggal 10 Februari (peristiwa pertama) sampai saat ini pihak kepolisian belum menunjukkan hasil. Bahkan kasus ini cenderung menguap begitu saja. Berbeda

dengan penanganan kasus bom Mall Ratu Indah tahun 2001. Hanya enam jam setelah peristiwa peledakan, seorang pelaku telah berhasil ditangkap.

Asumsi atau analisa yang paling banyak mendapatkan "pembenaran" adalah keterkaitan dengan hasil pilkada pada tanggal 22 Januari 2013 yang lalu. Sasaran gereja yang diserang menunjukkan pesan tertentu. Empat dari lima gereja berasal dari denominasi gereja Toraja. Satu gereja lainnya adalah gereja Kristen yang jemaatnya sebagian besar dari kalangan Tionghoa. Kekecewaan dari tim sukses dari salah satu kandidat tertentu karena "kesepakatan" politik dengan kedua etnik di atas dilanggar. Sebelum kasus ini, sudah pernah terjadi kasus penyerangan rumah seorang warga Tionghoa yang dilakukan oleh tim sukses dari kelompok tertentu pada akhir Januari 2013.

Pendeta Untung SK Wijaya memastikan kalau kasus bom ini tidak akan mempengaruhi pola relasi kerukunan antar umat beragama. Ini karena, Pemerintah dan FKUB memberi respon cepat dengan menggelar pertemuan-pertemuan untuk membicarakan hal tersebut. Pencegahan dari kepolisian juga dirasakan cukup baik (meski penanganan kasus dinilai lamban). Pihak pemerintah kota sudah memerintahkan kepada setiap kelurahan untuk mengaktifkan kembali Pam

Swakarsa dengan sistem ronda. Selain itu, PGI juga secara internal terus menerus berupaya menjelaskan kepada warganya kalau peristiwa ini tidak terkait dengan hubungan antar agama yang memburuk.

Hanya saja, peristiwa ini bisa memberi imajinasi yang buruk bagi warga Kristiani apabila tidak terungkap dengan jelas siapa pelaku dan apa motivasinya. Asumsi-asumsi yang berkembang bisa menjadi liar dan memperburuk cara pandang antar umat beragama.

Kecurigaan antar kelompok agama bisa muncul. Apapun itu, yang diserang adalah rumah ibadah. Ruang untuk menafsirkan kasus ini sangat luas, termasuk dalam konteks relasi antar umat beragama.

E. Demonstrasi di Gereja Toraja[4]

Pada September 2016**,** salah satu kelompok Islam "garis keras", Front Pembela Islam, berdasarkan informasi yang dilansir media lokal, menyerbu Gereja Toraja Bontomarannu di Jalan Cenderawasih, Makassar. Ormas yang terbentuk di era reformasi ini menuding, gereja di Jalan Cenderawasih tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB), serta memalsukan tanda tangan jamaah gereja dan tanda tangan persetujuan warga di sekitar gereja (Wawancara, Panglima FPI Makassar, Abdur Rahman, 11 Oktober 2016, di Makassar).

Sementara itu, pada waktu yang berbeda, Gereja Toraja di Jalan Bawakaraeng dilempari batu orang tak dikenal ketika jemaat tengah melaksanakan ibadah Minggu, pukul 21.30 Wita, 25 September 2016. Sebanyak 15 orang berpakaian hitam-hitam mendatangi gereja pada saat jemaat tengah beribadah. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Namun, aparat keamanan belum menemukan pelaku dari pelemparan batu yang nyaris memecahkan kaca jendela gereja tersebut.

Kendati aksi tersebut tidak sampai menimbulkan korban jiwa, namun informasi penyerbuan rumah ibadat ini menyebabkan ketegangan di kalangan umat Kristen. Karena itu, sebelum terjadi peristiwa susulan yang dapat mengancam kerukunan antarumat beragama di Makassar,

---

[4] Data tentang ini diambil dari penelitian Syamsurijal dan Irfan Syuhudi (2016).

pemerintah langsung terjun ke lapangan. Wali Kota Makassar, Ramadani "Danny" Pomanto, langsung mempertemukan pengurus Gereja Toraja dengan FPI, yang ikut dihadiri Tripika, Danramil, dan Kapolsek Mamajang. Pertemuan ini menghasilkan, antara lain, kedua pihak sepakat untuk bersama-sama menjaga keamanan tetap aman, dan tidak terpancing provokasi yang bisa menyebabkan perpecahan antara sesama warga, dan pembangunan gereja akan dievalusi kembali. Pemerintah berharap kejadian ini tidak terulang kembali, dan mengajak semua warga untuk bersama-sama menjaga keamanan Makassar.

Selain pemerintah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan, organisasi masyarakat (ormas) Islam, dan aktivis mahasiswa Kristen, langsung bersuara. Semua sepakat mengecam aksi yang mengancam kerukunan antarumat beragama di kota ini. Ketua MUI Sulsel, KH Sanusi Baco, misalkan, mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi. Seluruh umat manusia harus saling menjaga satu sama lain, kendati terdapat perbedaan agama. "Muslim yang hakiki harus menjaga keamanan antar umat beragama. Meski terdapat perbedaan agama, kita harus saling menjaganya agar tidak ada konflik yang terjadi di masyarakat," kata Sanusi Baco, seperti dikutip di http://news.rakyatku.com/read/21944/2016/09/25/-meski-beda-agama-kita-tetap-satu-, yang diakses pada 14 Oktober 2016. Dari kalangan ormas Islam, Ketua Muhammadiyah Sulsel, Ambo Asse, seperti dilansir di http:// news.rakyatku.com/read/21952/2016/09/26/ini - tanggapan- muhammadiyah-terkait-kisruh-gereja-toraja, pada 14 Oktober 2016, menyatakan, penyerangan terhadap rumah ibadat tak dibenarkan dalam ajaran agama. Bahkan, ia menganggap hal tersebut melanggar aturan.

Panglima FPI Makassar, Abdur Rahman, menjelaskan, sebelum mendatangi gereja di Jalan Cenderawasih, beberapa warga mendatangi markasnya di Jalan Sungai Limboto, Makassar. Warga melapor, bahwa bunyi suara yang ditim- bulkan dari pembangunan gereja itu dianggap mengganggu penduduk yang tinggal di sekitar gereja. Ketika warga mendatangi pengurus gereja dan mengeluhkan bunyi suara-suara itu, pengurus gereja malah dinilai bersikap arogan. Hal inilah yang membuat warga kecewa dan kemudian mengadu ke FPI. Atas laporan warga, beberapa anggota FPI kemudian mendatangi gereja tersebut.

Menurut Abdur Rahman, meski yang terlibat dalam aksi secara formal adalah FPI, namun tidak berarti bahwa tidak ada kelompok anak muda terdidik dalam aksi ini. FPI menurutnya juga di dukung oleh mahasiswa-mhasiswa muslim dari beberapa peguruan tinggi. Kelompok mahasiswa ini adalah mereka yang menjadi bagian dari sayap FPI di kampus yang bernama Front Mahasiswa Pembela Islam.

F. Gerakan Anti Syiah[5]

Beberapa organisasi Islam, seperti kelompok Wahdah Islamiyah dan Salafi, yang tergabung di dalam Forum Umat Islam (FUI) di Makassar, memusuhi dan menolak kehadiran kelompok Syiah di Tanah Sulsel. Belakangan, muncul lagi kelompok yang terang-terangan membenci kelompok Syiah di Makassar, yakni Laskar Rasulullah.

Kebencian mereka terhadap Syiah tidak hanya ditunjukkan secara verbal, melainkan juga melalui ruang

[5] Data tentang ini disadur dari penelitian Syamsurijal dan M. Irfan Syuhudi (2016)

usaha. Ketika berdiskusi dengan Laskar Rasulullah di *homebase*-nya, di Warung Kopi (warkop) di Jalan Sungai Limboto, Makassar, kelihatan sekali kalau Laskar Rasulullah sangat membenci Syiah. Pada setiap meja tamu sengaja ditempel stiker Anti Syiah, sehingga siapa pun yang duduk di situ pasti akan melihat jelas stiker tersebut. Di beberapa dinding tembok dan etalase kaca juga ditempeli stiker Anti Syiah. Menariknya, warkop ini terletak hanya beberapa meter dari Sekretariat FPI Makassar. Sementara itu, di Sekretariat FPI juga dipasangi baliho yang menunjukkan kebencian mereka terhadap Syiah.

Menurut Panglima Laskar Rasulullah, Arjuna, mereka membenci Syiah, karena menghina dan mengkafir-kafirkan tiga sahabat dekat rasulullah, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Usman bin Affan. Hanya Ali bin Abu Talib saja (beserta keturunannya) yang dipandang sebagai sahabat dekat nabi, dan posisinya sangat istimewa di mata kelompok Syiah. Dalam perspektif Laskar Rasulullah, Syiah itu sesat dan tidak termasuk ke dalam golongan Islam. Meskipun di dalam kelompok Syiah terdapat beragam aliran yang berbeda, dan di antara aliran tersebut ada juga yang tidak mengkafir-kafirkan Abu Bakar, Umar, dan Usman, namun mereka tetap membencinya. Untuk menambah wawasan dan referensi terhadap Syiah, mereka sering merujuk kepada website tertentu dan membaca beberapa buku-buku terkait Syiah. Dari sinilah pengetahuan Laskar Rasulullah tentang "keburukan" Syiah terkuak.

"Kami sangat mencintai Rasulullah, dan kami tidak ingin ada orang atau kelompok yang menghina rasulullah. Syiah itu jelas-jelas menghina rasulullah, karena mereka memandang maqam Ali bin Abu Talib lebih tinggi dari Abu Bakar, Umar, dan Usman. Padahal, di mata rasulullah, tiga sahabat ini masing-masing memiliki keistimewaan," kata

Panglima Akomodasi Laskar Rasulullah, Asrul, dengan suara berapi- api.

Bukti kebencian beberapa kelompok radikal fundamentalis di Makassar terhadap kelompok Syiah adalah dengan mendatangi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel sebelum 1 Muharram. Mereka mendesak Ketua MUI Sulsel, KH. Sanusi Baco, menandatangani pernyataan sikap mereka untuk melarang kelompok Syiah memperingati perayaan As-Syura. Sempat ada yang merekam kedatangan FUI, FPI, dan Laskar Rasulullah ke kantor MUI Sulsel, dan kemudian rekaman ini beredar luas di media sosial. Dari video yang berlangsung beberapa menit itu, puluhan orang duduk satu meja dengan KH. Sanusi Baco, dan ada juga yang berdiri. Orang- orang ini ada yang pakai jubah dan pakaian biasa. Dalam tayangan video terlihat, mereka seperti tidak menghargai KH Sanusi Baco sebagai seorang ulama terpandang. Selama perbincangan, Kyai Sanusi tampak mendapat intimidasi dan kekerasan semiotik. Di antara mereka ada yang bersuara keras ketika berbicara, dan ada juga yang mondar-mandir di dekat KH Sanusi Baco.

Setiap tahun, kelompok Syiah selalu memperingati perayaan As-Syura di Makassar. Secara hukum, apa yang dilaksanakan kelompok Syiah ini sebenarnya bersifat legal, karena telah memperoleh izin dari pemerintah lokal dan pihak keamanan setempat. Perayaan As-Syura biasanya diadakan di gedung dengan mendatangkan tokoh nasional Syiah. Salah satu yang pernah ke Makassar dan berceramah adalah pentolan Syiah Indonesia, Dr. Jalaluddin Rahmat, yang di kalangan kelompok Syiah Indonesia, akrab disapa Kang Jalal.

Dari beberapa catatan, kelompok Syiah acap kali mendapat perlakuan kurang simpatik dan tindakan kekerasan dari kelompok radikal-fundamentalis di

Makassar. Kegiatan yang dilakukan Syiah di depan publik selalu mendapat gangguan dari kelompok ini. Misalkan, setiap kali mengadakan peringatan Syura di Makassar, kelompok radikal- fundamentalis ini hampir dipastikan selalu saja bermaksud mengacaukan dan membubarkan kegiatan tersebut. Pada 2013, misalnya, orang Syiah diserang ketika menggelar peringatan As-Syura di Wisma Darussalam, Makassar. Di sela- sela acara, beberapa orang berusaha mengacaukan kegiatan dengan mendesak masuk ke dalam gedung. Beberapa orang Syiah mengaku dikejar-kejar dan ada juga yang bahkan kena "bogem mentah" dari orang-orang yang tiba-tiba datang menyerang itu. Selanjutnya, orang Syiah lagi-lagi mendapat teror dan aksi kekerasan saat menggelar peringatan As-Syura di Gedung Balai Prajurit (Gedung Manunggal) pada 2015. Di tengah kegiatan berlangsung, ratusan orang melakukan demo di depan gedung. Beruntung, aparat keamanan berlaku sigap, sehingga tidak terjadi perkelahian dan pertumpahan darah. Kemudian, pada September 2016, ratusan orang yang tergabung di dalam FUI serta FPI melakukan konvoi di beberapa ruas jalan menolak kehadiran Syiah di Makassar. Mereka konvoi menggunakan sepeda motor, mobil, serta membawa spanduk yang intinya menolak Syiah di Indonesia dan di Makassar. Di sepanjang jalan, beberapa tokoh dari kelompok ini melakukan orasi. Puncaknya, kelompok ini mendatangi kantor MUI Sulsel dan mendesak Ketua KH Sanusi Baco untuk menandatangani pelarangan peringatan As-Syura yang akan dilakukan kelompok Syiah.

Aksi penolakan terhadap kelompok Syiah di Makassar sebenarnya telah berlangsung lama. Sejak kelompok ini diketahui menjejakkan kakinya di Makassar beberapa tahun lalu, sejak itu pula beberapa kelompok Islam radikal-fundamentalis mulai melakukan aksi penolakan. Termasuk,

menolak kehadiran kelompok mahasiswa Syiah yang tergabung di dalam Ikatan Jamaah Ahlul Bait (Ijabi). Menurut salah seorang tokoh muda Syiah di Makassar, aktor yang seringkali berada di belakang kebencian yang kemudian berlanjut terhadap aksi-aksi demonstrasi Syiah di Makassar adalah Ustadz Said Samad. Termasuk aksi demonstrasi yang berlangsung pada September 2016. Ustadz Said Samad adalah tokoh Wahdah Islamiyah di Makassar dan juga Ketua Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam Indonesia Timur. Pada beberapa kesempatan, Ustadz Said Samad, ketika diundang pada kegiatan workshop dan seminar hasil penelitian, ia seringkali “menyerang” kelompok Syiah, meskipun topic yang dibahas pada acara tersebut bukanlah terkait Syiah.

G. Kasus Demonstrasi terhadap Masjid Al-Khairiyah, di Eks Kampung Texas, Kota Manado

Kampung Texas merupakan sebuah perkampungan yang berada di Pesisir Utara Kota manado yang berhadapan langsung dengan Samudera Pasifik. Perkampungan ini mulai dihuni pada kisaran tahun 1940-an oleh para pendatang yang berasal dari Gorontalo, Sangir, Sulawesi Selatan, dan daerah lainnya. Pada tahun 1960-an pasca pemberontakan Permesta (Perjuangan rakyat Semesta), Kampung ini semakin ramai didatangi oleh pemukim yang tinggal di lahan tanah milik negara. Kampung Texas terletak di Kelurahan Wenang Utara Kecamatan Wenang, sebagian besar penduduk adalah muslim. Demi memenuhi kebutuhan ibadat umat muslim yang tinggal di Kampung tersebut, maka pada tahun 1968 di masa kepemimpinan walikotamadya Manado Rauf Mo’o didirikanlah sebuah mesjid yang kemudian diberi nama mesjid al-Khairiyah. Seluruh kampung Texas yang merupakan pemukiman

padat penduduk termasuk Mesjid Al-Khairiyah berlokasi di atas lahan tanah milik negara.

Pada awal dibangunnya, Mesjid Al-Khairiyah masih berupa bangunan mesjid kecil dengan luas bangunan 10x10 meter berbahan kayu dan hanya satu lantai. Seiring dengan perkembangan penduduk maka sedikit demi sedikit dilakukan renovasi atas bangunan Mesjid Al-Khairiyah hingga seluas 16x20 meter dengan bangunan permanen dengan tinggi bangunan 2 lantai. Menurut Mursyid, mantan Panglima Brigade Mesjid Sulawesi Utara yang merupakan penduduk yang lahir dan besar di Kampung Texas, Mesjid Al-Khairiyah menjadi pusat kegiatan peribadatan dan keagamaan bagi umat Islam di Kampung Texas. Mesjid tersebut merupakan satu- satunya bangunan rumah ibadat yang berdiri di Kampung Texas, meski di Kampung Texas juga bermukim sebagian penduduk yang beragama Kristen, namun di kampung tersebut tidak ada bangunan gereja maupun rumah ibadat lainnya.

Pada awal tahun 2000-an dilakukan reklamasi laut di sekitar lokasi Kampung Texas yang belakangan menjadi kawasan Boulevard yang merupakan pusat kegiatan ekonomi dan bisnis di Kota Manado. Pada lokasi hasil reklamasi tersebut berdiri berbagai sentra bisnis seperti ruko, hotel, bahkan 3 mall besar berdiri di kawasan tersebut, pada tahun 2015 diresmikan jembatan Sukarno yang saat ini menjadi landmark baru Kota Manado. Akhirnya, kawasan Kampung Texas yang awalnya berada di pinggir kota berubah menjadi di pusat kota. Oleh pemerintah Kota Manado yang pada saat itu menjadi walikota adalah Jimmy Rimbarogi, kawasan pemukiman di sekitar pantai dilakukan penggusuran dan penduduknya direlokasi ke tempat lain termasuk Kampung Texas. Akibat penggusuran tersebut, seluruh bangunan yang ada di

Kampung tersebut dibongkar, kecuali bangunan Mesjid Al-Khairiyah. Oleh penduduk setempat tidak dibongkarnya bangunan Mesjid Al-Khairiyah merupakan hasil negosiasi mereka dengan pemerintah kota. Mereka bersedia digusur dengan catatan Mesjid Al-Khairiyah tidak dibongkar dan tetap secara fungsional digunakan sebagai tempat ibadat bagi umat Islam.

Meski tidak ada lagi penduduk yang bermukim di sekitaran mesjid tersebut, namun mesjid tetap fungsional digunakan sebagai tempat ibadat oleh para karyawan dan pedagang serta musafir yang lewat di kawasan Boulevard. Ketika peneliti datang ke mesjid tersebut dan sempat menunaikan shalat Ashar, tampak jamaah yang shalat cukup banyak, bahkan ketika shalat Ashar sudah selesai, masih banyak umat Islam yang datang silih berganti untuk singgah menunaikan shalat. Hingga pukul 17.00 WITA peneliti menghitung lebih dari 30 orang singgah secara bergantian untuk menunaikan shalat Ashar di Mesjid Al-Khairiyah. Hal ini menunjukkan bahwa Mesjid Al-Khairiyah keberadaannya sangat penting untuk memenuhi kebutuhan ruhani umat Islam yang ada di sekitar kawasan tersebut, yang meski bukan sebagai jamaah mukim.

Dengan makin ramainya dibangun pertokoan di kawasan tersebut, maka jamaah Mesjid Al-Khairiyah pun semakin banyak. Di hampir seluruh shalat lima waktu kecuali Subuh, Mesjid Al-Khairiyah selalu ramai ditempati oleh umat Islam yang melakukan shalat berjamaah. Pelaksanaan shalat Jumat di mesjid tersebut sudah tidak mampu lagi menampung jamaah yang sangat banyak hingga membludak keluar bahkan terkadang ada jamaah yang tidak mendapatkan tempat untuk melaksanakan shalat Jumat. Hal ini juga terjadi karena Mesjid Al-Khairiyah merupakan satu-satunya mesjid yang berada pada kawasan pertokoan di sekitar Jembatan Sukarno

tersebut. Melihat fenomena tersebut dan demi memenuhi kebutuhan umat Islam yang ingin shalat serta tidak mampunya lagi daya tampung mesjid, khususnya ketika shalat Jumat, maka pengurus mesjid pada tahun 2013 memutuskan untuk memperluas bangunan mesjid dengan menambah luas bangunan menjadi 1500 meter persegi (50x30 m) dan perencanaan bangunan setinggi 4 lantai. Meski status tanah yang masih sebagai milik Negara dan tidak ada IMB untuk renovasi bangunan mesjid, rencana tersebut tetap dilaksanakan dengan membentuk panitia pembangunan mesjid yang diketuai oleh Jafar Al-Katiri (Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang juga Ketua DPW PPP Sulut) dan Abdurrahman Musa (seorang pengacara) sebagai sekertaris.

Pengurus mesjid dan sebagian elemen pemuda muslim yang dikoordinasi oleh BKPRMI (Badan koordinasi Pemuda dan Remaja Mesjid Indonesia) Sulawesi Utara tetap melanjutkan pembangunan perluasan mesjid. Meski mendapat peringatan dari pemerintah kota, pembangunan mesjid tetap terus berjalan. Hingga kini pembangunan mesjid tetap berjalan, meski proses renovasi bangunan mesjid tersebut dianggap tidak mengikuti prosedur yang berlaku, misalnya perizinan IMB. Pengurus mesjid beralasan, bagaimana mungkin mereka mengurus IMB, sedangkan tanah lokasi mesjid tersebut telah atas nama pemerintah kota, dan pemerintah kota berniat hendak membongkar mesjid tersebut. Saat ini lokasi mesjid telah dikelilingi oleh ruko dan di dekat bangunan mesjid berdiri sebuah rumah yang merupakan rumah dinas bagi imam mesjid. Rumah dinas imam mesjid tersebut merupakan satu-satunya rumah yang berdiri di kawasan tersebut.

Pada tahun 2011, oleh pemerintah kota Manado (pada saat itu walikota Vicky Lumentut), Mesjid Al-Khairiyah diminta untuk dibongkar, dan pak imam mesjid

(Hariyanto Halid) diminta untuk meninggalkan rumah dinasnya yang berlokasi dekat dengan bangunan mesjid. Pihak pemerintah kota mempersoalkan bahwa mesjid tersebut sudah tidak layak lagi berdiri karena tidak memiliki minimal 90 pengguna sebagaimana yang diatur dalam PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006. Tidak adanya penduduk sebagai jamaah mukim dari mesjid tersebut menjadi hal yang dipersoalkan oleh Pemkot, sehingga berpandangan bahwa mesjid tersebut harus dibongkar, terlebih lagi kawasan tersebut akan dibangun taman wisata religi. Namun, permintaan ini tidak digubris oleh pak imam dan orang Islam yang ada di sekitar, yang meski bukan jamaah mukim, tapi kerap menggunakan mesjid tersebut untuk menunaikan shalat lima waktu. Secara de jure, mesjid tersebut memang tidak lagi memiliki jamaah mukimin, karena pemukiman di sekitarnya telah mengalami relokasi. Namun, mesjid tersebut secara faktual tetap aktif digunakan bahkan selalu ramai di setiap waktu shalatnya, terlebih di hari Jumat karena jamaah berasal dari pedagang di sekitar serta karyawan perkantoran, maupun orang-orang yang sedang berkunjung di kawasan Boulevard.

Pemerintah kota Manado berencana akan mendirikan taman wisata religi berupa semua miniatur rumah ibadat (mesjid, gereja, kapel, pura, dan vihara) di lokasi tersebut. Namun, rencana ini mendapat penolakan keras dari masyarakat Islam kota Manado. Penolakan tersebut, karena mesjid tersebut tetap berfungsi aktif, bahkan selalu ramai oleh jamaah di setiap waktu shalat. Kemudian untuk mengadvokasi keberadaan mesjid tersebut, kalangan pemuda muslim di kota Manado membentuk Forum Penyelamat Mesjid al-Khairiyah yang diketuai oleh Joko Sutrisno dan Hamdani Rukmana selaku sekertaris. Pembentukan forum tersebut dilakukan pada bulan

Oktober 2013 demi menyikapi sikap pemerintah kota yang hendak membongkar bangunan mesjid.

Demi legalitas status mesjid, pengurus mesjid kemudian berinisiatif untuk mensertifikasi tanah mesjid tersebut atas nama mesjid al-Khairiyah, namun pada tanggal 12 September 2012, terbit sertifikat tanah mesjid tersebut atas nama pemerintah Kota, yang di mana dalam gambar tanah di sertifikat tersebut adalah tanah kosong tanpa bangunan.

Bermodalkan sertifikat tanah dari BPN kota Manado, pemerintah Kota mengajukan proposal pembangunan taman wisata religi kepada Kantor Pusat Kementerian Agama, dan akhirnya mendapat alokasi dana sebesar 15 milyar. Dana tersebut telah hampir cair dari APBN Kementerian Agama, namun dana tersebut urung cair dikarenakan, kemudian diketahui bahwa di atas tanah lokasi pembangunan taman wisata religi telah berdiri sebelumnya sebuah mesjid, padahal di proposal yang diajukan dilampirkan copy sertifikat tanah yang kosong tanpa bangunan.

Di lain pihak, panitia pembangunan mesjid tetap melanjutkan pembangunan perluasan mesjid. Meski mendapat peringatan dari pemerintah kota, pembangunan mesjid tetap terus berjalan. Bahkan suatu hari, tepatnya di hari Minggu, wakil walikota Manado dan camat Wenang Utara beserta beberapa jajaran terkait datang ke lokasi mesjid tersebut untuk meminta penghentian pembangunan mesjid karena tanah tersebut adalah tanah milik pemerintah Kota dan pembangunan mesjid tersebut tidak memiliki IMB. Namun kedatangan wakil walikota beserta jajarannya tidak juga membuat pembangunan mesjid tersebut berhenti. Masalah ini pun kemudian sempat memanas dan sangat rentan dan berpotensi memicu konflik SARA. Masalah mesjid ini pun sampai terdengar di

kementerian agama pusat, dan pada bulan September 2013, wakil menteri agama, Bapak Nazaruddin Umar datang ke mesjid tersebut dan selepas menunaikan shalat Ashar, beliau memberikan sambutan setelah menunaikan shalat Ashar dan mempermaklumkan bahwa keberadaan mesjid tersebut tidak boleh diganggu gugat.

Antara tahun 2013 hingga tahun 2016 tercatat telah terjadi 4 kali demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat yang mengatasnamakan dirinya Masyarakat Adat Kawanua Pencinta Toleransi (MAKAPETOR) terhadap pembangunan Mesjid Al- Khairiyah. Penolakan didasarkan pembangunan mesjid yang telah melampaui space awalnya, sehingga mengambil ruang bagi pembangunan miniature rumah ibadah agama lainnya dalam rangka pembangunan taman wisata religi. Aksi demonstrasi di tahun 2013 dan 2014 masih berlangsung dengan aman meski sempat terjadi sedikit ketegangan. Pada tanggal 25 Maret tahun 2015 kembali demonstrasi dilakukan guna menuntut penghentian pembangunan Mesjid Al-Khairiyah yang diperluas. Aksi terbesar terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016. Massa yang berjumlah 300 orang dari kelompok MAKAPETOR menuntut pembongkaran bangunan liar yang ada di lahan yang mestinya menjadi taman wisata reigi. Pengurus mesjid dan Brigade Mesjid Sulawesi Utara yang intens memperjuangkan kelanjutan pembangunan Mesjid Al-Khairiyah beralasan, bahwa tuntutan untuk membangun taman wisata religi di eks Kampung texas sudah tidak relevan lagi mengingat sudah banyaknya terbangun ruko, sehingga space untuk membangun taman religi sudah tidak memungkinkan lagi. Selain itu, terbetik juga asumsi bahwa "sasaran tembak" yang sebenarnya dari aksi-aksi tersebut adalah eksistensi Mesjid Al-Khairiyah.

Menurut Imam masjid, sebelum demonstrasi dia mendapatkan surat dari pemerintah kota tertanggal 24

Oktober 2016. Surat tersebut bernomor 317/D.10/TK/X/ 2016 ditandatangani oleh J.B. Mailangkay selaku Kepala Dinas Tata Kota Manado. Surat tersebut merupakan kelanjutan dari beberapa surat peringatan sebelumnya yang telah dilayangkan kepada panitia pembangunan Mesjid Al-Khairiyah. Sebelumnya pemerintah kota melalui Dinas Tata Kota telah 6 kali melayangkan surat kepada panitia pembangunan. Diawali dari surat peringatan (I, II, dan III), masing-masing Nomor 56/D.10/TK/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 (Peringatan I), nomor 169/D.10/ TK/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 (peringatan II), dan nomor 240/D.10/TK/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015. Selain itu pemkot juga melayangkan surat nomor 75/D.10/ III/2015 tanggal 24 Maret 2015 perihal kegiatan menghentikan membangun, dan surat nomor 185/D.10/ TK/VI/2015 tanggal 26 Juni 2015 juga tentang perihal menghentikan kegiatan membangun, serta surat nomor 165/D.10/VI/2016 tanggal 7 Juni 2016 perihal penghentian kegiatan membangun dan peninjauan lapangan petugas Dinas Tata kota terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan Mesjid Al-Khairiyah di lokasi kawasan pembangunan wisata religi ex Kampung texas Kelurahan Wenang Utara Kecamatan Wenang. Tak satu pun dari surat tersebut digubris oleh pengurus dan panitia pembangunan mesjid. Meski telah 6 kali dilayangkan surat dari pemkot namun pembangunan Mesjid Al-Khairiyah tetap berjalan. Untuk ketujuh kalinya pemerintah kota melalui Dinas Tata Kota melayangkan surat tertanggal 24 Oktober 2016 namun diterima oleh pengurus dalam hal ini imam mesjid sendiri pada tanggal 27 Oktober (1 hari setelah aksi demonstrasi). Isi surat tersebut menyampaikan 3 hal pokok: *Pertama*, bahwa luasan pembangunan Mesjid Al-Khairiyah tidak sesuai dengan kesepakatan dengan pemerintah kota di mana sekarang ini bangunan mesjid telah dibangun pada

separuh luasan lahan ex Kampung texas. *Kedua*, bahwa akibat pembangunan ini maka untuk pembangunan bangunan social lainnya seperti gereja, kapel, pura, dan vihara taman sudah tidak dimungkinkan lagi. *Ketiga*, Untuk itu dimintakan agar panitia pembangunan Mesjid Al-Khairiyah segera membongkar sendiri dan menyesuaikan dengan perencanaan pemerintah kota.

Menyikapi surat-surat yang telah dilayangkan dari pemerintah kota tersebut, utamanya surat yang terakhir, Imam Mesjid Al-Khairiyah menyatakan sikap bahwa surat tersebut mencantumkan hal yang tidak benar berkaitan dengan poin nomor satu tentang kesepakatan dengan pemerintah kota. Menurut pak imam tidak pernah ada kesepakatan tersebut dengan pemerintah kota. Untuk itu, pak imam tetap bersikukuh pada sikapnya untuk tetap melanjutkan pembangunan Mesjid Al-Khairiyah sesuai dengan rancangan sebelumnya dengan luas bangunan 1500 meter persegi (30 x 50 m) dengan tinggi bangunan 4 lantai.

Hari rabu siang tanggal 26 Oktober 2016 merupakan waktu yang direncanakan oleh kelompok MAKAPETOR untuk melakukan demonstrasi atas bangunan liar yang terbangun di atas lahan ex Kampung Texas yang sedianya dibangun taman wisata religi. Rencana demonstrasi tersebut telah dilaporkan ke pihak Kapolresta Manado, dan melalui informasi yang tersebar di media sosial rencana aksi tersebut sudah tersebar termasuk di kalangan umat Islam. Sebagian kalangan umat Islam menanggapi aksi yang akan dilakukan ini sebenarnya “sasaran tembaknya” adalah eksistensi Mesjid Al-Khairiyah, oleh karena itu, sejak pagi berbagai elemen umat Islam dari berbagai kalangan telah datang ke Mesjid Al-Khairiyah hingga waktu shalat Dhuhur jumlah umat Islam yang telah bersiaga di Mesjid Al-Khairiyah telah mencapai ratusan

orang. Mereka datang dengan maksud untuk bersiaga di Mesjid Al-Khairiyah dan bersiap jika sekiranya massa demonstran dari MAKAPETOR hendak menyerang mesjid.

Joko SUTRISNO mengakui kalau reaksi masyarakat Islam pada demonstrasi tanggal 26 Oktober yang lalu merupakan yang terbesar. Ada ratusan warga muslim dari berbagai tempat sudah mendatangi masjid sejak pagi hari. Ini karena informasi yang berkembang ke warga sudah mulai tercium sejak dua hari menjelang demonstrasi. Surat izin demonstrasi yang ditujukan kepada pihak kepolisian oleh pihak MAKAPETOR bocor ke media sosial. Dalam surat itu, tertera catatan yang menyebutkan ada 10.000 anggota Makapetor yang akan turun ke jalan untuk meminta pengembalian fungsi lahan eks kampong Texas sebagai taman religi.

Informasi dari media online, baik grup WA maupun Facebook memicu warga muslim untuk bersiap dan datang ke lokasi masjid untuk "melindungi" masjid dari kemungkinan terjadinya serangan fisik dari pihak Makapetor. Mursyid dan Joko mengakui bahwa ratusan warga muslim yang berjaga di masjid Al-Khairiyah bersiap untuk melakukan kontak fisik jika diperlukan. Mursyid bahkan sudah meminta izin kepada istrinya untuk merelakan dirinya jika terjadi kemungkinan yang paling buruk.

Pihak muslim meyakinkan bahwa kedatangan warga muslim merupakan reaksi spontan dari apa yang mereka dengar. Tidak ada kelompok radikal yang bermain dalam kasus ini. Warga muslim berdatangan sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap masjid yang diisukan akan diserang oleh kelompok Makapetor dan sudah tersiar di media sosial.

Massa dari kelompok MAKAPETOR sebelum pukul 14.00 wita telah berkumpul untuk melakukan demonstrasi. Menurut laporan dari Kapolresta Manado, Kombes Hisar

Sialagan, massa aksi berjumlah sekitar 300 orang dengan Koordinator lapangan Wellen Kumaunang. Massa pengunjuk rasa terlebih dahulu berkumpul di lapangan basket Mega Mas manado, kemudian dengan bergerak berjalan kaki menuju ke kompleks ex Kampung Texas. Pada pukul 14.00 Wita, massa pengunjuk rasa tiba di depan Mako Polresta Manado dan langsung diterima oleh Kapolresta Manado. Saat diterima Kapolresta Manado, korlap aksi menyampaikan maksud dan tujuan mereka, yaitu; *Pertama*, mengharapkan agar Kapolresta Manado dapat memahami aksi unjuk rasa damai yang dilakukan sehingga mengizinkan mereka untuk masuk ke lokasi ex Kampung Texas Kelurahan Wenang Utara Kecamatan Wenang Kota manado. *Kedua*, Aksi unjuk rasa ini dilakukan karena adanya penyimpangan dalam pembangunan ex Kampung Texas. *Ketiga*, mengharapkan Walikota Manado, Vicky Lumentut untuk hadir di lokasi aksi tersebut dalam waktu 30 menit.

Penyampaian dari korlap aksi tersebut, kemudian ditanggapi oleh Kapolresta manado dengan mengatakan bahwa; *Pertama*, Kehadiran pihak kepolisian di tempat ini untuk mengamankan aksi unjuk rasa damai yang dilakukan. *Kedua*, pihak kepolisian tidak memiliki wewenang untuk menghadirkan bapak Walikota manado di tempat ini serta tidak memiliki kapasitas dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, Kapolresta Manado memberikan solusi kepada pengunjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi mereka langsung ke Pemkot Manado. Tanggapan dari Kapolresta Manado ini ditanggapi kembali oleh Korlap dengan mengatakan; *Pertama*, Memohon sekali kepada pihak Kapolresta untuk mengizinkan mereka masuk ke ex Kampung Texas. *Kedua*, Menolak menyampaikan aspirasi di Pemkot Manado, karena sasaran utama adalah ex Kampung Texas serta tuntutan mereka masih sama dengan tuntutan yang disampaikan pada tanggal 25 Maret

2015 yang lalu, namun tidak ditindak lanjuti oleh Pemkot Manado. Adapun tuntutan pihak pengunjuk rasa adalah: a) Meminta mengembalikan kembali pembangunan taman religi di ex Kampung Texas dimana saat ini pembangunan-nya sudah beralih fungsi; b) Meminta kepada pemerintah kota untuk mempercepat pembangunan taman wisata religi; c) Meminta kepada Pemkot Manado untuk membongkar bangunan liar, tidak termasuk Mesjid yang dibangun di lahan ex Kampung Texas, karena tidak memiliki IMB serta surat-surat lainnya; d) Kesepakatan yang telah disepakati dengan Pemkot Manado pada tanggal 28 maret 2015 untuk segera menyelesaikan permasalahan ex Kampung Texas yang tercanntum dalam 3 poin di atas sampai dengan saat ini tidak dilaksanakan, malahan bangunan yang berada di ex Kampung Texas sudah semakin besar. Menurut Welen Kumaunang, permasalahan tersebut tetap terus mereka dengungkan karena sebagai orang Minahasa harga diri mereka seakan telah terinjak-injak.

Setelah melakukan negosiasi antra pihak Kapolresta Manado dengan pihak pengunjuk rasa akhirnya disetujui untuk mengizinkan 9 orang perwakilan untuk masuk ke lokasi ex Kampung Texas. Adapun 9 orang perwakilan tersebut adalah: Welen Kumaunang, Maikel Manoppo, Donny Lasut, Jemmy Monintja, Pdt. J. Sampelan, Pdt. Rocky Ronoko, Alva Borong, Steven Kambuan, dan Gilby Roeroe. 9 perwakilan tersebut dengan diantar oleh pihak kepolisian kemudian masuk ke lokasi ex Kampung Texas untuk melihat bangunan di lokasi tersebut. Saat berada di lokasi tersebut perwakilan massa berdialog dengan Imam Mesjid Al-Khairiyah, Hariyanto Halid. Dalam dialog tersebut Imam Mesjid Al-Khairiyah menyatakan bahwa; *Pertama*, sebagian tanah di kompleks ex Kampung Texas ini sebagian besar telah dijual oleh pihak Pemkot Manado kepada pihak swasta untuk dijadikan ruko. *Kedua*, Tanah

di ex kompleks Kampung Texas ini merupakan tanah negara yang telah ditempati oleh umat muslim sejak tahun 1968, sehingga sesuai dengan Undang-undang Darurat Agraria bahwa tanah negara yang telah dihuni selama 20 tahun atau lebih penghuni di atas tanah tersebut memiliki hak atas tanah tersebut. *Ketiga*, Permasalahannya sampai saat ini Pemkot Manado belum juga mengeluarkan sertifikat atas tanah mesjid tersebut. *Keempat,* Dengan adanya pembangunan ruko oleh pihak swasta di samping mesjid mengakibatkan umat Islam kesulitan untuk beribadah apalagi kalau shalat Jumat, karena jumlah umat yang hadir jumlahnya sangat banyak. *Kelima*, Pada saat perencanaan pembangunan taman wisata religi Pemkot Manado yang pada saat itu dipimpin Walikota Jimmy Rimbarogi tidak menghargai umat Islam, karena di tempat tersebut telah berdiri mesjid yang telah difungsikan untuk kebutuhan ibadah umat Islam.

Pernyataan imam mesjid tersebut ditanggapi oleh Welen Kumaunang dengan mengatakan; *Pertama*, bahwa Aliansi MAKAPETOR tidak pernah mempermasalahkan berdirinya mesjid di atas lahan ex Kampung texas, namun yang dipermasalahkan adalah beralih fungsinya pembangunan yang dahulunya ditujukan untuk pembangunan taman wisata religi, namun sampai saat ini belum juga dibangun bahkan sebagian tanah telah dijual kepada pihak swasta untuk dijadikan ruko. *Kedua*, Status tanah ini sebenarnya adalah status quo berdasarkan hasil pertemuan dengan Kapolda Sulut, namun pembangunan tetap berjalan. *Ketga*, Jika pak imam mesjid memiliki bukti-bukti bahwa ada permasalahan di tanah ex Kampung Texas, maka mari bersama-sama untuk mempertanyakan dan melaporkan pihak Pemkot Manado agar permasalahan ini bisa diselesaikan. *Keempat*, mari bersama-sama mencari

solusi dari permasalahan ini dan jangan kita saling membenci satu sama lain yang berujung pada perkelahian.

Setelah dilakukan dialog kedua belah pihak kemudian sepakat bersama untuk mencari permasalahan dengan mempertanyakan pembangunan ruko oleh pihak swasta di atas tanah yang rencananya akan dibangun taman wisata religi. Perwakilan pengunjuk rasa bersama-sama dengan umat muslim memasang spanduk di lokasi tersebut yang bertuiskan; “Tanah ini akan Dibangun taman Wisata Religi” dan dilanjutkan dengan foto bersama. Aksi unjuk rasa ini kemudian ditutup dengan doa yang dibacakan oleh Welen Kumaunang selaku korlap aksi. Pukul 17.00 Wita massa pengunjuk rasa membubarkan diri dan kembali berkumpul di titik kumpul semula di kompleks lapangan basket Mega Mas Manado.

Versi yang didapatkan dari rilis Kapolresta ini ketika dikonfirmasi dengan saksi kejadian yaitu, Joko Sutrisno selaku mantan Ketua Forum Penyelamat Mesjid Al-Khairiyah, Mursyid Laiya (Mantan Panglima Brigade Mesjid Sulut) dan Haryanto Halid (Imam Mesjid Al-Khairiyah) membantah beberapa hal kronologi tersebut. Menurut mereka sasaran utama dari aksi tersebut adalah menggugat pembangunan Mesjid Al-Khairiyah, gugatan terhadap bangunan ruko dan tuntutan atas pembangunan taman wisata religi tersebut hanyalah alibi untuk menutupi tujuan mereka yang sebenarnya. Pada saat kejadian massa aksi sudah tidak punya iktikad baik untuk aksi damai, karena massa aksi sebagian diantaranya membawa senjata tajam dan berteriak-teriak menuntut pembongkaran Mesjid Al-Khairiyah. Massa yang datang juga ternyata diketahui banyak diantaranya tidak berasal dari Manado, melainkan berasal dari luar Manado seperti Bitung, Tomohon, Tondano, Minsel, dan daerah lain di luar Manado. Mereka juga mempertanyakan klaim MAKAPETOR

yang mengatasnamakan masyarakat adat Minahasa yang merasa memiliki tanah tersebut, karena jika ditilik dari sejarah wilayah pesisir sebenarnya merupakan kawasan orang Bantik dan bukan Minahasa yang sebenarnya mereka bermukim di wilayah pegunungan.

Menurut ketiga informan tersebut, aksi yang berlangsung bukanlah aksi damai dan hampir saja terjadi bentrokan antara massa yang datang dan umat Islam yang telah bersiaga di mesjid. Jika sekiranya aksi tersebut ditujukan sebagai aksi damai, kenapa mereka memaksa masuk ke lokasi yang notabene adalah lokasi Mesjid Al-Khairiyah dan mereka memaksa masuk untuk berdialog dengan Imam Mesjid. Hal ini menunjukkan bahwa arah aksi mereka adalah teror kepada pembangunan Mesjid Al-Khairiyah. Hampir terjadi bentrokan ketika massa memaksa masuk dan umat Islam sudah bersiap untuk bentrok fisik jika massa mendekat. Untungnya diantara kedua kelompok massa tersebut ada barikade aparat sebanyak 3 lapis, sehingga kedua kelompok massa tidak sempat bertemu. Di tengah ketegangan tersebut, tiba-tiba seorang anggota kepolisian mengalami "kemasukan" dan berteriak "Allahu Akbar" berulang kali dengan teriakan yang keras. Kejadian ini menciutkan nyali massa unjuk rasa. Massa pengunjuk rasa menurut Joko Sutrisno memaksa untuk memasang spanduk yang bertuliskan "Tanah ini akan Dibangun taman Wisata Religi" di tembok mesjid, namun hal itu urung dilakukan karena mendapatkan penentangan yang keras dari umat Islam, sehingga pemasangan spanduk dialihkan tidak lagi di tembok mesjid. Spanduk tersebut hanya terpasang lebih dari satu jam karena pada waktu Maghrib spanduk tersebut dilepas oleh jamaah Mesjid Al-Khairiyah.

Menurut kesaksian Joko dan Mursyid yang ada di lokasi kejadian menyatakan bahwa aksi tersebut memang

dipersiapkan untuk chaos, namun karena adanya barikade aparat chaos tidak sampai terjadi. Sasaran tembak dari pihak pengunjuk rasa MAKAPETOR adalah pembangunan Mesjid Al-Khairiyah. Ada problem identitas yang mereka tidak bisa terima, karena di kawasan yang telah menjadi landmark Kota Manado yaitu Jembatan Soekarno yang sekaligus juga merupakan pusat Kota Manado berdiri sebuah mesjid yang megah. Hal ini menjadi problematik bagi ikon Manado yang dikenal sebagai Kota "Seribu Gereja". Dengan demikian menurut Joko, sejatinya yang diinginkan dari massa unjuk rasa dan dengan memaksakan dibangunnya taman religi di lokasi tersebut adalah upaya menghilangkan atau setidaknya mengecilkan Mesjid Al-Khairiyah. Menurut pak imam Haryanto Halid, mereka akan terus melanjutan pembangunan mesjid apa pun yang terjadi.

Pasca kejadian aksi massa MAKAPETOR pada Rabu 26 Oktober 2016 marak informasi di media sosial terkait hal tersebut hingga merembet pada persoalan agama antara Muslim dan Kristen di manado. Reaksi dari kalangan tokoh muslim Manado sendiri beragam, ada yang menganggap bahwa aksi unjuk rasa tersebut pada dasarnya hendak menggugat eksistensi dan pembangunan Mesjid Al-Khairiyah.

Meski ada juga yang beranggapan, bahwa inti persoalannya adalah pembangunan mesjid Al-Khairiyah yang mengambil lahan di samping bangunan awal tanpa izinlah yang memicu aksi-aksi tersebut. Di Kalangan tokoh muslim Manado memang telah muncul pro dan kontra terkait pembangunan taman religi di kawasan tersebut, sebagian tokoh termasuk Imam Mesjid Al-Khairiyah menolak pembangunan taman wisata religi di lokasi tersebut, namun sebagian tokoh Islam yang lain setuju

dengan pembangunan taman wisata religi dengan catatan tidak mengganggu fungsi mesjid selaku tempat ibadah.

Beberapa aktivis muslim dari beberapa ormas keislaman dengan difasilitasi oleh Benny Ramdani selaku Senator dari Sulawesi Utara melakukan pertemuan di Kantor MUI Sulawesi Utara pada hari Sabtu Malam tanggal 29 Oktober 2016. Dalam pengamatan peneliti yang hadir dalam pertemuan tersebut, aktivis muslim yang hadir pada pertemuan itu sebanyak 12 orang. Beragam pandangan muncul dalam pertemuan yang berlangsung lebih kurang 2 jam tersebut. Benny Ramdani memulai pembicaraan dengan mengemukakan beberapa poin penting. Menurut Benny, Mesjid Al-Khairiyah yang telah dibangun sejak tahun 1968 dapat dijadikan situs sejarah kerukunan dan toleransi di Manado dengan pertanda diterimanya agama Islam sebagai agama yang dipeluk oleh sebagian penduduk Manado. Benny juga menegaskan bahwa pemerintah harus pro aktif guna menyelesaikan permasalahan status tanah Mesjid Al-Khairiyah karena Mesjid Al-Khairiyah tetap harus ada dan fungsional sebagai tempat iabdah. Lebih lanjut Benny mengatakan perlu adanya komunikasi dan koordinasi dengan pihak kepolisiaan agar tidak ada lagi aksi demo di lokasi Mesjid Al-Khairiyah dari massa MAKAPETOR.

Umumnya peserta rapat memberikan penegasan tentang perlunya persatuan segenap umat Islam untuk memperjuangkan status legalitas tanah Mesjid Al-Khairiyah dan pembangunan Mesjid Al-Khairiyah harus tetap terus dilaksanakan. Seluruh peserta juga menegaskan untuk mencegah berbagai pihak agar tidak mempolitisasi persoalan terkait Mesjid Al-Khairiyah. Diantara rekomendasi dari pertemuan tersebut ditindaklanuti dengan mengadakan audiens kepada pihak Kapolda dan pemerintah provinsi dalam hal ini Wakil Gubernur Sulawesi Utara pada hari

Senin tanggal 31 Oktober 2016. Namun, hingga hari yang dijadwalkan pertemuan tersebut belum sempat dilakukan. Hingga penelitian ini dilakukan tokoh-tokoh muslim terus melakukan pembicaraan dan upaya strategis guna menghindari kejadian aksi massa selanjutnya dan eksistensi serta fungsi Mesjid Al-Khairiyah tetap bertahan.

Persoalan Masjid Al-Khairiyah sejatinya adalah persoalan kebijakan. Pasca pengosongan wilayah pemukiman, pihak Pemerintah Kota berencana membangun taman religi yang menegaskan ekspresi simbolik dari adagium Sulawesi Utara sebagai wilayah yang paling rukun di nusantara. Rencana ini mendapat penolakan dari pihak pengurus Masjid karena taman religi akan mematikan fungsi masjid dari fungsional menjadi artifisial. Apalagi Imam Masjid Al-Khairiyah pernah melihat masterplan taman religi dan menilai kurang adil karena gambar gereja lebih besar daripada bangunan rumah ibadah yang lain.

Atas rencana itu, pihak masjid melakukan "perlawanan simbolik" menolak ide taman religi dengan memperluas lahan pembangunan masjid. Panitia pembangunan masjid dibentuk dan tiang-tiang besar sudah dipancang. Tindakan ini dianggap sebagai show power dari pihak masjid yang kemudian memicu terjadi gelombang protes dari warga Manado yang direpresentasi oleh Aliansi Makapapetor.

Keadaan semakin runyam ketika di area sekitar masjid yang semula menjadi lahan taman religi sudah berdiri rumah toko (ruko) untuk kepentingan bisnis. Hal ini semakin memperkuat keinginan pihak masjid untuk tetap melanjutkan pembangunan karena menganggap rencana pembangunan taman religi hanya konsep belaka, bukan upaya serius. Bahkan ada yang mengatakan taman religi hanya isu yang menjadi landasan agar masjid di bongkar dan kepentingan bisnis masuk. Hal ini terlihat

dari sertifikat pemerintah kota atas tanah itu yang menunjukkan kalau tanah di eks kampun Texas adalah tanah kosong. Demontrasi pihak Makapetor yang mendesak pemerintah kota untuk menertibkan bangunan liar dipahami oleh pihak masjid sebagai upaya untuk menjadikan masjid sebagai sasaran. Pihak masjid merasa, Makapetor hanya menjadikan lahan taman religi sebagai alasan untuk menolak keberadaan atau perluasan pembangunan masjid Al-Khairiyah. Makapetor dianggap tidak rela apabila di areal yang strategis (berada di bawah jembatan Soekarno) berdiri sebuah masjid megah. Hal inilah kemudian memicu "perlawanan" dari pihak muslim terhadap rencana demonstrasi Makapetor terhadap masjid.

H. Kasus Tolikara di Papua

Hari raya idul fitri pada bulan Juli 2015, masyarakat Indonesia dikagetkan dengan berita terbakarnya musala tempat umat Islam di Kabupaten Tolikara melakukan ibadah salat idul fitri. Ada dua versi yang berkembang, versi pertama menyebutkan bahwa kelompok radikal Kristen dari denominasi GIDI (Gereja Injili di Indonesia) memang sengaja membakar masjid. Versi kedua menyebutkan bahwa mereka hanya membakar kios yang kemudian merembet ke musala. Persoalannya adalah musala itu terbakar. Musala adalah simbol dari agama Islam.

Hasil *fact finding* tim peneliti Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI (Sabara, 2015) menjelaskan kronologi kasus Tolikara, sebagai berikut:

1. Pagi hari pada tanggal 17 Juli 2015 sekitar jam 07.00 WIT, ketika saat shalat Id berlangsung, datang sekitar lima ratusan pemuda GIDI memaksa agar shalat Id dibubarkan sambil menyampaikan kata-kata tidak senonoh : "tidak boleh shalat di sini anjing" dan "babi"

yang disertai dengan pelemparan batu kepada jamaah shalat Id. (wawancara dengan Kapolres Tolikara dan Kyai Abu Mawakib, Ketua MUI Tolikara, tanggal 22 Juli 2015). Menurut versi Lettu Inf TNI Wahyudi Hendra, Komandan Pos Pengamanan Daerah Rawan (Pos Pam Rawan) mengaku, pada takbir kedua sudah mendengar suara massa yang memprovokasi dengan melempar atap seng kios dan teriakan-teriakan hentikan shalat. Mendengar itu, Lettu Wahyudi langsung meninggalkan shalat sambil mengajak pasukan lainnya yang tengah shalat. Wahyudi langsung memerintahkan memperkuat anggota TNI yang tengah berjaga bersama Brimob dan anggota polisi Polres. Sementara itu, Kapolres meninggalkan shalat saat takbir ke-7. Bahkan Kapolres meminta agar Imam menhentikan Shalat. "Pak Ustadz, sudah hentikan nggak usah dilanjutkan." Kapolres langsung balik kanan dan langsung menugaskan anggota polisi untuk mengamankan ibu-ibu dan anak-anak ke belakang kantor Koramil. Menurut Kapolres, massa yang pertama mendesak masuk dari titik pertama berjumlah 150 orang. Massa dari titik ini melakukan penyerangan pelemparan batu. Kapolres bersama 10 orang petugas gabungan dari Polisi, Brimob, dan TNI mencoba menghalau massa sambil bernegosiasi dengan massa. "Saya Kapolres, mohon jangan melempar." Massa berhasil dihalau (Wawancara dengan Kapolres, tanggal 22 Juli 2015)

2. Sementara, massa dari titik kedua mulai merangsek masuk jalan samping Koramil. Kapolres beranjak ke titik massa kedua, "Dikhawatirkan massa itu akan menerobos masuk ke arah lapangan Koramil." Kapolres kembali melakukan negosiasi dengan memegang megaphone yang dibawa oleh massa yang ingin

menghentikan shalat Id. “Saya Kapolres, saya sudah koordinasi dengan Bupati dan Presiden GIDI.”

3. Massa dari arah lain masih melakukan pelemparan. Menurut pengakuan Kapolres, dia harus berlari ke setiap sudut dari mana arah massa datang, untuk mencoba menghentikan pergerakan massa. Tapi massa tetap tidak bergeming, pelemparan tetap terjadi kepada jama’ah shalat Id. Meski demikian, massa tidak dapat mendekati area shalat karena ada pagar berduri (lokasi shalat bertempat di halaman Koramil dan sedikit di bawah jalan sehingga mudah menjadi sasaran pelemparan)
4. Menurut pengakuan Kapolres lebih lanjut, ketika sedang mencoba menghalau massa, tiba-tiba dari arah timur kompleks Koramil, terdengar suara tembakan (dari aparat keamanan). Dari laporan Kapolres, tembakan pertama diarahkan ke udara untuk memberikan peringatan kepada massa yang tidak menggubris. Akhirnya aparat melepaskan tembakan ke tanah hingga mengakibatkan 12 orang luka. Salah satu dari korban luka ini kemudian diketahui meninggal dunia. Kapolres yang masih menghalau gelombang massa di titik pertama mengaku mendapatkan pukulan di dada kiri. Bahkan, Kapolres menyaksikan, Bupati yang datang menghalau massa itu diabaikan, bahkan sempat terdorong desakan massa.
5. Setelah jatuhnya korban, sekelompok massa dari arah timur membakar kios hingga merembet ke masjid. Versi korban pemilik kios menyebut bahwa kios penjual bensin sengaja terlebih dahulu dibakar dengan tujuan agar api ikut membakar masjid. Api semakin mudah menjalar ke bangunan dan kios lainnya karena di lokasi tidak ada fasilitas pemadam kebakaran

(Wawancara dengan salahsatu pemilik kios yang terbakar).

6. Ketika Tim melakukan konfirmasi ke Pendeta Dorman Wandikbo. Dia menyampaikan kronologis yang berbeda terhadap insiden Tolikara. Menurut penjelasannya: "Sejumlah peserta KKR melakukan protes lantaran pengeras suara atau TOA yang digunakan dalam shalat Idul Fitri itu mengganggu acara yang juga tengah digelar oleh pemuda GIDI. Kedatangan massa GIDI ke lokasi shalat Id adalah dengan maksud baik untuk berdialog/bernegosiasi. Namun, mereka disambut oleh tembakan aparat yang membuat situasi menjadi kacau, terlebih setelah diketahui adanya satu orang meninggal dunia akibat rentetan tembakan tersebut. Akibatnya, warga kemudian membakar kios di sekitar lokasi. Namun, api merembet ke mushalla karena terbuat dari kayu dan berdekatan dengan kios". Untuk itu Presiden GIDI menyampaikan permintaan maaf kepada umat Islam (Wawancara dengan Dorman Wandikbo, Presiden GIDI, tanggal 20 Juli 2013).

Kasus pembakaran mushalla adalah puncak dari relasi umat Islam dan Kristen khususnya denominasi GIDI. Orang Kristen GIDI mengklaim Tolikara sebagai wilayah suci mereka, dimana kelompok lain harus hidup berdasarkan aturan yang mereka buat. Ini tercermin dari menyebarnya surat edaran yang berisi poin-poin yang menyudutkan umat Islam. Isi surat edaran tersebut: 1) umat Islam dilarang shalat ied dan merayakan hari raya di kabupaten Tolikara. 2) umat muslimah dilarang memakai jilbab di Tolikara. 3) Pelarangan pendirian Gereja selain gereja GIDI. Tiga maklumat ini sejatinya adalah bentuk arogansi dari denominasi Kristen GIDI terhadap umat lain,

bukan hanya kepada umat Islam belaka tetapi juga kepada denominasi diluar GIDI.

Hasil *fact finding* tim peneliti Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama (Sabara, 2015) tentang kasus Tolikara menyimpulkan bahwa:

1. Akar permasalahan adalah klaim GIDI atas tanah Tolikara sebagai tanah suci mereka, sehingga mereka tidak membolehkan adanya kelompok agama lain maupun denominasi Kristen lain yang eksis dan mendirikan tempat ibadah di Tolikara. Klaim dan ekses dari klaim tersebut telah melanggar Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama dan beribadah bagi seluruh rakyar Indonesia.
2. Acara Kebaktian Kebangunan Ruhani (KKR) Pemuda GIDI yang dilangsungkan di Tolikara pada tanggal 15-19 Juli 2015 dan bertepatan dengan hari raya Idul Fitri dan beredarnya surat pelarangan dari GIDI wilayah Toli merupakan pemicu langsung dari kerusuhan di hari Idul Fitri.
3. Presiden GIDI dan Bupati Tolikara selaku ketua Panitia KKR Pemuda GIDI harus bertanggungjawab atas kerusuhan yang terjadi.
4. Bangunan tempat ibadah umat Islam yang dibakar atau ikut terbakar adalah masjid. Pembakaran rumah ibadah tersebut dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan dari pihak GIDI.
5. Penembakan yang dilakukan oleh pihak keamanan merupakan tembakan peringatan dengan tujuan untuk melumpuhkan massa, karena situasi massa yang semakin beringas dan tidak terkendali.
6. Tidak benar jika dikatakan penyebab kerusuhan karena umat Islam menyelenggarakan takbiran dan shalat Idul Fitri dengan menggunakan pengeras suara yang mengganggu kenyamanan warga setempat.

7. GIDI merupakan kelompok agama yang ekslusif yang melarang kelompok agama lain untuk eksis dan menjalankan ibadah serta menampilkan simbol-simbolnya di Tolikara yang mereka klaim sebagai tanah suci.
8. GIDI memiliki hubungan dengan zionis Israel dan OPM.
9. Perda yang dijadikan landasan oleh GIDI untuk melakukan pelarangan pendirian rumah ibadat agama lain dan penggunaan simbol-simbol keagamaan lain tidak jelas keberadaannya.
10. Kerusuhan di Karubaga kabupaten Tolikara pada hari Idul Fitri tanggal 17 juli 2015 bukanlah kerusuhan berlatar belakang murni agama. Agama hanya menjadi kamuflase dari akar masalah yang sebenarnya, yaitu kepentingan zionis dan OPM. Oleh karena itu, konflik Karubaga harus dipandang bukan sebagai masalah agama, melainkan masalah Kedaulatan dan Keutuhan NKRI.
11. Radikalisme keagamaan yang ditunjukan oleh GIDI di Tolikara terkait dengan konteks sosial politik yang mempengaruhinya. Sehingga sikap intoleransi keagamaan yang ditunjukan oleh oknum GIDI Tolikara yang menjadi peserta KKR bukanlah representasi GIDI secara keseluruhan. Buktinya anggota GIDI di berbagai daerah di Indonesia hidup rukun dengan pemeluk agama lainnya.

I. Pemuda dan Radikalisme Agama

Ada temuan menarik dari penelitian Tim Peneliti Bidang Kehidupan Keagamaan (2016), bahwa ada segelintir siswa yang menyatakan diri bersedia untuk ikut dalam gerakan radikalisme agama, bahkan secara vulgar

ada sekitar 10% siswa yang menyatakan bersedia melakukan bom bunuh diri. Riset yang mengambil sampel di lima kota di Kawasan Timur Indonesia, yaitu Samarinda, Makassar, Ambon, Palu, dan Kendari. Temuan riset menunjukkan bahwa gejala siswa yang siap melakukan bom bunuh diri terjadi di semua kota, dengan peta sebagai berikut:

Kota	Sangat Bersedia	Bersedia	Jumlah Responden
Palu	3	14	220
Ambon	10	29	220
Kendari	4	17	220
Makassar	5	17	220
Samarinda	1	14	220
	Jumlah		**1100**

Sumber data: Laporan Penelitian Tim Peneliti Bidang Kehidupan Keagamaan Balitbang Agama Makassar (2016)

Data pada tiga tabel di atas menunjukkan bahwa fenomena "persetujuan" terhadap ajakan bom bunuh diri sebagai bagian dari jihad tersebar di semua kota, semua jurusan (kecuali bahasa, dan kesmas/SMK), dan semua jenis sekolah. Yang menarik adalah jumlah tertinggi dari responden yang siap ikut bom bunuh diri ada di Kota Ambon.

Temuan riset ini patut diberi perhatian yang cukup serius. Mengingat jumlah kelompok radikal tidak terlalu membutuhka jumlah yang sangat besar. Bibit atau potensi radikalisme yang berbasis agama senantiasa ditemukan dalam setiap komunitas termasuk di sekolah. Temuan riset ini juga menunjukkan adanya similiaritas dengan temuan riset Wahid Institute (2015) yang mensinyalir adanya

potensi radikalisme di kalangan siswa hingga mencapai angka 7%.

Persetujuan ini tentu bersifat persepsional, belum bersifat faktual. Tetapi, gejala respon positif terhadap radikalisme bisa dipahami bahwa potensi radikalisme agama akan terus menerus terjadi di negeri ini apabila gerakan zero tolerance terhadap radikalisme agama tidak menjadi agenda utama. Selalu ada orang yang menyatakan bersedia untuk melakukan tindakan kekerasan atas nama agama, bahkan hingga titik yang paling radikal yaitu bom bunuh diri. Doktrin agama yang penetratif bisa saja mentransformasi data persepsional ini menjadi data faktual.

Gejala “permissif” terhadap radikalisme di kalangan kaum pelajar memang bukanlah temuan riset yang baru.

Riset Wahid Institute (2015) yang mensinyalir adanya potensi radikalisme di kalangan siswa hingga mencapai angka 7%. Penelitian dari LaKIP yang dilakukan dalam kurun waktu oktober 2010-januari 2011 pada 59 sekolah swasta dan 41 sekolah negeri di Jabodetabek menunjukkan; hampir 50 % pelajar setuju dengan kekerasan, 14,2 % setuju dengan aksi terorisme dan 84,8 % juga setuju dengan penegakan Syariat Islam. Gejala yang sama juga ditunjukkan oleh Penelitian Maarif Institute. Dalam penelitian yang berjudul Pemetaan Problem Radikalisme di Kalangan SMU Negeri di 4 Daerah, menunjukkan kecenderungan menguatnya Radikalisme di kalangan siswa (Fanani, 2013).

Gejala ini bisa dipicu sejauh ini oleh bebasnya akses informasi melalui internet yang memudahkan para siswa mendapatkan informasi yang terkait dengan isu keagamaan. Sebagai parameter, seorang anak muda di Bombana (Sulawesi Tenggara) yang membakar sebuah gereja karena terdorong dari hasil bacaan buku yang berisi

semangat jihad. Aksi pembakaran gereja ini tidak berlanjut karena warga mengetahuinya dan menangkap sang pelaku. Refleksi personal terhadap buku bacaan ini memunculkan spririt untuk melakukan tindakan-tindakan radikal seperti membakar Gereja. Pun, perencana bom panci yang ditangkap oleh pihak Kepolisian Bekasi mengakui terinspirasi dari bacaan internet.

Belum ditemukan bukti yang signifikan yang mengindikasikan adanya kelompok radikal yang secara sistematis memengaruhi sistem pembelajaran keagamaan di tingkat siswa SMA. Artinya, gejala radikalisme yang muncul dalam persepsi "sedikit" siswa adalah bentuk inisiasi personal atau keyakinan personal akibat dari pergulatan dengan informasi keagamaan yang mudah terakses melalui jaringan internet. Seperti pengakuan salah seorang siswa di salah satu sekolah di Makassar. "Kalau untuk membela Islam, saya mau (melakukan) bom bunuh diri. Saya kira (bom bunuh diri) itu tidak ada masalah dalam Islam. Biar bisa masuk surga toh" (Syamsurijal dan Irfan Syuhudi, 2016).

Terlepas dari apa faktor yang memengaruhi perspektif para siswa tentang radikalisme agama, sikap permissif terhadap radikalisme agama adalah sikap dasar keagamaan yang bisa menimbulkan persoalan. Memang tidak ada korelasi bahwa siswa yang menjawab "bersedia atau sangat bersedia ikut bom bunuh diri" akan benar-benar melakukan tindakan tersebut. Namun, gejala ini cukup memberi penjelasan kepada kita bahwa "pasar" gerakan radikalisme agama selalu tersedia setiap saat.

Fenomena ini terlihat jelas di Indonesia. Sejak tahun 2000-2016, selalu saja ada peristiwa bom bunuh diri yang terjadi. Kasus terakhir adalah bom di depan salah satu gereja di Samarinda yang dilakukan oleh seorang eks narapidana dengan kasus yang serupa. Kewaspadaan dan

tindakan pencegahan terhadap segala bentuk radikalisme agama tetap harus menjadi prioritas dan perhatian penting dari pemerintah.

J. Analisis Berbagai Kasus Kekerasan dan Demonstrasi Atas Nama Agama

Kasus-kasus gerakan kekerasan atau demonstrasi diatas adalah potret dari gerakan sosial keagamaan yang direkam oleh media massa. Di luar itu, masih banyak kasus lain yang tidak mendapatkan porsi pemberitaan oleh media massa tetapi merefleksikan adanya problem keagamaan berbasis ideologi purifikasi dan radikal.

Berbagai kasus kekerasan berbasis agama di atas menunjukkan setidaknya tiga hal:

Pertama. Kasus konflik Poso merupakan satu-satunya konflik berbasis agama yang menyisakan kelanjutan kekerasan berbasis agama, setidaknya hingga kematian Santoso pada tanggal 18 juli 2016. Militan sipil eks konflik Poso terus menerus melakukan gerakan perlawanan terhadap pihak kepolisian. Konflik Ambon dan ATM (Aralle, Tabulahan, dan Mambi) di Sulawesi Barat sejauh ini tidak melahirkan militansi sipil seperti yang terjadi di Poso. Ekses yang tersisa di Ambon adalah segregasi pemukiman warga Muslim dan Kristen. Sedangkan di ATM, konflik yang terjadi tahun 2002-2004 tidak menyisakan ekses apa-apa. Situasi kehidupan masyarakat di Aralle, Tabulahan, dan Mambi berjalan normal.

Kasus Poso mencerminkan adanya relasi gerakan radikalis internasional dengan gerakan Poso. Ini yang menyebabkan gerakan Poso seperti mendapatkan nyawa untuk terus melakukan perjuangan, meski hubungan sosial antar masyarakat pascakonflik sudah berjalan dengan normal. Pasca kematian Abu Warda atau Santoso,

disinyalir ada perintah dari ISIS di Suriah untuk melakukan aksi balas dendam. Dalam sebuah wawancara dengan VOA (Voice of America) Indonesia, Ali Fauzi, mantan anggota Jamaah Islamiyah, menyatakan bahwa ada perintah ada perintah khusus dari pimpinan kelompok teroris dunia Negara Islam Irak Suriah (ISIS) di Suriah agar seluruh kelompok militan di Indonesia segera melakukan aksi balas dendam atas kematian Santoso (dikutip dari www. VOAindonesia.com, diakses tanggal 16 Januari 2017). Lebih jauh, Ali Fauzi mengatakan bahwa kematian Santoso bukan akhir dari gerakan terorisme di Indonesia. Berikut hasil petikan wawancaranya:

> Kalau kita konstruksi tentang terorisme di Indonesia, mulai dari bom Bali 1, kemudian eksekusi dilakukan oleh Pemerintah. Imam Samudra, Amrozi dan Mukhlas dieksekusi. Lalu muncul dokter Azhari, lalu muncul lagi pemimpin baru Noordin M Top. Noordin M Top ini tewas tertembak di Solo muncul lagi penggantinya. Saya pikir pasca tewasnya Santoso ini juga akan ada pengganti dari Santoso. Entah itu dari Sulawesi atau dari Jawa saya belum bisa sebutkan. Tetapi yang jelas kebiasaannya jika leader pemimpin ini tewas akan muncul berikutnya.

Nalar Ali Fauwzi tentang kesinambungan generasi pemimpin gerakan radikalisme agama di Indonesia relatif benar. Kematian Santoso boleh jadi bukan menjadi penanda dari akhir gerakan radikalisme di Indonesia, khususnya di Kawasan Timur Indonesia. Pola yang terjadi selama ini menunjukkan indikasi ke arah tersebut. Apalagi, jika asumsi tentang adanya keterkaitan gerakan radikalisme internasional memiliki keterkaitan dengan gerakan radikalis nasional, maka akan muncul kembali personal yang akan ditokohkan sebagai pimpinan gerakan baru.

Pendekatan militer menjadi solusi tepat dalam menghadapi gerakan radikal sistematis, seperti gerakan MIT pimpinan Santoso. Ini karena gerakan radikal Santoso melakukan perlawanan bersenjata dan menjadikan pihak keamanan, khusus-nya densus 88 sebagai musuh bebuyutannya. Pendekatan militer yang komprehensif bisa memperlemah (kalau tidak bisa mematikan) akselerasi gerakan radikal tersebut. Meski tidak ada jaminan gerakan MIT akan hilang, tetapi dengan meninggalnya Santoso, kelompok MIT butuh waktu panjang untuk merehabilitasi atau melakukan rekrutan baru untuk memperkuat jaringan mereka. Pendekatan militer yang terus menerus dilakukan bisa memberi jaminan terhadap gejala perlawanan radikal.

Kedua, kekerasan (beragama) yang terkait dengan politik. Eskalasi sosial biasanya memang selalu menghangat setiap ada even politik. Kepentingan para aktor politik biasanya saling berbenturan satu sama lain yang membentuk sosial disorder.

Agama biasanya menjadi "sumbu penghangat" yang mudah dimainkan. Sebagai contoh riil adalah konflik di Mamasa. Konflik ini basisnya adalah pengaturan wilayah pasca pemekaran kabupaten Polmas menjadi Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa. Konflik kepentingan tapal batas ini kemudian berubah menjadi konflik besar ketika isu agama mulai dimainkan. Dan, secara kebetulan dua kubu yang sedang bertikai tentang tapal batas memang berbeda secara keyakinan beragama. Karena agama berada pada domain yang paling penting dalam setiap individu beragama, konflik ini pun meluas dari konflik tapal batas menjadi konflik identitas keagamaan (Idham, 2009).

Politik adalah ruang dimana ketegangan sosial bisa berubah eskalasi hingga pada konflik. Kasus demonstrasi

411 dan 212 tidak bisa dilepaskan dari konteks politik pemilukada Jakarta. Gerakan untuk menjegal Ahok sebagai next gubernur sudah mulai terjadi sejak lama. Gerakan ini menemukan momentum yang tepat ketika Ahok melakukan *split tangue* (kesalahan berbicara) ketika berpidato di Kepulauan Seribu. Isu ini berkembang cepat menjadi isu nasional yang kemudian melahirkan gerakan demonstrasi berbasis agama terbesar dalam sejarah manusia. Ada jutaan manusia berkumpul di Jakarta untuk mendesak percepatan hukum kepada Ahok yang diduga melakukan penistaan ajaran agama Islam. Posisi Ahok sebagai gubernur dan calon gubernur menjadi instrument penting dalam peningkatan skala penolakan.

Ketiga, konflik berbasis rumah ibadah. Fenomena sosial di Indonesia menunjukkan bahwa rumah ibadah adalah sumber konflik yang paling rentan di Indonesia. Dihampir semua wilayah pernah merasakan ketegangan yang bersumber dari rumah ibadah. Kasus Pembakaran Masjid Tolikara, Kasus Masjid Al-Khairiyah Manado, Kasus demonstrasi gereja Toraja yang disebutkan di atas adalah contoh kasus yang direkam oleh media massa lokal dan nasional. Kasus rumah ibadah tampaknya akan menjadi "sumber" konflik yang berkepanjangan. Polanya pun relatif seragam. Di wilayah mayoritas muslim, gereja akan kesulitan berdiri. Di wilayah yang mayoritas Kristen, masjid atau mushala akan mendapatkan perlawanan.

Penolakan atau konflik berbasis rumah ibadah adalah salah satu potret ironi kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Rumah ibadah (khususnya kelompok minoritas) menjadi titik yang sangat sensitif dan bisa merubah wajah kerukunan seketika, dari rukun menjadi tidak rukun. Ini sekaligus menunjukkan bahwa endapan kesadaran spritual (sebagian) warga Indonesia masih dipenuhi kecurigaan dan ketidaksiapan hidup

berdampingan. Masyarakat bisa menerima orang berbeda agama di lingkungannya tetapi tidak bisa menerima (gedung) rumah ibadahnya.

Pertama, Masyarakat mengalami sindrom mayoritas dimana mereka merasa memiliki "kuasa" untuk menentukan posisi kelompok minoritas sesuai dengan kehendak mereka. Mereka berhak menentukan tidak boleh ada gedung agama lain yang berhadapan langsung dengan masjid. Masjid dan gereja menjadi simbol pertentangan yang terus menerus direproduksi. Begitupula, di daerah mayoritas Kristen. Keberadaan masjid dianggap bisa "mengganggu" simbol daerahnya. Pengaturan ketat perlu dilakukan agar bangun rumah ibadah tidak bebas berdiri. Misalnya, surat pernyataan gereja-gereja di pegunungan Jayawijaya (Tim Peneliti Badan Litbang dan Diklat RI, 2016) sebagai berikut:

a. Seluruh denominasi gereja di Kabupaten Jayawijaya meminta pemerintah daerah Kabupaten Jayawijaya untuk mencabut/membatalkan ijin mendirikan Masjid Agung Baiturahman Wamena.
b. Panitia Pembangunan Masjid Baiturahman Harus Menghentikan Pekerjaan Pembangunan.
c. Menutup Mushala/Masjid yang tidak memiliki ijin atau menyalahgunakan ijin tempat usaha, tetapi menjadikan Mushala/Masjid, sebagaimana yang diatur oleh SKB dua menteri.
d. Dilarang Membangun Mushala dan Masjid Baru di Kabupaten Jayawijaya.
e. Dilarang menggunakan Toa (pengeras suara) saat sholat karena mengganggu ketenangan dan kenyamanan masyarakat.
f. Demi keharmonisan, kenyamanan, dan keamanan agar dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Surat pernyataan di atas menunjukkan adanya relasi mayoritas yang timpang. Kelompok gereja merasa memiliki Papua, sehingga (juga) berhak untuk mengatur hidup orang lain, terutama umat Islam. Larangan merehabilitasi masjid, larangan menggunakan Toa adalah "hak internal" yang tidak boleh dilakukan karena dianggap "mengganggu" warga mayoritas.

Hal ini pun terjadi di masyarakat mayoritas Muslim. Misalnya kasus penolakan warga Temindung terhadap gereja Injili di Samarinda. Warga menolak karena letak gedung tersebut berhadapan langsung dengan masjid (hanya dipisahkan oleh jalan raya). Warga khawatir gedung serba guna itu nantinya akan berfungsi sebagai 'tempat kegiatan ibadah'. Penolakan ini menjadi legitimated karena gedung tersebut mulai dibangun tanpa surat IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) dari pemerintah.

Penolakan warga ini menjadi 'panas' karena pihak GKII tetap bersikukuh melanjutkan pembangunan. Mereka menganggap bahwa pembangunan gedung serba guna adalah hak bagi anak bangsa yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Hal tersebut bisa terlihat dari pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pengurus Gereja Kemah Injil Indonesia Kalimantan Timur yang menegaskan bahwa gedung serba guna yang akan dibangun tersebut akan digunakan "sebagaimana fungsi dari sebuah gedung serba guna yang telah diatur oleh peraturan pemerintah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945". Maksudnya, sebagaimana layaknya gedung serba guna yang lain.

Warga setempat bersedia menerima pembangunan gedung tersebut dengan beberapa persyaratan yang dibuat dalam bentuk surat pernyataan tertulis, namun tidak disetujui oleh pihak GKII (Saprillah, 2014), sebagai berikut:

a. *Gedung serbaguna yang akan atau telah didirikan merupakan bangunan dua lantai dengan peruntukan lantai pertama merupakan kantor gereja kemah Injil Indonesia Wilayah Kalimantan Timur dan lantai 2 merupakan aula serba guna.*
b. *Adapun aula serba guna pada lantai kedua diperuntukan kegiatan internal Gereja Kemah Injil wilayah Kalimantan Timur seperti rapat, seminar, resepsi pernikahan, dan tidak diperuntukkan untuk kegiatan ibadah maupun yang terkait dengan ibadah.*
c. *Aula serba guna pada lantai kedua juga bersifat terbuka sehingga dapat diakses oleh masyarakat sekitar, baik untuk kegiatan olah raga maupun kegiatan umum dengan seijin dan sepengetahuan pengelola gedung serba guna ataupun seijin dan sepengetahuan ketua RT 19.*
d. *Pengelola gedung serba guna tidak diperkenankan memelihara anjing dikarenakan letaknya yang berhadapan persis di depan masjid.*
e. *Pengelola gedung serba guna maupun jamaah yang akan memanfaatkan gedung serba guna wajib mematuhi kebiasaan yang berlaku di masyarakat sekitar, terhadap kebiasaan masjid yang berhadapan dengannya, dan juga terhadap kegiatan masjid sebagai sentral ibadah.*
f. *Pengelola gedung serba guna maupun jamaah yang akan memanfaatkan gedung serbaguna wajib menjaga kedamaian, kenyamanan, dan ketentraman yang selama ini sudah terjalin di lingkungan sekitar.*
g. *Gedung serba guna secara keseluruhan pada lantai pertama maupun pada lantai kedua tidak akan pernah dikemudian hari mengalami alih fungsi menjadi tempat peribadatan.*
h. *Apabila dikemudian hari ditemukan adanya alih fungsi menjadi tempat peribadatan melalui bukti yang kuat*

berupa kesaksian atas nama Tuhan, dokumentasi foto, maupun dokumentasi video dari warga, maka serta merta warga yang bersangkutan secara langsung tanpa kekerasan fisik dapat meminta kepada pengelola gedung serba guna untuk menghentikan kegiatan peribadatannya dengan sepengetahuan pengurus masjid dan ketua RT 19.

i. *Pada poin 8, pihak pengelola wajib mengindahkan tegurannya dengan tidak akan mengulanginya di kemudian hari. Namun apabila tetap mengulanginya maka pengurus masjid At-Taubah yang akan langsung menegur keras berupa surat peringatan atas nama pengurus dan perwakilan kaum muslimin setempat agar tidak mengulanginya lagi dengan sepengetahuan ketua RT. 19.*
j. *Jika pada poin 9 juga tetap dilanggar, maka ketua RT 19 wajib mengeluarkan surat teguran terakhir dengan sepengatahuan pengurus masjid dan lurah Temindung permai.*
k. *Jika pada poin 10 masih tetap dilanggar, maka warga maupun yang mewakilinya akan menyegel dan membongkar bangunan gedung tersebut secara paksa.*
l. *Adapun pelanggaran terhadap poin 3,4,5, dan 6 dapat ditempuh melalui teguran, musyawarah mufakat, dan penyegelan tanpa pembongkaran bangunan sebagai jalan terakhir apabila teguran dan musyawarah mufakat tidak didengar dan dilaksanakan.*

Kluasul ini (sangat wajar) ditolak oleh pihak GKII karena memang menyudutkan mereka. Kluasul ini dibuat oleh kelompok lain dengan mengatasnamakan organisasi mereka. Kebebasan mereka sebagai unit sosial yang mandiri menjadi terpenjara oleh sistem yang dibuat atas nama kepentingan kelompok tertentu. Misalnya kluasul

tentang "tidak bolehnya gedung tersebut digunakan untuk kepentingan ibadah" tentu saja sangat sulit karena bagaimana pun juga, GKII adalah organisasi gereja yang berorientasi kegiatan keagamaan. Menyetujui kluasul di atas sama saja bunuh diri bagi mereka. Kluasul di atas dibuat untuk "menghalangi" gedung tersebut digunakan untuk kegiatan keagamaan.

Di lain pihak, keengganan pihak GKII menyetujui kluasul tersebut semakin membenarkan dugaan pihak warga muslim kalau GKII memang berencana menjadikan gedung tersebut sebagai "pseudo" gereja.

Dalam konteks rumah ibadah, penolakan tidak hanya terjadi antara kelompok berbeda agama (misalnya Islam dan Kristen yang banyak terjadi di Indonesia), tetapi juga dalam internal agama. Beberapa denominasi di Bontang sempat melakukan protes kepada pihak FKUB setempat yang memberi izin pembangunan rumah ibadah kepada Saksi Yehova. Bagi Kristen, saksi Yehova tidak dianggap sebagai bagian dari Kristen karena menyimpang dari ajarang Kristen. Penyegelan masjid Ahmadiyah pun pernah terjadi di Bulukumba (Sulawesi Selatan tahun 2006 dan 2010), di Makassar (Sulawesi Selatan tahun 2011), dan Samarinda (Kalimantan Timur tahun 2013). Sebagaimana diketahui bahwa Ahmadiyah dianggap sebagai aliran menyimpang dalam Islam.

Penolakan terhadap masjid Salafi pun sudah terjadi di Samarinda. Alasan penolakan sebagaimana tertuang dalam surat tersebut, adalah[6]:

a. *Masjid yang akan dibangun sangat dekat dengan masjid yang sudah ada yaitu Masjid Al-Musyawarah, yang jaraknya tidak sampai 90 meter.*

---

[6] Dikutip dari dokumen surat penolakan warga yang ditujukan kepada Yayasan Minhajussunnah, 2014

b. *Sangat berpotensi terjadinya persaingan yang tidak sehat diantara masjid yang jaraknya sangat berdekatan. Misalnya persaingan pengeras suara atau sound system yang akhirnya mengganggu warga sekitar.*
c. Peruntukan masjid menurut hemat kami (warga, pen) bukan diutamakan untuk warga sekitar, tetapi diperuntukkan bagi kelompok jamaah salafi yang tempat tinggalnya jauh dari wilayah masjid. Mengapa kami berpendapat begini? Mengingat karena warga asli sekitar bahkan sesepuh warga tidak dilibatkan dalam kepanitiaan pembangunan masjid.
d. Jika dipandang agama lain selain Islam, seperti terjadi kotak-kotak atau kelompok-kelompok dalam agama Islam itu sendiri (tidak ada persatuan dan kesatuan dalam agama Islam).
e. Panitia seharusnya mengedepankan "etika" dalam membangun masjid yang mempunya jarak yang sangat berdekatan atau sebagai bakal masjid baru, seyogyanya panitia pembangunan permisi atau meminta izin kepada pengurus masjid yang terlebih dahulu sudah ada, apalagi jaraknya sangat berdekatan, serta pihak yayasan dan panitia pembangunan tidak pernah melakukan sosialisasi atau pemberitahuan terlebih dahulu dengan warga sekitar, tapi ternyata bangunan sudah menjadi pancangan yang siap dibangun. Dalam hal ini, dari awal pembangunannya saja sudah tidak benar dan melanggar aturan-aturan, tata krama, sopan santun serta etika. Dan kami berkeyakinan kedepannya pasti akan tidak benar dan mungkin malah lebih parah lagi. Sehingga kami takut akan terjadi gesekan-gesekan dengan warga sekitar yang pada akhirnya menimbulkan konflik.

Kelima tuntutan penolakan ini disertai dengan permintaan untuk tidak melanjutkan pembangunan disertai dengan ancaman, *apabila pihak yayasan memaksakan kehendaknya untuk meneruskan rencana pembangunan masjid tersebut, maka kami sebagai ketua-ketua RT tidak bertanggungjawab, jika seluruh warga kami melakukan anarkisme (untuk menghentikan pembangunan dengan paksa atau kekerasan).*

Penolakan terhadap masjid yang akan dibangun oleh kelompok *Minhajussunnah* (berdasarkan dokumen penolakan tersebut) bermuara pada dua hal; *pertama*, perbedaan ideologi keagamaan. Pascareformasi, perkembangan kelompok Islam Salafi memang sangat pesat. Baik sebagai kelompok pengajian yang bersifat non-organisasi maupun salafi yang berorientasi organisasi modern. Kehadiran kelompok salafi dengan membawa cara beragama dan tampilan fisik yang berbeda dengan masyarakat Islam nusantara memunculkan narasi pertentangan. Baik secara simbolik maupun dialogis.

Masyarakat Islam Kaltim sebagaimana yang dijelaskan pada bagian awal tulisan ini adalah salah satu genre Islam nusantara. Islam yang merupakan campuran harmonis antara teks Islam dan kebudayaan lokal (dalam hal ini kebudayaan Banjar dan Kutai). Bersamaan dengan itu, kelompok Islam.

Salafi yang berkembang belakangan datang dengan semangat puritanistik. Islam dimurnikan dari pengaruh-pengaruh tradisi. Sebisa mungkin ‘kembali’ ke teks primer, Alquran dan hadits. Dua titik ini pada gilirannya memicu munculnya pertentangan. Bukan hanya pertentangan simbolik tetapi juga identitas. Bagi warga setempat,

minhajussunnah yang (dianggap) salafi berbeda dengan mereka. Ini sangat jelas terlihat pada tuntutan nomer 3, dimana kata salafi diassosiasikan sebagai sesuatu yang asing, karenanya dipertentangkan dengan kata "penduduk asli".

Kedua, pertentangan identitas keagamaan ini diperparah dengan hilangnya sikap saling menghargai antar kelompok. Kelompok *minhajussunnah* tidak melibatkan tokoh masyarakat sekitar dalam musyawarah pembangunan masjid. Secara formal, hal itu tidak harus dilakukan. Mengingat masjid yang akan dibangun di atas tanah wakaf milik salah seorang anggota yayasan *Minhajussunnah*.

Penolakan (dari kelompok mayoritas) ini tentu saja bukan bagian dari implementasi ajaran agama tetapi bagian dari ciri khas kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Salah satu rujukan yang baik tentang ciri khas mayoritas adalah teori Walls, sebagai berikut:

1) Sekelompok orang yang bersikap bahwa mereka lebih superior terhadap kelompok etnik yang dianggap inferior.
2) Mereka percaya bahwa kelompok minoritas adalah kelompok "yang lain" karena itu harus dipisahkan bahkan harus disingkirkan.
3) Mereka merasa diri sebagai kelompok yang paling berkuasa, mempunyai status sosial yang tinggi, dan karena itu mereka harus dihormati.
4) Mereka selalu memiliki rasa takut dan selalu curiga bahwa kelompok minoritas selalu berencana menggerogoti faktor-faktor yang menguntungkan kelompok dominan.

Ciri kelompok mayoritas berdasarkan kategori Walls diatas sangat sesuai dengan apa yang dilakukan oleh kelompok warga yang menolak pembangunan rumah ibadah umat lain. Warga mengatasnamakan diri sebagai kelompok mayoritas yang berhak menentukan kehadiran orang lain dalam lingkungan sosial mereka. Tentu saja, sikap ini menjadi preseden buruk bagi umat beragama. Ajaran Islam tentang perdamaian, keadilan, dan kesetaraan menjadi terkoreksi. Simbol formal lebih dikedepankan ketimbang subtansi ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Bagaimana mungkin bisa menjadi rahmat bagi orang lain dengan sikap yang superior dan penuh curiga seperti itu? Begitu pula, ajaran kasih dalam tradisi Kristiani. Bagaimana implementasi kasih itu bisa berjalan dengan baik apabila warga lain dilarang untuk menjalankan ajaran agamanya.

Kedua, masyarakat (ternyata) belum siap untuk hidup berdampingan secara simbolik. Penolakan terhadap gereja di tengah pemukiman muslim menunjukkan adanya endapan kecurigaan dalam nalar masyarakat yang bersifat laten. Pengaturan sosial sedang bergerak kearah keterpisahan bukan penyatuan. Identitas berbangsa mengalami proses subordinasi. Kesatuan sosial tidak bisa dirayakan karena agama dijadikan sebagai simbol perbedaan. Simbol agama tertentu tidak bisa dianggap sebagai bagian dari properti sosial yang 'dimiliki' bersama-sama tetapi milik 'individu' yang harus dipisahkan dari 'individu' lainnya (Bryan S Turner, 2003: 280). Kelompok mayoritas-lah yang berhak untuk menentukan dimana, kapan, dan bagaimana kelompok yang lain hidup. Dalam konteks ini, agama telah menjadi bagian dari pertentangan sosial.

Fenomena ini tentu saja bertentangan dengan tujuan dasar dan falsafah bangsa Indonesia. Bangsa ini dihadirkan dan diimajinasikan sebagai bangsa yang satu, dengan tujuan yang sama. Agama, etnisitas, dan budaya yang beragam menjadi elemen sosial yang diikat dalam kesatuan ide yang kita sebut Pancasila. Salah satu ide dasarnya adalah persatuan. Agama di Indonesia harus menjadi bagian dari ide integrasi itu, bukan sebaliknya.

BAB V

MEMBACA PERSPEKTIF PUBLIK TERHADAP RADIKALISME AGAMA

Orang luar saja yang heboh, kita disini biasa-biasa saja!" Ini ungkapan cuek seorang warga Kota Palu menanggapi peristiwa penangkapan terduga jaringan teroris di Parigi Moutong Sulawesi Tengah yang di- *blow up* secara aktif oleh media massa nasional dan lokal baik elektronik maupun cetak. Ungkapan ini bisa dimaknai bahwa penangkapan kelompok yang dianggap jaringan Santoso itu tidak sampai mengganggu 'ketentraman publik'. Bisa pula dimaknai bahwa masyarakat tidak memiliki kepekaan yang tinggi terhadap keberadaan jarigan teroris di tengah-tengah mereka. Atau bisa pula dimaknai, bahwa beberapa lapisan masyarakat telah memiliki tingkat kematangan psikologis untuk tidak cepat panik terhadap kemunculan jaringan teroris.

Mengapa warga Palu tetap tenang dan cenderung cuek? Salah satu faktornya adalah pola respon publik terhadap fenomena teror yang semakin matang akibat dari frekwensi kejadian yang cukup tinggi. Terorisme dalam beberapa kasus percobaan (bom bunuh diri dan penembakan aparat) tidak berhasil memancing amarah publik untuk saling menyalahkan apalagi saling menyerang. Meski bom yang meledak di Palu (pasca konflik Poso) sengaja diarahkan kepada simbol agama Kristen (Gereja dan Pasar Maesa) tetapi hal tersebut tidak dapat memancing reaksi publik Kristen. Di Poso pun serupa. Kasus bom bunuh diri di depan Kantor Polsek Poso beberapa waktu yang lalu malah menjadi tontonan warga sekitar. Publik mulai memahami dan menyadari bahwa gerakan terorisme pasca konflik komunal tahun 2000 telah bergeser menjadi

konflik vertikal dimana polisi khususnya Densus 88 menjadi musuh utama para teroris. Fenomena seperti ini tentu berbeda ketika eskalasi konflik masih tinggi di tahun 2000. Setiap peristiwa bom disikapi oleh dua pihak (Muslim dan Kristen) dengan mempersiapkan diri untuk siap siaga berperang.[1]

Di luar Palu, berita penangkapan ini – meminjam istilah warga diatas- memang 'heboh'. Selain karena diberitakan secara aktif dan ekslusif seluruh media massa nasional (termasuk media lokal), juga karena sikap Presiden SBY yang langsung melakukan rapat terbatas dengan kementerian yang terkait guna membahas persoalan fenomena ISIS di Indonesia. Ini karena empat orang yang tertangkap adalah WNA yang beretnik Uighur (Mongolia) tetapi dengan paspor Turki. Artinya, ada masalah besar dalam soal keimigrasian dan pertahanan nasional yang kelihatannya sangat mudah dimasuki oleh kelompok teroris dari luar negeri. Presiden SBY mengkhawatirkan situasi keamanan nasional dan mengingatkan seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak terlena terhadap fenomena ISIS.

Peringatan SBY memang penting karena sebelum kejadian penangkapan itu, berbagai lapisan masyarakat yang ditemui meyakini kalau kelompok radikal seperti ISIS tidak ada dan tidak bisa berkembang di Kota Palu. Ada berbagai alasan yang dikemukakan. Ada alasan keagamaan, bahwa nalar dominan masyarakat Palu atau Sulawesi Tengah adalah nalar Islam moderat yang mengedepankan perdamaian, dengan Pesantren Al-Khaerat sebagai rumah produksinya yang paling utama. Ada pula alasan kultural, bahwa orang Kaili (sebagai suku lokal

---

[1] Diolah dari hasil wawancara dari berbagai sumber

utama di Kota Palu) tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal seperti. Atau alasan faktual, bahwa sejak peristiwa bom Maesa tahun 2011 tidak ada lagi kejadian serupa atau kejadian yang mengaitkannya dengan kelompok teroris di Kota Palu hingga munculnya penangkapan jaringan teroris itu.

Perspektif lain dari kalangan akademisi adalah bahwa isu terorisme di Sulawesi Tengah lebih cenderung berorientasi pada permainan perspektif ketimbang faktual. Ada penyederhanaan persepsi yang terus menerus direproduksi oleh negara dan media massa. Poso – mengutip istilah Tahmidi, Sosiolog Universitas Tadulako Palu – menjadi semacam outlet dimana terorisme menjadi pajangan yang paling populer dan menarik. Menyebut Poso berarti menyebut ketidakamanan, kekerasan, konflik, dan terorisme tentunya, atau ketika fenomena terorisme global seperti ISIS mulai meningkat eskalasinya, semua mata melirik ke Sulawesi Tengah sebagai tempat yang harus diwaspadai. Simplifikasi yang terus menerus ini membawa warga Sulawesi Tengah pada titik jenuh. Akibatnya, isu terorisme dianggap sebagai hal yang biasa.[2]

Hal yang senada diungkapkan oleh RS, salah seorang wartawan koran nasional yang berdomisili di Kota Palu. Menurutnya, ada semacam kejenuhan yang dirasakan oleh masyarakat Sulawesi Tengah khususnya masyarakat Palu dan Poso dalam melihat persoalan terorisme. Mereka mulai apatis dan menganggap ada "permainan" di balik semua ini. Ketidakmampuan aparat keamanan menangkap gembong teroris Santoso membuat sebagian kalangan bertanya, tentang apakah terorisme benar sulit diselesaikan,

---

[2] Diolah dari hasil wawancara dengan Tahmidi, aktivis sosial dan dosen Sosiologi Universitas Tadulako, tanggal 18 September 2014 di Kota Palu.

apakah Santoso sedemikian hebatnya hingga tidak bisa tertangkap atau sengaja dipelihara untuk kepentingan tertentu? Yang jelas hingga saat ini, keberadaan Santoso di hutan Poso tetap dianggap sebagai bahaya dan Sulawesi Tengah (khususnya Poso) tetap sebagai 'kawah candradimuka' bagi terorisme di Indonesia, khususnya kawasan Timur Indonesia. Karenanya, Sulawesi Tengah harus terus diamati, diawasi, dan dijadikan sebagai daerah operasi intelejen.[3]

Itulah mungkin sebabnya, kita tidak menemukan parade deklarasi penolakan terhadap kehadiran ISIS di Indonesia dilakukan oleh komunitas muslim Sulawesi Tengah sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat Indonesia lainnya. Contoh yang paling dekat adalah deklarasi penolakan ISIS yang dilakukan oleh FDUI (Forum Daulat Ukhuwah Islamiyah) di Mamuju Sulawesi Barat (14 Agustus 2014), Forum Persaudaraan Imam Masjid Sulawesi Utara (30 Agustus 2014) dan deklarasi penolakan yang dilakukan oleh beberapa komponen organisasi Islam di Kab. Gowa Sulawesi Selatan (September 2014). Masyarakat Sulawesi Tengah tampak lebih tenang menghadapi isu ISIS meski potensi pengembangan ISIS jauh lebih besar di wilayah mereka ketimbang wilayah lain di Kawasan Timur Indonesia.

Tertangkapnya tujuh orang (4 orang diantaranya WNA berpaspor Turki) yang diduga jaringan MIT (Mujahidin Indonesia Timur) pimpinan Santoso yang juga

---

[3] Diolah dari hasil wawancara dengan RS (nama sengaja dirahasiakan), pada tanggal 18 September 2014 di Kota Palu. Tentu saja patut untuk melihat kembali persepsi publik terhadap situasi Poso setelah keberhasilan Pihak TNI-Pori membunuh Santoso dan mengeliminir gerakan Santoso pada tahun 2015.

dianggap sebagai salah satu jaringan ISIS di Indonesia pada hari Sabtu, 13 September 2014 di Kabupaten Parigi Moutong, disusul dengan penangkapan A seorang yang dianggap penggalang dana di salah satu kos di Jl. Tangkasi Kelurahan Birobuli Selatan, Palu Selatan dan satu lagi di Desa Tinggede (Kab. Sigi) seharusnya menjadi peringatan bagi warga Palu dan sekitarnya. Bahwa kegiatan terorisme ada di sekitar mereka dan bukan imajiner. Apalagi, tiga orang WNI yang tertangkap adalah warga Kota Palu dan Donggala yang sehari-hari bekerja sebagai guru, petani, dan sopir mobil rental. Hal itu mengindikasikan bahwa jaringan kelompok radikal masih aktif merekrut sel-sel di Kota Palu. Tidak menutup kemungkinkan masih ada sel jaringan lain yang menyebar di Kota Palu dan sekitarnya. Sistem kerja para kelompok teroris selama ini dalam bentuk sel-sel yang terpisah. Beberapa kelompok bisa saja saling tidak mengenal.

Dugaan bahwa terorisme adalah permainan persepsi ketimbang faktual harus segera dikesampingkan atau diendapkan dulu. Kita tidak bisa membiarkan diri untuk menggunakan teori konspirasi karena itu sangat sulit untuk dibuktikan. Faktanya, jaringan kelompok teroris masih ada di sekitar kita. Jaringannya bukan orang luar – sebagaimana keyakinan banyak orang – tetapi orang Palu yang sehari-hari hidup dan bekerja di Palu dan sekitarnya. Mereka terlihat seperti orang-orang "lugu" yang seharusnya tidak layak menjadi bagian dari gerakan terorisme. Fakta lain, bahwa kelompok teroris internasional pun 'menjadikan' Poso sebagai tempat yang baik untuk membangun jaringan dan konsolidasi bersama. Kedatangan 4 WNA itu memberi indikasi yang kuat terhadap dugaan itu. Termasuk penangkapan dan penembakan jaringan teroris di Dompu yang ditengarai sebagai bagian dari jaringan Santoso. Salah satu terduga yang terlibat disana adalah orang yang diduga

melakukan penembakan di pos polisi di Poso beberapa waktu yang lalu.

Jaringan kelompok radikal memang bekerja dengan sangat rapi. Tidak mudah untuk dideteksi. Bahkan orang-orang terdekat pun tidak menyadari dan tidak menduga keterlibatan seseorang dari kerabat atau kolega mereka. Misalnya, S (salah seorang yang tertangkap) adalah seorang guru olah raga di SLB Negeri 1 Kota Palu. Dia dikenal sebagai orang yang baik. Sebagai guru, dia dikenal penyayang, sabar, dan kerap mengajak anak muridnya ke rumah. Dia juga punya metode pembelajaran olahraga yang spesifik dalam mengajari anak muridnya yang memang difabel. Sebagai anak, dia dikenal sebagai anak yang taat dan berbakti. Dia sering mencuci baju orang tuanya dan setiap hari mengantar adiknya ke sekolah (Radar Sulteng, 18-19/9).

Seluruh citra yang dilekatkan kepada S adalah citra orang baik. Citra yang – dalam pandangan publik – tidak memungkinkan untuknya terlibat dalam kasus kekejahatan apalagi kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) seperti terorisme. Sebenarnya hal ini tidak mengherankan, terorisme di Indonesia berkaitan dengan spirit keislaman. Orang-orang yang selama ini tertangkap sebagai terduga teroris dalam berbagai kasus di Indonesia adalah orang-orang yang secara sosial baik. Mereka orang yang taat beragama dan karenanya menampilkan akhlak yang sangat baik. Semangatnya adalah jihad. Tujuannya adalah perbaikan nilai dan norma Islam yang dianggap sudah melenceng. Kekeliruan utama mereka ada pada cara pandang terhadap negara, pemerintah, modernitas, dan metode tindakannya. Mereka menghalalkan kekerasan sebagai cara untuk mencapai tujuan. Mereka menghalalkan perampokan dan pencurian untuk mendukung logistik

perjuangan. Di titik ini, mereka dipandang secara pejoratif sebagai pelaku kejahatan.

Ada fakta lain yang menarik dalam kasus jaringan Santoso yang tertangkap itu. S misalnya tampil biasa sebagaimana masyarakat umum Kota Palu. Dia tidak berjanggut dan bercelana cingkrang. Dua identitas yang seringkali diala- matkan kepada kelompok terorisme Islam sebagai refleksi nyata dari cara pandang keagamaan yang simbolis. Perfomance S yang "tidak Islamis" menunjukkan beberapa hal. *Pertama*, ada politik permainan tanda baru yang sedang dimainkan kepentingannya tentu untuk penyamaran. Identitas berjanggut dan celana cingkrang adalah tanda yang mudah dikenali dan mudah dikaitkan dengan terorisme. Karenanya, mereka tampil seperti masyarakat pada umumnya agar tidak mudah tercurigai. *Kedua*, boleh jadi S cs hanyalah kurir yang tidak mendapatkan indoktrinasi keagamaan yang ketat. Dia hanya memainkan peran tertentu untuk kepentingan para jaringan teroris di Poso. Contoh ini dengan mudah dilihat pada IC, supir mobil yang ikut tertangkap. Orang ini sehari-hari dikenal sebagai penjual miras selain sebagai supir rental mobil. Tentu agak sulit membayangkan dia sebagai bagian dari gerakan Islamis. Bisa jadi, dia hanya bekerja untuk mengantar WNA tadi dengan bayaran tertentu. Ini semuanya terpulang kepada hasil investigasi pihak kepolisian yang – sampai saat penelitian ini dilakukan – masih terus berproses.[4]

Ketiga, bahwa identitas janggut, celana cingkrang, dan juga cadar seharusnya dipahami lebih proporsional. Tiga simbol ini memang melekat kepada kelompok Islamis di Indonesia tetapi itu harus dipahami sebagai ekspresi

---

[4] Diolah dari hasil wawancara dengan RS.

beragama bukan simbol dari kekerasan ansich. Bagaimana pun juga, identitas itu didasarkan pada teks hadits nabi. Hanya saja mengalami simplifikasi akibat dari perilaku sebagian kelompok Islamis radikal. Simbol itu mengalami pergeseran makna dari ekspresi keagamaan yang bersumber dari teks primer ke simbol kaum Islamis, bahkan dalam satu fase menjadi simbol kaum teroris. Cara pandang ini harus segera diubah karena bisa membangun sentimen negatif terhadap orang-orang yang bercelana cingkrang dan berjanggut. Sebagai contoh yang baik adalah JT (Jamaah Tablig). JT adalah kelompok janggut dan bercelana cingkrang yang paling mendapatkan respon positif dari masyarakat. JT tidak dicitrakan sebagai kelompok yang membahayakan. Mereka hanya fokus mengajak orang beribadah. Mereka tidak hirau dengan hiruk pikuk politik dan isu global. Konsistensi mereka pun mendapatkan apresiasi yang baik dari masyarakat. Kalaupun ada penolakan, itu hanya pada dua hal; sistem *khuruj* (meninggalkan rumah dengan durasi waktu tertentu untuk berdakwah) yang dianggap bertentangan dengan nilai "tanggung jawab" seorang muslim terhadap keluarga dan kebiasaan hidup *nomaden* yang abai pada masalah kebersihan, terutama kebersihan masjid tempat mereka tinggal.

Kelompok teroris bekerja dengan memanfaatkan kelemahan sistem pengawasan pemerintah kota terhadap rumah kos. Rumah kos yang berkembang dengan cepat di Kota Palu menjadi tempat yang 'aman' bagi jaringan teroris untuk 'merekrut' anggota baru atau setidaknya menempatkan jaringan untuk kepentingan tertentu misalnya pasokan logistik. Salah seorang jaringan teroris yang ditangkap di rumah kos di Jalan Tangkasi Kelurahan Birobuli Selatan, Palu Selatan diduga sebagai salah seorang pelaku curanmor yang sudah lama beroperasi di Palu. Dia

menjadi *fai* (penyokong dana) bagi kelompok teroris yang bersembunyi di Poso (Radar Sulteng, 17/9). Artinya, kota Palu menjadi lahan subur untuk mendapatkan sumber dana. Rumah kos yang mudah diakses tanpa sistem pengawasan administrasi menjadi tempat singgah yang paling tepat. Sebagai contoh rumah kos Pak W. Para jaringan teroris sudah satu bulan menyewa rumah kos tersebut tetapi Pak W tidak tahu siapa dan darimana orang tersebut. Artinya, sikap acuh Pak W menyebabkan para jaringan teroris bisa 'hidup tenang' selama sebulan sebelum penangkapan tujuh orang rekannya di Parigi Moutong. Artinya, kalau penangkapan itu belum terjadi bisa diduga para jaringan teroris ini masih tinggal lama di rumah kos tanpa diketahui identitas, asal, dan kepentingannya tinggal di Kota Palu.

Publik Sulawesi Tengah memang harus waspada mengingat penangkapan tujuh orang tersebut lebih bersifat "kebetulan" ketimbang pencarian yang mendalam. Berita media lokal menunjukkan bahwa penangkapan orang itu karena kesalahannya sendiri. Konstruksi informasi menunjukkan bahwa penangkapan para jaringan teroris lebih pada ketidaktenangan mereka menghadapi razia polisi. Gestur mereka yang tiba-tiba berhenti dan berbalik arah tentu saja menimbulkan kecurigaan. Apalagi Densus 88 sebelumnya telah memberikan informasi tentang mobil Avanza merah yang bergerak tengah malam ke arah Poso via Parimo. Ini menunjukkan bahwa kelompok teroris ini adalah kelompok amatir. Mereka mudah panik dan menghindar. Mereka sama sekali tidak memperkirakan kalau gelagat seperti itu justeru memancing kecurigaan. Perhatikan petikan berita berikut ini:

> Kapolres Parimo AKBP Novia Jaya mengatakan awalnya Polres Parimo melakukan razia rutin. Saat

> melakukan razia, sebuah mobil Avanza bernomor polisi B 1925 UKY yang mencurigakan berhenti sejenak beberapa meter dari lokasi razia. Kecurigaan polisi muncul karena tiba-tiba langsung berbalik arah dan langsung kabur.
>
> Lanjut Novia Jaya, melihat mobil berbalik arah para petugas langsung melakukan pengejaran. Bahkan pihak kepolisian sempat melepaskan tembakan tiga kali ke arah mobil tadi, namun mobil berwarna merah itu terus melaju. Polisi akhirnya menemukan mobil tersebut di Desa Marantele sekitar pukul 03.00 dinihari (Radar Sulteng, 14/9/2104).

Perhatikan pula petikan berita selanjutnya:

> Boy Rafli (Karopenmas Divhumas Polri): Penangkapan berawal saat Tim Survellence Densus 88 membuntuti sebuah mobil Avanza merah yang keluar dari rumah kos di Jalan Banteng, Touwa Palu pada Jumat tengah malam. Setelah yakin mobil itu mengarah ke Poso via Parimo, Tim langsung berkoordinasi dengan Polres setempat untuk menggelar razia. (Radar Sulteng, 16/9/2014)

Ada dua hal yang patut diperhatikan dari konteks penangkapan ini. *Pertama*, Poso sebagai tujuan sangat mudah menimbulkan kecurigaan. Tim survaillence Densus 88 menghubungi Polres Parimo setelah yakin mobil Avanza Merah yang keluar tengah malam itu menuju Poso. Sebagaimana yang telah didiskusikan sebelumnya, Poso memiliki citra yang spesifik terkait dengan gerakan terorisme. Motif tujuanlah yang menyebabkan tim survellence mengambil kesimpulan, bukan orangnya. Artinya, orang diatas mobil avanza tersebut tidak tercurigai sebagai jaringan teroris. Kalau mobil tersebut tidak menuju Poso, boleh jadi penangkapan ini belum terjadi.

Kedua, karena penangkapan itu bersifat 'kebetulan', diyakini kelompok sel jaringan teroris yang lain masih ada di Palu dan sedang bersembunyi. Informasi dari seorang penduduk menyebutkan kalau orang yang menyewa kos pak W ada enam orang. Mereka menyewa dua kamar. Setiap pagi dua kamar itu ramai pengunjung. Namun yang tertangkap setelah penangkapan di Parimo hanya ada dua orang. Selebihnya masih kabur. Yang mengkhawatirkan adalah sel jaringan lain yang tidak terhubung secara langsung dengan kelompok sel yang tertangkap ini. kelemahan sistem pengawasan penduduk yang datang dan pergi khususnya di rumah kontrakan menjadi titik yang paling rawan. Artinya, kelompok sel yang tertangkap ini adalah kelompok sel amatir yang tidak memperhitungkan secara cermat dan detil yang memungkinkan mereka tertangkap. Termasuk rute Sulawesi Selatan-Palu-Parimo-Poso adalah rute yang sangat rawan. Mereka bisa memanfaatkan rute Sulsel langsung ke Poso tanpa melalui Palu. Padahal, mereka masuk ke Palu melalui jalur darat bukan udara.

Cara penangkapan jaringan teroris Sulawesi Tengah berbeda dengan konstruksi penangkapan Jaringan teroris di Dompu, NTB (Nusa Tenggara Barat). Kelompok ini memang diburu oleh Densus 88. Orang-orang yang terlibat memang sebelumnya sudah masuk dalam DPO. Penggerebekan dimulai ketika Densus 88 menangkap seorang buronan yang terlibat di bom Poso. Dia juga seorang yang pernah ikut latihan militer di Poso bersama Santoso. Dari sini, Densus melakukan pengembangan, lalu melakukan operasi ke Desa OO Dompu dan Desa Sai. Proses penangkapan pun terkesan alot. Para tersangka teroris melakukan perlawanan hingga meninggal dunia.

A. Media Massa dan Isu Terorisme

Adegan pembuka film Robocop 2014 yang berlatar suatu tempat di Kota Teheran menggambarkan satu kelompok jaringan teroris berwajah Timur Tengah yang secara sengaja melakukan bom bunuh diri dengan menyerang polisi robot yang sedang berpatroli agar dapat diliput oleh media massa. “Tujuan kita bukan untuk membunuh mereka. Tujuan kita mati di depan televisi”, “Jangan bergerak sebelum aku perintahkan. Aku harus pastikan mereka merekamnya!”. Kalimat itu diucapkan oleh Arash pimpinan teroris sebelum mereka melakukan aksi. Robot pertama yang diserang adalah robot yang sedang direkam oleh kamera.

Pesan dari adegan pembuka film ini adalah media massa – khususnya televisi – menjadi instrumen yang sangat penting tidak hanya bagi negara, publik tetapi juga pelaku terorisme. Bagi para teroris, media massa menjadi tempat untuk menjelaskan kepada dunia bahwa mereka masih ada, tidak habis. Para martir yang siap mati selalu *ready stock*. Media menjadi arena para teroris memainkan ‘politik penghadiran’ untuk dua kepentingan, memancing amarah publik internasional dan memancing solidaritas baru dari kelompok Islamis radikal yang tersebar di seluruh dunia. Ini terlihat dari meningkatnya dukungan pemuda Eropa terhadap gerakan ISIS. “Orang-orang menonton insiden di Suriah dari televisi. Mereka menyaksikan tangisan perempuan dan anak-anak untuk membantu. Kami baru saja mengalami hal ini di Gaza. Perasaan ketidakadilan di Timur Tengah mempengaruhi pemuda di Eropa secara negatif,” kata Dr Omer El-Hamdoon, presiden Asosiasi Muslim Inggris (dikutip dari World Bulletin). Media telah berhasil membangkitkan semangat solidaritas seagama yang kuat. Munculnya milisi sipil dari

Indonesia yang bergabung dengan gerakan muslim Afganistan, Al-Qiyadah, Palestina, dan Moro di Filipina Selatan adalah bagian dari ekspresi solidaritas yang dipicu dari pemberitaan media massa. Reaksi demonstrasi pembakaran bendera Yahudi setiap kali terjadi perang di Palestina adalah efek instan dari pemberitaan media massa. Tentu saja ada efek yang baik, misalnya dengan munculnya sukarelawan seperti MER-C yang bekerja untuk kepentingan kemanusiaan. Kelompok ini selain bekerja untuk kesehatan, sesekali mereka menjadi pioner perdamaian. Menariknya, karena kelompok relawan ini tidak bekerja untuk kepentingan ideologi dan agama tertentu tetapi untuk misi kesehatan dan kemanusiaan. Karenanya, kelompok relawan seperti ini muncul tidak hanya dari umat Islam tetapi juga umat Kristen. Artinya, solidaritas Palestina tidak melulu dirasakan dan diaktualisasikan oleh umat Islam. Kita tentu tidak lupa aksi Cristiano Ronaldo yang menolak menukar kaos bajunya dengan pemain Israil sebagai bagian dari solidaritas simbolik terhadap Palestina, termasuk ketika dia mendonasikan sebagian gajinya untuk anak-anak Palestina.

Pola pemanfaatan media sudah menjadi trend gerakan Islamis radikal di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Media yang menjadi favorit kelompok teroris saat ini adalah media *You Tube.* Misalnya video detik-detik eksekusi para sandera oleh algojo ISIS setiap mengeksekusi wartawan atau aktivis kemanusiaan dari Amerika dan Eropa. Setidaknya sudah ada empat orang sandera yang dieksekusi dan disebarkan melalui media *you tube*. Pesannya jelas; perlawanan terhadap Amerika dan sekutu Eropa-nya! ISIS juga sangat rajin mengunggah semangat perlawanan dan solidaritas sesama muslim dengan meredusir beberapa firman Tuhan. Mereka dengan sangat intens melakukan propaganda melalui media *Youtube*

kepada pemuda Eropa. Kelompok teroris lokal seperti MIT pun sering menggunakan media serupa untuk memberi seruan kepada umat Islam untuk melakukan perlawanan terhadap terorisme. Media ini menjadi sangat efektif karena bersifat personal. Dimanapun dan kapanpun bisa mengakses dan mengunggah.

Pun, popularitas ISIS di Indonesia dimulai dari media *You Tube.* Sebagian besar masyarakat Indonesia mulai aware dengan ISIS ketika media nasional memberitakan seorang lelaki bernama Abu Muhammad al-Indonesia dikelilingi beberapa orang berwajah Melayu bersenjata lengkap mengunggah video di *You Tube* pasca Idul Fitri tahun 2014 lalu yang isinya mengajak seluruh muslim untuk bergabung dengan gerakan jihad ISIS. Sejak itu, perbincangan tentang ISIS mulai menjadi perbincangan nasional dan dengan cepat menjadi idiom publik.

Kehadiran media massa baik nasional maupun lokal atau media sosial yang sedang *trend* sangat penting. Media memberi kesadaran kepada warga untuk selalu 'terjaga', bahwa gerakan terorisme masih ada dan aktif. Informasi yang disuguhkan kepada masyarakat menjadi hal yang penting. Pemberitaan media massa tentang ISIS menimbulkan efek resistensi yang besar di Indonesia. Publik di beberapa tempat melakukan perlawanan secara simbolik terhadap ISIS baik dengan cara menghapus grafiti ISIS di Solo, Jawa Tengah hingga deklarasi penolakan ISIS di beberapa wilayah. Artinya, media berhasil membangun kesadaran untuk melakukan perlawanan terhadap gejala terorisme.

Tentu harus dengan frekwensi yang lebih proporsional. Pemberitaan yang terlalu besar dan terlalu intensif justeru melahirkan anomali bagi masyarakat khususnya masyarakat luar. Para pengguna dan pembaca media di luar Sulawesi Tengah misalnya membangun perspektif berdasarkan

informasi yang diterima dan lalu memberi kesan yang spesifik dan simplistik. Poso bagi masyarakat luar sangat menakutkan. Tentu saja ini berbeda dengan masyarakat yang setiap hari ada di Poso. Bagi mereka, Poso tetaplah kampung yang indah, meski pernah menyimpan luka kemanusiaan yang mendalam. Logika itu juga terjadi ketika media massa setiap hari memotret peristiwa demonstrasi mahasiswa Makassar yang selalu berakhir anarkis memberi kesan yang spesifik terhadap mahasiswa Makassar dan dikaitkan dengan budaya Makassar yang dikesankan sangat maskulin. Padahal, bagi warga Makassar, fenomena itu sangat kecil dan tidak mempengaruhi rasa keamanan atau kenyamanan menjadi warga Makassar.

Di Sulawesi Tengah, media lokal Radar Sulteng sangat aktif memberitakan peristiwa terorisme setiap hari sejak tanggal 11 September – 19 September 2014. Bersamaan dengan tragedi 9/11 tahun 2001. Radar Sulteng memuat artikel berjudul Terorisme tidak punya tempat dalam Islam. Isinya mereproduksi keyakinan sebagian besar warga muslim Indonesia bahwa terorisme bukan bagian dari ajaran Islam. Merespon kedatangan Toni Blair ke Indonesia, Radar Sulteng menurunkan dua berita terkait yaitu, Susilo Bambang Yudhoyono bahas ISIS dengan Tony Blair dan TNI Akan Turun ke Pesantren dan Sekolah cegah merembetnya paham ISIS.

Peristiwa penangkapan tujuh orang yang terduga teroris di Parimo pada menjadi berita utama di halaman depan Radar Sulteng selama lima hari berturut-turut. berita yang dimaksud yaitu Densus tangkap WNA Asal Turki (14/9), Dicurigai Terlibat Kelompok MIT, tujuh orang yang diamankan Densus di Desa Marantele (15/9), Densus geledah kos-kosan di Jalan Tangkasi, ditemukan GPS dan Peta dalam tas rombongan WNA yang ditangkap di Parimo, bekuk terduga teroris Internasional, Polres Palu

tingkatkan keamanan pasca penangkapan WNA di Parimo (16/9), Polri masih terus mendalami WNA (17/9), Polisi ungkap penggalang dana satu dari lima warga yang diamankan Densus (18/9).

Radar Sulteng dalam kurun waktu itu juga sering mereproduksi berita internasional yang memang disediakan di rubrik internasional seperti *Jerman Melarang Pemajangan Simbol ISIS, 10 Negara Arab Siap Gabung Perangi IS (14/9), Jihadi Jhon Memenggal Lagi (16/9), 40 Negara Bersatu Menyerang ISIS (17/9), AS Bombardir Sarang ISIS (18/9), Video ke-4, ISIS mendadak lunak (21/9*).

Berita-berita Radar Sulteng yang terkait dengan jaringan teroris yang tertangkap di Parimo dan di rumah kontrakan kota Palu diproduksi dengan menggunakan perspektif 'kepolisian'. Radar Sulteng memosisikan diri sebagai penyambung lidah pihak kepolisian. Karenanya, judul berita ditampilkan dengan aktor utama dari pihak kepolisian. Kita tidak menemukan berita yang mengeksplorasi atau menganalisis siapa tiga orang WNI itu. Informasi yang didapatkan memang tidak banyak. Selain karena ketiga WNI itu masih berada dalam penahanan pihak kepolisian dan belum didampingi pengacara. Sehingga akses media ke subyek terduga masih tertutup. Pihak keluarga pun enggan memberi keterangan lebih banyak karena masih sangat trauma dan tidak percaya. Keterangan tentang S hanya bisa ditemukan dari koleganya di SLB Negeri Batia, Palu. Informasi ini diselipkan di dalam berita yang berjudul Polisi Ungkap Penggalang Dana satu dari lima warga yang diamankan Densus (18/9).

Yang menarik adalah penggunaan idiom penyebutan kelompok itu. Radar Sulteng tidak sekalipun menggunakan term ISIS di judul beritanya. Istilah yang digunakan hanya

dua yaitu "teroris internasional" dan "jaringan MIT (Mujahidin Indonesia Timur)". MIT adalah organisasi sayap radikal yang dipimpin Santoso. Berita pertama yang diturunkan pasca tertangkapnya tujuh orang terduga teroris hanya menyebutkan "WNA Turki" tanpa embel apa-apa. Bandingkan media elektronik nasional yang langsung menggunakan idiom ISIS ketika menyiarkan penangkapan tujuh orang tersebut di running text meski belakangan idiom ISIS semakin hilang digantikan dengan idiom "teroris". TVOne misalnya menggunakan secara jelas idiom ISIS dengan menulis berita "7 orang diduga anggota ISIS tertangkap oleh Densus 88 di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah" di *running text* di salah satu program berita paginya, pada hari Sabtu 13/9.

Media lokal tampaknya cukup hati-hati karena pemeriksaan WNA itu memang tidak dilakukan di Polda Sulteng melainkan di Mako Brimob Kelapa Dua Jakarta. Ini juga dipengaruhi oleh sikap kepolisian lokal yang juga hati-hati mengaitkan ketujuh orang tersebut dengan jaringan ISIS. Perhatikan petikan berita berikut:

> Disinggung keterlibatan mereka dengan ISIS, (Plh. Kabid Humas Polda Sulteng, AKBP) Utoro (Saputro) kembali menegaskan bahwa pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman terhadap para terduga tersebut. Termasuk 4 orang WNA. Karena pada saat diamankan petugas tidak menemukan senpi (senjata api–pen) maupun lambang-lambang maupun adanya bendera bergambar ISIS dari mobil yang digunakan para terduga ini (Radar Sulteng, 15/9).

Media lokal sepertinya tidak terlalu meyakini keterkaitan antara ISIS dan tujuh orang yang tertangkap itu karena lemahnya indikasi ke arah sana. Tidak ada satupun barang bukti yang berkaitan dengan simbol ISIS

ditemukan di mobil yang ditumpangi oleh para terduga. Media lokal di Sulteng hanya 'menemukan' keterkaitan yang erat dengan MIT-nya Santoso. Selain karena tujuh orang yang ditangkap itu memang sedang menuju Poso (tempat Santoso) juga karena S (salah seorang WNI yang tertangkap) adalah orang yang diduga pernah menyembunyikan Mokhtar (DPO Poso) dan A yang tertangkap di rumah kontrakannya adalah pencari logistik untuk Santoso.

Frame berbeda ditunjukkan oleh media berskala nasional. Meski belum mendapatkan penjelasan yang proporsional tentang keterkaitan para WNI dan empat WNA tersebut dengan ISIS, tetapi mereka sudah memasang istilah ISIS di judul beritanya, misalnya media online Tempo.co yang menurunkan berita: *Terduga anggota ISIS pernah Nyantri di Tebuireng (17/9)*, Liputan6.com menurunkan berita: *4 orang terduga ISIS di Palu diduga kelompok Teroris Santoso (17/9)*. Berita Kompas.com juga menurunkan berita: *Satu WNI Terduga ISIS di Poso Jebolan Pesantren Keluarga Gus Dur*.

Harian media nasional yang terlalu cepat menuding keterlibatan jaringan teroris yang tertangkap itu memang patut dipertanyakan. Pasalnya, penjelasan tentang ini tidak memiliki argumentasi yang kuat, misalnya berita Liputan6. Com, sebagai berikut:

> Tim Densus 88 Antiteror juga menggeledah kontrakan yang ditempati terduga anggota Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), di1lawesi Tengah, Sabtu 13 September 2014 lalu. (Liputan6 News 16/9).

Konstruksi berita yang ditampilkan sama sekali tidak memuat argumen yang memadai tentang keterkaitan WNI yang tertangkap sebagai jaringan ISIS. Padahal, setiap penyebutan terduga selalu dikaitkan dengan ISIS

baik dalam bentuk singkatan maupun dalam bentuk kepanjangannya, Islamic State of Iraq and Syiria. Pernyataan dari pihak kepolisian pun tidak ada yang dikutip. Lalu darimana media massa menyimpulkan ini? Tentu saja, ini tidak terlepas dari fenomena ISIS sebagai rising star gerakan radikal Islam yang menggantikan Al-Qiyadah Islamiyah. ISIS yang mengglobal dengan gejala simbolik di Indonesia serta penjelasan "yang masih kurang meyakinkan" dari pihak kepolisian menggiring media massa, khususnya nasional untuk terjebak dalam penyederhanaan gerakan terorisme Indonesia dengan ISIS. Hasilnya, meski pihak kepolisian belum memberikan pernyataan resmi, tetapi media massa dengan segera mengaitkan ini dengan ISIS.

Hal lain yang menarik dalam dinamika media lokal dalam merespon fenomena ISIS adalah frame dalam menampilkan berita internasional. Radar Sulteng cenderung memberitakan ISIS sebagai obyek yang diperangi karena perangai mereka yang sadis dalam membunuh sandera, termasuk menampilkan semangat dunia untuk bersama-sama memerangi ISIS. Perspektif yang digunakan tetap sama, perspektif keamanan. Sedangkan satu media kecil yang beroplah 2000 bernama MAL (Majalah Al-Khaerat) menampilkan berita tentang ISIS dalam perspektif sosiologis. Berita yang berjudul "Kala Pemuda Eropa Berjuang Bersama ISIS" (13/9) ini direproduksi dari laman *World Buletin* menceritakan tentang ketertindasan dan ketidakadilan yang dirasakan pemuda muslim Eropa sebagai alasan utama yang mendorong mereka menyambut baik tawaran berjuang bersama ISIS.

Sebagai media yang berbasis Islam, MAL membangun frame perspektif yang berbeda dalam melihat ISIS. Bahwa ISIS adalah idiom 'pembebasan' baru yang membangkitkan gairah perlawanan pemuda muslim Eropa. MAL ingin mengingatkan kepada kita bahwa semangat Islamisme

tidak muncul dari keinginan untuk melakukan kejahatan tetapi untuk memperjuangkan nilai yang dianggap benar. Ketidakadilan negara yang melahirkan alienasi dan ketertindasan dapat dengan mudah memunculkan semangat perlawanan. Fenomena Islamisme di Indonesia muncul dengan memanfaatkan situasi ketidakadilan sosial yang dilakukan oleh negara (baca; orde baru) terhadap warganya, termasuk dengan menyebarnya paham sekuler dan liberal.

Tampilan berita ini tidak berarti MAL memberi dukungan kepada gerakan ISIS atau mencoba membangun sentimen keagamaan sebagai alat untuk 'membenarkan' kehadiran ISIS. Berita lain yang dilansir menampilkan sisi buruk ISIS seperti berita Jihadis Inggris Buka Tempat Pelacuran. Inti berita adalah bahwa pejuang jihadis Inggris yang bergabung bersama ISIS membuka tempat pelacuran yang disediakan kepada para jihadis (13/9).

B. *Zero Tolerance to Terorisme* dan Radikalisme Agama; Membangun Aksi Merawat Harapan

Terorisme adalah isu global yang bagaimanapun juga harus mendapatkan respon yang serius dari berbagai kalangan. Kita harus mengembangkan sikap *zero tolerance to terorism.* Sikap sebagian warga Kota Palu yang menanggapi dingin kehadiran jaringan teroris di tengah mereka adalah sikap yang bisa menumbuh-suburkan kecambah terorisme di sana. Toh, publik juga tidak peduli mereka ada atau tidak, dan bahkan dianggap "biasa".

Para jaringan teroris bisa leluasa untuk tetap membangun sel-selnya dan melanggengkan idiom kekerasan, yang sewaktu- waktu bisa meledak. Ini terlihat dari 'lemahnya' kesadaran para pemilik rumah kos untuk berpartisipasi dalam pelaporan penghuni baru. Padahal, ini bukan kejadian pertama. Pelaku bom Pasar Maesa

tahun 2011 lalu pun pernah "nge-kos" di salah satu rumah di Jl. Anoa, Kelurahan Tatura Utara, Palu Selatan.[5] Seharusnya kejadian itu memberi kesadaran kepada pemerintah lokal untuk membuat aturan dan kepada setiap pemilik kos untuk berpartisipasi aktif.

Sejauh ini respon berbagai pihak dalam hal kemunculan gerakan terorisme khususnya ISIS di dunia dan lebih spesifik di beberapa wilayah Indonesia. Di Sulawesi Tengah, IAIN Palu menggelar diskusi ilmiah tentang gerakan ISIS yang menghadirkan Prof. Azyumardi Azra di gedung Auditarium pada tanggal 8 Agustus 2014. PKUB Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Tengah juga menggelar kegiatan tentang pemetaan kelompok aliran sempalan dan radikal di Sulawesi Tengah pada akhir Agustus 2014. Di Kampus Untad (Universitas Tadulako) Palu – meski tidak spesifik ditujukan sebagai respon akademik terhadap fenomena ISIS -, forum pembekalan mahasiswa baru dimanfaatkan oleh pihak TNI untuk menambah wawasan kebangsaan para mahasiswa baru. Salah satu poin yang diungkapkan oleh pihak TNI adalah para mahasiswa jangan cepat mudah terpengaruh oleh gerakan terorisme seperti ISIS (Radar Sulteng 19/9).

Di Makassar, reaksi kampus juga terlihat cukup aktif. Di kampus UIN Alauddin Makassar pernah digelar seminar sehari yang bertema Selamatkan Indonesia dari ISIS dengan menghadirkan pihak BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) pada 27 Agustus 2014. Seminar ini kerja sama kampus dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Metro Makassar, salah satu organisasi mahasiswa Islam pun menggelar acara serupa

---

[5] Diolah dari hasil wawancara dengan Sudin, Lurah Tatura Utara Kec. Palu Selatan.

dengan kegiatan diskusi bertajuk, Ideologi transnasional dan ancaman terhadap Identitas Kebangsaan, pada tanggal 17 september 2014. Reaksi yang sama juga terlihat di Polman, Sulawesi Barat. Sebuah LSM Muqim Patappulo bekerja sama dengan Kesbangpol Kabupaten Polman melaksanakan diskusi sehari dengan tema deradikalisasi agama pada tanggal 04 September 2014.

Reaksi akademis yang terjadi di berbagai tempat menunjukkan besarnya perhatian publik terhadap 'bahaya' kelompok Islamis, terutama yang berorientasi radikal seperti ISIS. Ini tentu tidak terlepas dari memori masa lalu, tentang tindakan kaum Islamis yang tidak hanya membahayakan ideologi bangsa tetapi juga merenggut nyawa anak bangsa. Meski cenderung artifisial, tetapi respon akademik tetap dibutuhkan untuk memelihara 'kewaspadaan' terhadap fenomena radikalisme agama yang terus menerus ada. Orang kampus diharapkan lebih proaktif untuk menginisiasi kampanye perdamaian, untuk mendukung upaya *zero tolerance* terhadap gerakan terorisme dan radikalisme agama.

Program pemerintah lokal dalam merespon gerakan terorisme cukup baik. Pada medio tahun 2013, Pemkot Palu bekerjasama dengan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) melakukan bimtek (bimbingan teknik) penanggulangan terorisme kepada seluruh perangkat kelurahan se kota Palu. Ini melengkapi operasi yustisi yang rutin dilakukan setiap enam bulan sekali di tingkat kelurahan. Operasi yustisi selain untuk kerapian administrasi kewargaan juga dimaksudkan untuk mempersempit ruang gerak jaringan teroris di Kota Palu.[6] Peran strategis para dai lokal yang setiap saat menjadi juru

---

[6] Diolah dari hasil wawancara dengan Dwi dan Hisham, Lurah dan Sekretaris Lurah Birobuli Selatan, Palu Selatan.

bicara perdamaian dalam perspektif agama Islam pun menjadi elemen penting. Forum Imam yang diinisiasi oleh KUA Kecamatan Palu Selatan (Khaerollah) meski di satu sisi untuk 'menadah' program keagamaan pemerintah kota, tetapi di sisi lain forum ini menjadi instrumen yang sangat strategis dimanfaatkan sebagai kekuatan *civil society* untuk menangkal penyebaran paham radikalisme agama di tingkat lapisan masyarakat yang paling bawah. Yang tak boleh terlupakan, peran kultural Perguruan Al-Khaerat yang sangat kuat mewarnai pentas keagamaan di Sulawesi Tengah (ini akan dibahas lebih lanjut pada bagian keempat).

Beberapa elemen keagamaan masyarakat Gowa melakukan deklarasi penolakan ISIS. Deklarasi ini disponsori oleh MUI. Pembaca deklarasi oleh pimpinan Pesantren Bahrul Ulum, Kab. Gowa. Meski di Gowa tidak ditemukan indikasi adanya jaringan ISIS, tetapi itu tidak menyurutkan sikap elemen organisasi agama yang ada di Gowa untuk bersikap memberi penolakan. Ancaman radikalisme agama di Gowa memang cukup kuat karena di tempat ini ada banyak kelompok aliran yang bermunculan seperti An-Nadzir, Bahai, dan Gafatar.

Respon massif dari berbagai elemen masyarakat yang mengindikasikan penolakan yang kuat terhadap potensi radikalisme adalah kekuatan sipil besar yang patut dipelihara. Sebagaimana yang disebutkan Azyumardi Azra, bahwa 'militan ISIS memang bisa merekrut sebagian kecil masyarakat Indonesia namun di sisi lain penolakan terhadap gerakan ini juga sangat besar". Perkiraan Azyumardi Azra tidaklah salah. Gerakan terorisme di Indonesia adalah gerakan yang sangat kecil. Pengikut dan jaringannya pun tidak banyak dalam hal kuantitas. Jaringan ISIS yang direkrut menjadi pejuang di Suriah hanya berjumlah 30 orang lebih. Jaringannya di Indonesia

yang secara terang-terangan mendukung pun bersifat sporadis. Malah, penolakan terhadap gerakan ISIS di Indonesia misalnya sangat besar. Tidak hanya berasal dari kelompok Islam moderat tetapi juga dari kelompok Islamis. FPI misalnya secara tegas menyatakan penolakan terhadap gerakan terorisme ISIS. Beberapa anggota MMI (Majelis Mujahidin Indonesia) pun menyatakan penolakan terhadap gerakan ISIS karena dianggap keluar dari garis perjuangan yang benar. Hal ini dipengaruhi oleh pernyataan Syaikh Abu Abdullah Asy-Syami (Mujahidin, mantan anggota ISIS) yang menyatakan bahwa ISIS adalah sempalan Al-Qaeda pimpinan Jabhal Nusro, yang perjuangannya tidak sejalan dengan Al-Qaeda.[7] Artinya, membayangkan gerakan terorisme akan memperoleh dukungan yang luas tentu mustahil.

Akan tetapi, pendekatan kuantitas tidak bisa dipakai untuk melihat dan lalu mengembangkan sikap seolah-olah kegiatan terorisme tidak mengancam kehidupan kita baik dalam level mikro misalnya keamanan masyarakat maupun dalam level makro seperti ancaman terhadap ideologi kesatuan dan ketahanan nasional. Persoalan terorisme bukan persoalan jumlah tetapi soal kemampuan mereka merekrut dan mengindoktrinasi orang untuk melakukan bom bunuh diri. Satu bom yang dilakukan satu dua orang memiliki efek yang sangat besar. Rentetan kasus bom yang terjadi dalam satu dasawarsa hanya dilakukan oleh beberapa orang saja, tetapi efeknya sangat besar dalam merubah wacana dunia terhadap Indonesia, khususnya Islam.

Apalagi, potensi radikalisme agama tidak akan pernah habis akibat dari pemahaman keagamaan dan

[7] Dikutip dari makalah KABINDA Provinsi Sulawesi Barat 2014

situasi politik yang tidak terkendali dengan baik. Hasil penelitian tim peneliti Balitbang Agama Makassar (2016) yang menyatakan ada sejumlah kecil siswa SMA yang menyatakan dukungan terhadap kekerasan atas nama agama adalah *early warning* yang harus disikapi dengan kerja keras hingga berada pada titik *zero tolerance to radicalism.*

Program *zero tolerance to radicalism* bisa dilakukan dengan tiga cara. *Pertama*, gerakan sistematik dan bersifat *directing program* seperti yang dilakukan oleh BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) tetap penting untuk dilakukan. Perang melawan radikalisme agama melalui program deradikalisasi agama menjadi sangat penting untuk dilakukan. Peristiwa kekerasan berbasis agama tidak pernah berhenti karena ada kelompok berbasis agama yang memang memiliki agenda kekerasan seperti ini. Penting untuk diingat bahwa kekerasan berbasis agama ini "dikuatkan" dengan legitimasi jihad. Para pelaku kekerasan atas nama agama tidak pernah menganggap perilaku mereka sebagai sebuah kesalahan, tetapi bagian dari membela dan menjernihkan ajaran Islam, bahkan dalam level tertentu, segala perilaku mereka dianggap sebagai bagian dari jihad. Kematian atas jihad adalah kehormatan.

Kedua, peta dakwah sangat penting untuk dirumuskan di setiap wilayah. Perumusan peta dakwah mendesak untuk dilakukan oleh kementerian agama dalam konteks mendeteksi setiap potensi gerakan radikalisme berbasis agama hingga di wilayah terkecil. Ini karena gerakan terorisme (khususnya) yang bekerja di bawah tanah biasanya memanfaatkan kelengahan warga terhadap kehadiran mereka. Peta dakwah dimulai dengan melakukan pemetaan.

Ketiga, promosi Islam damai secara terus menerus. Meski semua agama berpotensi melahirkan radikalisme agama sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya tetapi gerakan radikalisme Islam di Indonesia patut mendapat perhatian karena gerakan ini selalu menghadirkan kejutan- kejutan termasuk keberlanjutan generasinya. Setiap tahun selalu saja ada ancaman bom terjadi (terakhir terjadi di Samarinda, pada penghujung tahun 2016). Promosi wacana keislaman yang damai menjadi sangat penting melalui pelatihan di tingkat kampus dan sekolah.

Balai Litbang Agama tahun 2016 menginisiasi program promosi Islam damai dengan membuat modul pelatihan Islam Nusantara yang ditujukan bagi mahasiswa. Modul ini secara sederhana bertujuan untuk merekonstruksi model keislaman yang dipromosikan oleh ulama terdahulu yang menyelaraskan budaya dan agama. Budaya Indonesia yang memiliki sisi unik tidak dihilangkan begitu saja tetapi diisi dengan semangat keislaman. Modul ini juga bertujuan untuk menguatkan semangat nasionalisme dengan bahasa agama.

C. Melawan Radikalisme Agama dengan Pesantren

Saya mohon maaf kepada panitia bila kemarin saya banyak tanya kenapa kegiatan ini dilakukan di pesantren. Jangan-jangan ada yang susupi. Karena sekarang ini banyak persepsi negatif terhadap pesantren terkait dengan pesantrennya Abu Bakar Baasyir. Kemarin saya yang membacakan deklarasi penolakan ISIS di Kab. Gowa. Kalau soal Pancasila, kami setiap hari senin membacakan pancasila di upacara bendera.

Ungkapan ini disampaikan oleh pimpinan Pesantren NU Bahrul Ulum Kab. Gowa ketika memberi sambutan

acara seminar kebangsaan “Implementasi Nilai Pancasila dalam Masyarakat” kerja sama eLSAS dan Kementerian Dalam Negeri tanggal 25 September 2014. Ungkapan yang menunjukan ‘kekhawatiran’ pesantren dikaitkan dengan ideologi radikal seperti ISIS adalah bentuk terjemahan dari cara pandang dunia terhadap Islam. Pasca tragedi WTC (World Trade Center) pada tanggal 11 September 2001, sentimen anti- Islam bermunculan dimana-mana. Mulai dari intimidasi kaum muslim di Eropa hingga munculnya film dan kartun yang ‘menghina’ Nabi Muhammad.

Cara ini kembali terlihat ketika ISIS mulai merebak di seluruh dunia. Islam Indonesia menjadi obyek perhatian dunia. Kedatangan Tony Blair pada tanggal 12 September 2014 yang secara khusus membahas Islam di Indonesia mengindikasikan itu. Islam Indonesia menjadi penting dibicarakan dalam dua hal, sebagai tempat jaringan terorisme dan sekaligus sebagai tempat perlawanan ideologis. Kedatangan Tony Blair menunjukkan betapa Islam Indonesia menjadi perhatian dunia ‘ketika’ terorisme kembali merebak. Ini tentu saja, tidak terlepas dari simplikasi Islam dan terorisme yang memang mulai menggejala pasca tragedi 9/11.

Akibat yang paling menyedihkan dari simplikasi itu adalah munculnya perspektif yang buruk terhadap pesantren. Kemunculan jaringan ISIS di Indonesia membuat pesantren kembali menjadi ‘tertuduh’ seperti yang dirasakan oleh pimpinan Pesantren Bahrul Ulum tadi. Media nasional Tempo.com sudah menunjukkan tuduhannya terhadap pesantren dengan membuat judul berita yang sangat simplistis. Terduga anggota ISIS Pernah Nyantri di Tebuireng. Pilihan judul ini tentu tidak muncul begitu saja tetapi ada upaya yang melanggengkan defenisi lama yang mengaitkan pesantren dengan kegiatan terorisme di Indonesia. Semua orang tahu, pesantren Tebuireng adalah

pesantren yang memiliki sejarah panjang dan peran penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Tidaklah mungkin pesantren Tebuireng menjadi tempat pembibitan gerakan radikalisme agama.

Beberapa hari sebelumnya, Jenderal TNI Moeldoko mengeluarkan pernyataan untuk masuk ke pesantren dan sekolah untuk mencegah penyebaran paham ISIS. Perhatikan petikan berita di bawah ini:

> Perkembangan ISIS di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Keberadaan kelompok radikal itu sudah terdeteksi di beberapa kota seperti Solo dan Pekanbaru. Untuk menangkal semakin berkembangnya kelompok terlarang itu, TNI akan mengerahkan anggotanya masuk ke pesantren-pesantren dan sekolah. Rencana itu dipaparkan oleh Panglima TNI Jenderal Moeldoko saat menggelar silaturrahmi antara TNI dan Ormas Islam di Mabes TNI Cilangkap kemarin (10/9). Moeldoko menyatakan pihaknya siap membantu negara untuk memerangi kelompok yang dikabarkan sempalan Al-Qaidah itu. “Kami siap memerangi ISIS di Indonesia. Apalagi kini keberadaan ISIS semakin nyata”.
>
> Pria asal Kediri itu mengatakan TNI sudah menyiapkan cara untuk menangkal keberadaan kelompok radikal itu. Caranya dengan menerjunkan anggota TNI ke pesantren-pesantren dan sekolah. Tidak dalam rangka memata-matai institusi tersebut namun prajurit TNI akan menjadi pengajar. Mereka akan mengajar tentang pemahaman kebangsaan dan membongkar apa sebenarnya paham ISIS yang dianggap terlarang itu. Menurut dia dengan cara-cara yang membuka wawasan akan lebih mudah memberi pengajaran (Radar Sulteng, 12/9).

Pesantren sudah sejak lama dicurigai sebagai lahan subur ideologi terorisme hanya karena sebagian pelaku terorisme alumni salah satu pesantren Ngruki. Memori itu oleh media Tempo hendak dihadirkan kembali ke permukaan untuk membenarkan asumsi yang terlampau tidak adil terhadap pesantren, bahwa perilaku terorisme adalah produk pesantren. Sikap TNI yang ingin mengajari pesantren dan sekolah-sekolah wawasan kebangsaan menunjukkan apriori yang berlebihan terhadap dunia pesantren. Padahal, pesantren adalah lembaga perguruan asli Indonesia yang menjadi penyokong utama nalar kebangsaan. Pesantren menjadi tempat persemaian universalitas Islam, nilai lokal, dan nilai kebangsaan. Lalu mengapa TNI harus masuk ke pesantren untuk mengajarkan wawasan kebangsaan?

Pesantren adalah korban. Tetapi anehnya, beberapa elemen bangsa justeru melanggengkan narasi 'korban' itu. Setiap gerakan terorisme berkembang, pesantren menjadi salah satu titik yang 'patut' diwaspadai. TNI sebagai elemen ketahanan nasional merasa penting untuk masuk ke pesantren, untuk "mengajari" pesantren tentang wawasan kebangsaan.

Memang harus diakui, perkembangan masyarakat Islam Indonesia belakangan memang sangat pesat. Pesantren-pesantren berbasis salafisme pun berkembang dengan pesat. Munculnya beberapa pelaku teroris bom Bali yang merupakan alumni Pesantren Ngruki menyebabkan kecurigaan terhadap pesantren mulai tumbuh. Padahal, simplifikasi ini membahayakan eksistensi pesantren. Ajaran Islam memang mengandung unsur "perlawanan" terhadap ketidakadilan yang terefleksi dari semangat jihad. Tetapi, pada pelaku bom bunuh diri memiliki pengalaman personal yang sangat panjang dimana wacana tidak semata dipengaruhi oleh pesantren. Artinya, wacana

kepesantrenan – kalaupun mengarah pada radikalisme agama – tidak tunggal dan dominan dalam memengaruhi pilihan individu seseorang. Ada banyak faktor lain yang menyebabkan seorang alumni pesantren tumbuh menjadi pribadi yang berbeda dengan semangat kepesantrenan.

Dalam sejarah Indonesia, pesantren adalah salah satu sendi utama bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan dan menginisiasi integrasi agama (Islam) dan nalar kebangsaan. Peran Kyai Hasyim Asy'arie dalam mendorong perlawanan terhadap tentara Sekutu dalam perang Surabaya tangga1 10 November 1948 adalah bentuk nyata peran pesantren dalam konteks nasionalisme. Seruan jihad Kyai Hasyim Asyarie membangkitkan perlawanan para santri yang ikut bergabung dengan pasukan Bung Tomo.

Di kawasan Timur Indonesia, ada tiga pesantren "tua" yang memiliki pengaruh penting dan menjadi elemen penting dalam konteks pembangunan bangsa. Pesantren yang dimaksud adalah pesantren Al-Khairat yang berbasis di Palu (Sulawesi Tengah), Pesantren As'adiyah yang berbasis di Sengkang (Sulawesi Selatan), dan Pesantren DDI (Darul Dakwah wal Irsyad) yang berbasis di Barru, Pinrang, dan Pare-Pare (Sulawesi Selatan). Tiga pesantren ini memiliki jaringan yang cukup kuat di kawasan Timur Indonesia.

Pesantren Al-Khairat menjadi simbol dari penerimaan ulama terhadap nasionalisme. SIS Al-Jufri yang populer dalam masyarakat Sulawesi Tengah dengan sebutan "Guru Tua" adalah ulama yang secara terang-terangan menyatakan dukungan kepada kemerdekaan Republik Indonesia, ketika diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta.

Pesantren Al-Khairat menjadi simbol Islam nasionalis dengan watak moderat. Pesantren Al-Khairat mendapatkan kepercayaan publik yang sangat tinggi untuk menjadi

tempat persemaian keislaman dengan model yang moderat dan damai. Perhatikan petikan wawancara berikut:

> Disini, tidak bisa berkembang yang begitu-begitu. Orang Bodoh itu kalau ada yang mau bergabung seperti ISIS itu. Kuat Al-Khaerat disini pak! Kalau sudah ada yang aneh-aneh pasti orang sudah tolak. Saya pernah juga pak diajak oleh (Jamaah) tabligh. Saya bilang bagus, tetapi kalau sudah berlebih-lebihan sudah susah. Kalau Al-Khaerat itu sederhana pak. Sehari-hari yang lurus saja (An, warga palu)

Ini ungkapan seorang warga Palu yang sehari-hari berprofesi sebagai supir angkutan umum yang melayani jasa pengangkutan dari Bandara ke segala jurusan dalam kota. Ada dua idiom menarik dari kalimatnya. "kuat Al-Khaerat disini" dan "yang aneh-aneh". Al-Khaerat menjadi penting dalam struktur sosial masyarakat Palu. Lembaga pesantren yang dididirikan oleh Al-Mukarram Sis (Sayyid Idrus bin Salim) Al-Djufrie menjadi titik tolak bagi warga untuk mengartikulasikan identitas keislamannya. Al-Khaerat berhasil menciptakan 'imajinasi' tentang apa yang disebut dengan Islam yang baik bagi warga Palu. Sehingga dalam pikiran sopir tadi, JT (Jamaah Tabligh) adalah sesuatu yang aneh, asing, bukan bagian dari dirinya. Karena cara beragamanya berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Al-Khaerat yang "sederhana dan sehari-hari lurus". Tentu saja yang dimaksud sopir tadi adalah sistem "khuruj" yang menjadi ciri khas JT.

Dengan cara itu pula, si sopir merasa kalau orang yang mau ikut gerakan radikal itu adalah orang bodoh. Gerakan itu bukan hanya tidak sesuai dengan 'angan-angan' tentang Islam yang sebenarnya tetapi juga tentang 'pengorbanan' yang tidak masuk dengan melakukan

tindakan-tindakan radikal seperti bom bunuh diri. Warga ini percaya betul model keagamaan yang dikembangkan Al-Khaerat adalah mekanisme pertahanan yang sangat efektif dalam mencegah segala bentuk pengaruh Islam yang muncul belakangan.

Suara rakyat ini tentu saja bukan suara hampa yang lahir dari kekaguman yang berlebihan terhadap Al-Khaerat. Kelompok elit Palu pun merasakan hal yang sama. Salah contoh adalah petikan wawancara berikut ini:

> Di Palu tidak ada (radikalisme) ... karena ada lembaga pendidikan yang sudah mengakar. Al-Khaerat yang paling besar di Sulawesi Tengah. Al-khaerat ini kan punya paradigma keagamaan yang moderat. Di lain tempat ada juga DDI, NU, dan juga Muhammadiyah. Jadi yang radikal hampir pasti tidak bisa masuk ke Palu. Bahkan menurut saya di Poso pun, masyarakat tidak terlalu respon. (Wawancara Khaerullah, KUA Palu Selatan).

Al-Khaerat menjadi isu penting dibicarakan dalam konteks Sulawesi Tengah tanpa bermaksud mengabaikan organisasi massa Islam lainnya seperti NU dan Muhammadiyah. Al-khaerat telah demikian berhasil mengembangkan satu sistem norma Islam yang berangkat dari cara berfikir Islam yang moderat. Lembaga pendidikan Al-Khaerat yang berjumlah ribuan di kawasan Timur Indonesia khususnya di Sulawesi Tengah, Manado, Maluku dan Maluku Utara menjadi pilar penting pembentukan generasi muslim Indonesia yang moderat.

Peran pesantren kembali menjadi signifikan dalam konteks nasionalisme ketika terjadi pergolakan politik yang berbasis agama dengan munculnya DI/TII yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar. Pergolakan politik yang

semula terjadi karena distribusi militer yang kurang adil berubah menjadi gerakan politik Islam.

Kahar Muzakkar mendirikan Darul Islam (Negara Islam) dan mencoba mempromosikan ke umat Islam di Sulawesi Selatan. Salah satu cara yang dilakukan oleh Kahar Muzakkar adalah merekrut ulama Sulawesi Selatan sebagai bagian dari pemerintahannya. Beberapa ulama dibawa (paksa) masuk ke hutan untuk dijadikan sebagai menteri. Ulama yang sempat dibawa adalah KH. Abdurrahman Mattammeng, KH. Abdurrahman Ambo Dalle, KH. Junaid Sulaiman, KH. Rafi Sulaiman dan beberapa ulama lainnya. Ulama-ulama As'adiyah secara tegas menolak keberadaan DI/TII. Mereka tidak bersedia diajak untuk menjadi bagian dari DI/TII.

Pesantren harus diletakkan sebagai bagian penting dalam proses 'perlawanan' terhadap terorisme dan radikalisme agama bukan sebaliknya. Dalam konteks Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan, pesantren telah memainkan peran yang sangat penting dalam proses membangun nasionalisme dan sekaligus menolak bentuk radikalisasi agama.

Para ulama berperan penting dalam 'gagal'-nya gerakan DI/TII di Sul-sel dengan menolak bergabung. Kalaupun ada beberapa ulama yang bergabung, itu melalui proses "penculikan". Hanya KH. Ahmad Marzuki (pendiri Pesantren Darul Istiqamah) yang secara nyata memberi dukungan. Ulama-ulama seperti AG.H. Abdurrahman Ambo Dalle, AG.H. Abdurrahman Mattammeng, AG.H. Junaid Sulaiman, AG.H. Rafii Sulaiman yang sempat ikut ke hutan tidak membangun keberpihakan ideologis. Ketika mereka keluar dari hutan tak satu pun yang melanjutkan model perjuangan Islam ala DI/ TII. Gurutta Ambo Dalle misalnya kembali sebagai "tulang punggu" pesantren DDI dengan mengembangkan wacana keislaman sunni yang

moderat dan toleran. Sedangkan ulama lain seperti AGH. Yunus Martan, AG.H. Muhammad Ramli, dan AG.H. Abdul Malik Muhammad secara tegas menolak. Bahkan penolakan AGH. Yunus Martan dan AGH. Abdul Malik Muhammad disertai dengan cerita-cerita karamah.

Jargon “Negara Islam” yang dikampanyekan oleh Kahar Muzakkar tidak cukup kuat menarik perhatian para ulama Sulawesi Selatan. Dengan demikian, gagalnya gerakan DI/TII tidak semata-mata karena keberhasilan negara “menghabisi” pasukan Kahar melalui operasi militer, tetapi juga karena para ulama tidak memberi dukungan penuh.

Mengapa para ulama Sulsel menolak DI/TII? Para ulama ini sudah khatam dengan “fiqhu siyasah”. Politik dalam pengertian semua madzhab Sunni adalah perilaku yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad (Ahmad Baso, 2013). Politik yang dipahami oleh para ulama nusantara yang berhaluan Syafi’ian adalah politik berbasis kemaslahatan umat. Pembentukan Negara Islam adalah *ijtihadi*, bukan *dharuri*. Pilihan, bukan kewajiban syar’i. Kalaupun dilakukan harus dengan tujuan utama (*maqasid syar’i*) kemaslahatan umat bukan bentuk negara. Oleh karena itu, ulama Indonesia tidak memiliki pemahaman untuk memformalkan agama sebagai bentuk negara.

Pesantren Al-Khaerat, Pesantren As’adiyah, Pesantren DDI (Darul Dakwah wal Irsyad, dan pesantren lainnya telah membuktikan diri sebagai bagian penting dalam perjalanan memelihara ideologi dan wacana keislaman yang berkesesuaian dengan visi kebangsaan Indonesia. Alumni pesantren ini menjadi bagian dari penyebar model keislaman moderat yang menyebabkan wacana keislaman di Indonesia berjalan pada alur moderatisme dan lentur terhadap perubahan sosial yang terjadi dari masa ke masa.

DAFTAR PUSTAKA

Abegebriel, A. Maftuh dkk. 2004. *Negara Tuhan*. SR-Ins Publishing, Jakarta Selatan.

Al-Jabeeri, Abed. 1990. *Hiwar al-Masriq wa al-Magrib*. Muassasah al-Arabiyah, Beirut, Libanon.

Anderson, Benedict. 2002. *Imagined Community; Komunitas-Komunitas Terbayang*. Yogyakarta: INSIS-Pustaka Pelajar. Antoun, Richard. 2003. Memahami Fundamentalisme, terj. Muhammad Shodiq. Pustaka Eureka, Surabaya.

Aritonang, Jan. S. 2000. *Aliran-Aliran di Sekitar Gereja*. BPK. Gunung Mulia. Jakarta.

Azra, Azyumardi. 1993. *Fenomena Fundamentalisme dalam Islam dalam Ulumul Qur'an Nomor 3*, Vol. IV. Jakarta.

Azra, Azyumardi. 1993. *Memahami Gejala Fundamentalisme di dalam Jurnal Ulumul Quran*, nomor 3, volume 4.

Denny, Frederick. M. 1987. *Islam and the Muslim Community.* Herper and Row, New York.

Fealy, Greg dan Anthony Bubalo. 2007. *Jejak Kafilah; Pengaruh Radikalisme Timur Tengah di Indonesia*. Bandung: Mizan. Gelner, Ernst. 1992. Postmodernisme, Reason, and Religion. London.

Jamhari dan Jajang Jahroni. 2004. *Islam Radikal dan Pluralisme Agama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

Jenkins, Richard. 2004. *Membaca Pikiran Pierre Bourdieu*. Kreasi Wacana, Yogyakarta.

Lewis, Bernard. 1993. *Islamic and The West*. Oxford University, Newyork.

Marty, Martin E. 1992. "*What is Fundamentalism? Theological Perspective*" dalam Kung dan Moltmann (ed), Fundamentalisme as a Ecunemical Challenge. London.

Moleong, Lexy. 1989. *Metodology Penelitian Kualitatif*, Remadja Karya, Bandung.

Sugiri, S dan kawan-kawan. 1995. *Gerakan Karismatik Apakah Itu*?. BPK Gunung Mulia. Jakarta.

Sztompka, Piotr. 2007. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group.

Tibi, Bassam. 1998. *The Challenge of Fundamentalism Political Islam and the New World disorder*. Regent of University of California, Californi.

الإدارة العالية لجمعية
N U
نهضة العلماء
١٣٤٤
1926
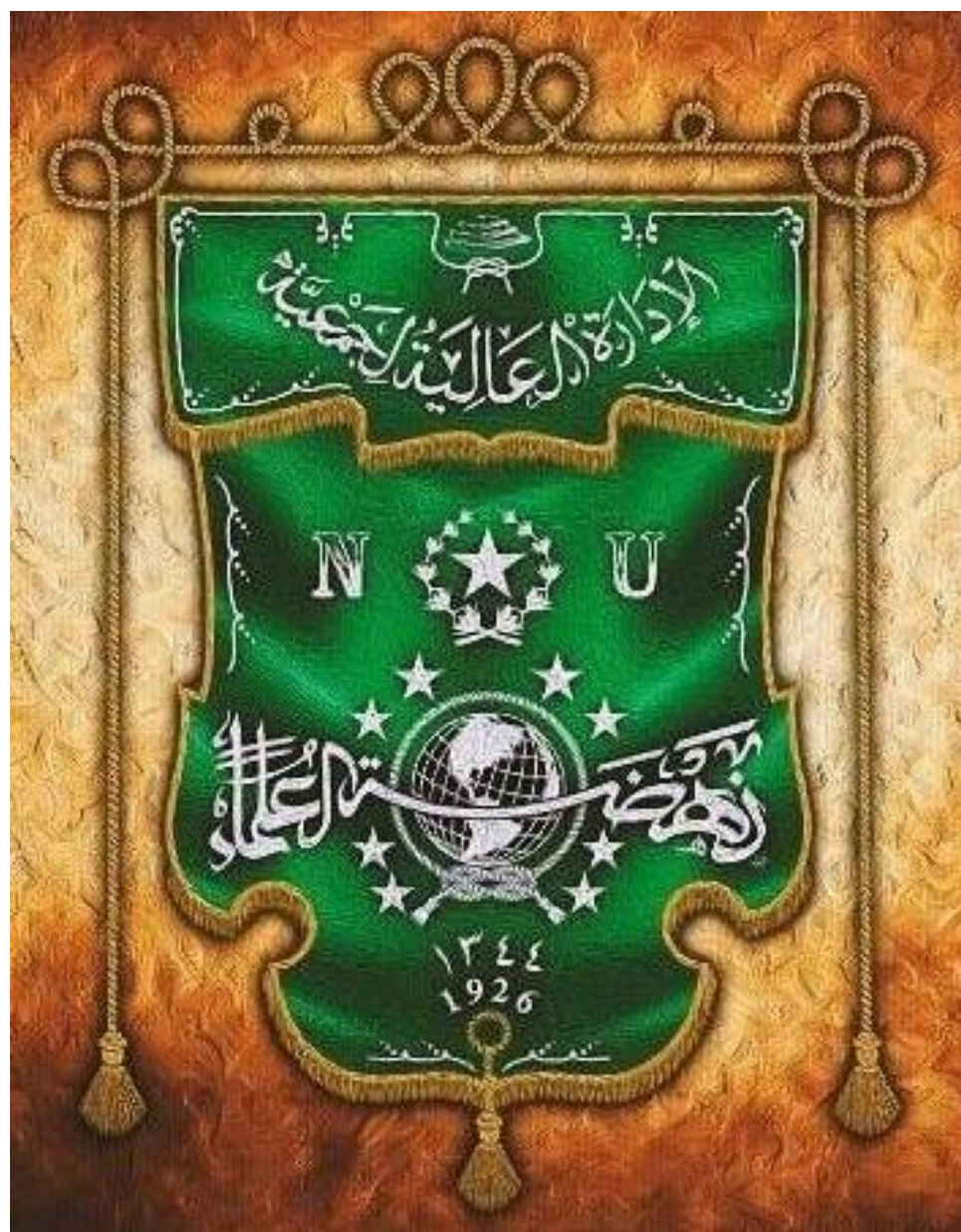
Hamzah Harun Al Rasyid. *Lahir 30 juli 1962. Alumni*

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) ini memperoleh gelar; Sarjana Muda (BA) 1987; dan Sarjana Lengkap (Drs) Aqidah-Filsafat 1989 dari Perguruan Tinggi Islam As'adiyyah Pusat Sengkang; Pendidikan Kader Ulama (PKU) 1988. Dari Persatuan 4 Pondok Pesantren Besar Sulawesi Selatan (Hai'at al-Takaful); Sarjana (Lc) Aqidah-Filsafat (1992) dari Univ. Al-Azhar Kairo Mesir; Program Magister Bid. Hukum Islam di Institut Study Islam Zamalik Kairo, 1992-1995; Magister (MA) Aqidah-filsafat dari UI Um Durman Sudan 1998; Program Doktor Filsafat di Univ. Nilain Khartoum 1999-2004; Doctor of The Malaysia State University (UKM) 2009.

Suami dari Dra. Hj. A. Besse Masdianah Tenri Tappu ini, selain aktif sebagai Dosen tetap Fak.Tarbiyah dan Keguruan, maupun Pasca Sarjana, Beliau juga merupakan Wakil Kordinator Kopertais Wilayah VIII Sulawesi, Maluku, & Papua.

Selain aktif di lembaga pendidikan tinggi, beliau juga aktif pada kegiatan non-formal separti beliau sebagai Presiden Komisaris PT. Diana Valas Indo Sejahtera, Dir. Utama PT. Al-Salam Anugerah Wisata. Divisi Hubungan luar negeri Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sul- Sel, Mustasyar NU Kota Makassar dll. Ayah dari enam anak ini pernah menjabat sebagai Ketua Umum KKS Kairo, Ketua Umum ICMI Khartoum, Sudan, Penasehat KKSS Malaysia, Dosen Tamu pada Univerciti Kebangsaan Malaysia, Professor Pelawat (Visiting Professor) pada Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Negara Brunei Darussalam. Dan saat ini Beliau sebagai Ketua Tanfidziyah PW NU Sulawesi Selatan.

ISBN 978-602-328-373-6